



Republik Indonesia

PETA JALAN SDGs INDONESIA MENUJU 2030



1 TANPA KEKAMPUNGAN	2 TANPA KELAPARAN	3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEHATERA	4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	5 KESETERAAN GENDER	6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	7 ENERGI BERSIH DAN TERANGKAI	8 PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	9 INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	10 BERKURANGNYA KESERAKITAN	11 KOTA DAN PEMukiman YANG BERKELANJUTAN	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN	13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	14 EKOSISTEM LAUTAN	15 EKOSISTEM DARATAN	16 PEREDAMAN KEKORUPSI DAN KEBERAGAMAN YANG INKLUSIF	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN
------------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---	---	--------------------------------	---	--	----------------------------------	------------------------	-------------------------	---	--------------------------------------

PETA JALAN SDGs INDONESIA

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**



We supports the Sustainable Development Goals



KATA PENGANTAR

Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dengan mencapai agenda pembangunan 2030. Dalam hal ini, Peraturan Presiden no. 59/2017 berkenaan dengan pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia telah mengamanatkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mempersiapkan Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

Peta Jalan TPB Indonesia dikembangkan melalui proses dan diskusi yang panjang dan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, memastikan bahwa isi dari peta jalan ini dapat merefleksikan aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Peta jalan ini berisikan permasalahan dan proyeksi dari indikator utama dari setiap tujuan dalam TPB, termasuk juga kebijakan progresif dalam mencapai target-target TPB. Terdapat sekitar 60 indikator yang masuk dalam peta jalan ini. Hasil skenario proyeksi dan skenario intervensi kebijakan dari setiap indikator menunjukkan dengan jelas bahwa pencapaian setiap target memerlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat antar-pemangku kepentingan serta komitmen bersama baik dalam pelaksanaan program kegiatan dan pembiayaan pencapaian agenda pembangunan 2030. Maka dari itu, peta jalan ini akan menjadi suatu alat yang penting untuk memandu semua pemangku kepentingan ke arah pencapaian agenda pembangunan Indonesia 2030 dengan menitikberatkan kolaborasi yang produktif dan pemahaman mendalam antar-pemangku kepentingan bahwasanya setiap tujuan dan target pada agenda pembangunan 2030 saling terkait dan menjadi daya ungkit satu sama lain. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim SDGs di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atas segala upayanya dalam mewujudkan peta jalan ini, juga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung penyempurnaan buku Peta Jalan TPB Indonesia ini.



Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Republik Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara	PINA	: Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah
Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	PISA	: <i>Programme for International Student Assessment</i>
BPJS Kesehatan	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
BPS	: Badan Pusat Statistik	RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
BTN	: Bank Tabungan Negara (<i>commercial bank</i>)	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>	SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
GDP	: Produk Domestik Bruto	SDGs	: <i>Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i>
ICT	: Informasi, Komunikasi, dan Teknologi	SDKI	: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
IGES	: <i>Institute for Global Environmental Strategies</i>	SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional	SUPAS	: Survey Penduduk Antar-Sensus
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
NGOs	: <i>Non Governmental Organizations</i>	UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>	WHO	: <i>World Health Organization</i>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 GAMBARAN UMUM	ix
BAB 2 TARGET DAN KEBIJAKAN TPB/SDGs 2030	xiv
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN	1
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	2
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN	5
2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. . .	6
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan (Food Insecurity Experiences Scale)	7
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) pada balita	8
2.2.2* Prevalensi wasting (kurus/sangat kurus) pada balita	9
2.3.1* Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di sektor pertanian	10
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	13
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	14
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	15
3.2.2* Angka Kematian Anak (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	16
3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	17
3.3.1. Angka Infeksi Baru HIV per 1.000 Populasi tidak Terinfeksi HIV.	18
3.3.2.(a) Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk	19
3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai status eliminasi malaria	20
3.4.1.(a) Persentase merokok pada pemuda (usia ≤ 18 tahun)	21
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa (usia ≥ 18 tahun)	22
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhankeluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	23
3.7.2.(a) Angka Total Fertilitas (TFR)	24
3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	25
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	29
4.1.1* Proporsi anak-anak pada: (a) kelas 4 (empat) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika	30
4.1.1* Proporsi remaja pada: (a) kelas 9 (sembilan) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika	32

4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	34	terhadap sumber air minum layak.	58
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat.	35	6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	60
4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	36	TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	63
4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/ Sederajat	37	7.1.1.(a) Konsumsi Listrik per Kapita	64
4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi . .	38	7.2.1* Bauran Energi Terbarukan	67
4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat & (2) SMP/MTs/ sederajat.	39	7.3.1* Intensitas Energi Primer	71
4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat & (4) Perguruan Tinggi	40	TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	73
4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di tingkat (1) SD/MI/ sederajat, (2) SMP/MTs/ sederajat, (3) SMA/SMK/MA/ sederajat, dan (4) Perguruan Tinggi	41	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB riil per kapita	74
4.c.1* Persentase guru yang bersertifikat pendidik – (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB)	42	8.3.1.(c) Persentase Askes UMKM ke Layanan Keuangan	76
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER	49	8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka.	78
5.3.1.* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersamasebelum umur 15 tahun & 18 tahun.	50	8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancanegara.	80
5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	52	TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR.	83
5.6.1.(a) Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi	53	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB	84
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SAIITASI LAYAK.	57	9.2.2* Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur.	86
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses		9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDB	88
		9.c.1* Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband	90
		TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN.	93
		10.1.1* Koefisien Gini.	94
		TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	97
		11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	98

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	101
12.5...* Produksi Sampah	102
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	105
13.2.1.(b) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	106
13.2.1.(c) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	107
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN	111
14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	112
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan ..	114
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN	117
15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	118
15.3.1.(a) Proporsi hutan terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.....	119
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	121
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi	122
16.7.2* Indeks Demokrasi Indonesia	124
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	126
TUJUAN 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	131
17.1.1.(a) Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB ...	132
17.8.1* Proporsi Individu yang Menggunakan Internet ..	134
17.11.1.(a) Pertumbuhan Produk Ekspor Non-Migas	136

BAB 3 KETERKAITAN 17 TUJUAN	139
PENDAHULUAN	140
KAJIAN LITERATUR	141
METODOLOGI	142
PEMETAAN KETERKAITAN	145
PROSPEK MENDATANG	148
BAB 4 SDGs Strategi Pembiayaan TPB/SDGs ...	149
PENDAHULUAN	150
KEBUTUHAN INVESTASI SDGs Indonesia	151
DISTRIBUSI INVESTASI SDGs	152
KEBUTUHAN INVESTASI SDGs per Area Investasi (1) ..	153
KEBUTUHAN INVESTASI SDGs per Area Investasi (2) ..	154
KEBUTUHAN INVESTASI SDGs per Area Investasi (3) ..	155
KEBUTUHAN INVESTASI SDGs per Area Investasi (4) ..	156
INVESTASI SDGs di Indonesia dan Peran Non Pemerintah	157
STRATEGI PEMBIAYAAN SDGs Indonesia	159
TUJUAN STRATEGI PEMBIAYAAN	160
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBIAYAAN SDGs	161
SDGs Financing Hub Indonesia	162
SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN yang Dikoordinasi dan Disinkronkan oleh SDGs Financing Hub	163

BAB 5 LANGKAH KEDEPAN 165
LANGKAH KE DEPAN 166

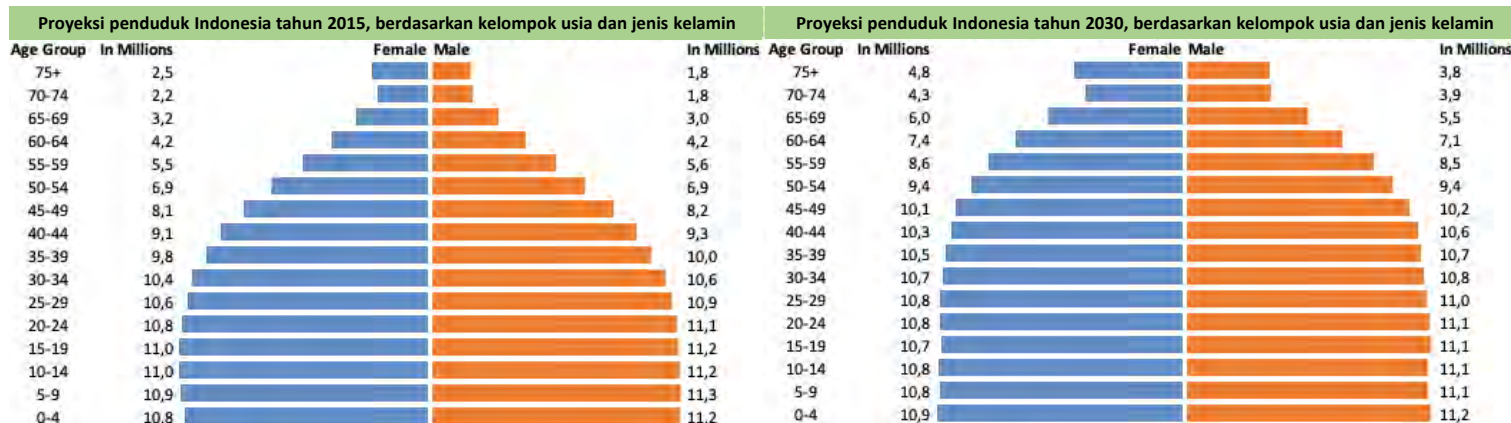


BAB 1

GAMBARAN UMUM



PENDAHULUAN: DINAMIKA DEMOGRAFI INDONESIA



Sumber: BAPPENAS, BPS, & UNFPA (2018).

Struktur demografi Indonesia

Didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64) yakni sebanyak 68,7% dari total penduduk pada tahun 2019 (Bappenas, BPS, and UNFPA, 2018).

Komposisi demografi seperti ini memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia karena populasi usia muda memberikan potensi angkatan kerja yang besar yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam satu dekade ke depan, sementara populasi usia muda masih mendominasi, populasi berusia lanjut (lansia) diproyeksikan naik hampir dua kali lipat dari angkanya di tahun 2015. Transisi seperti ini menuntut kebijakan yang lebih berpusat di sektor kesehatan, perawatan, dan perlindungan sosial.

Menilik beberapa indikator kependudukan, Indonesia telah menunjukkan perbaikan yang menakjubkan dalam beberapa dekade terakhir. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi telah menurun secara signifikan di mana AKB pada tahun 1971 sebesar 68 turun ke 24 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 sementara AKI pada tahun 1991 sebesar 390 turun ke angka 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Perbaikan serupa ditunjukkan oleh indikator lainnya seperti Angka Harapan Hidup yang diproyeksikan sebesar 71,6 tahun pada 2017, meningkat dari angka proyeksi tahun 1996 sebesar 64,4 tahun, juga Tingkat Fertilitas yang diproyeksikan sebesar 2.14 pada tahun 2017, meningkat dari angka pada tahun 1971 yang sebesar 5,6.

Namun demikian, beberapa isu masih menjadi tantangan bagi pembangunan Indonesia. Angka prevalensi stunting dan malnutrisi Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di negara-negara ASEAN, di mana 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah 5 tahun mengalami stunting. Terlebih lagi, Indonesia juga sedang menghadapi ancaman kerawanan pangan di tengah meningkatnya bahaya perubahan iklim.

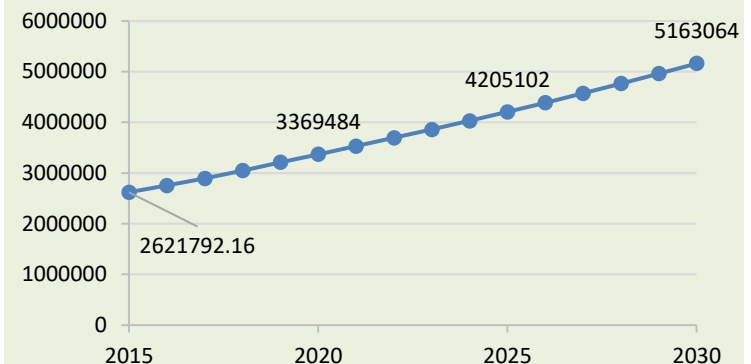
Ekonomi Indonesia

telah tumbuh sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir

Dalam 30 tahun, PDB riil Indonesia telah meningkat hampir empat kali lipat dari 794,027 miliar (ADHK 2010) pada tahun 1990 ke angka 3,046 triliun (ADHK 2010) pada tahun 2018 (OECD, 2019). PDB riil Indonesia diproyeksikan untuk terus tumbuh ke angka 5,163 triliun pada tahun 2030 yang akan menempatkan Indonesia di 5 perekonomian terkuat di dunia tahun 2030. Perbaikan pembangunan ekonomi tersebut juga diikuti oleh perbaikan taraf hidup yang ditunjukkan oleh kenaikan angka PDB per kapita yang stabil, juga transformasi struktural perekonomian Indonesia. Transformasi tersebut juga terefleksikan dari menurunnya share sektor agrikultur bersamaan dengan meningkatnya share sektor manufaktur dan jasa terhadap PDB. Perbaikan perekonomian juga menghasilkan kemunculan ekonomi digital yang akan menyiapkan Indonesia dalam era industry 4.0.

Namun begitu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga membawa tantangan lain di mana pertumbuhan tersebut memiliki dampak lingkungan dan sosial seperti polusi, deforestasi, dan ketimpangan pendapatan. Tutupan hutan Indonesia menurun secara signifikan di mana setengah dari hutan Indonesia telah hilang dalam 50 tahun, dan sekarang ini Indonesia adalah negara kedua, setelah Cina, penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Di samping permasalahan lingkungan, Indonesia juga berjuang dengan isu ketimpangan di era kemajuan ekonomi. Sejak tahun 2000, ketimpangan pendapatan meningkat tajam, di mana indeks Gini meningkat dari 28.5 pada tahun 2000 ke angka 38.1 pada tahun 2017.

PDB riil Indonesia (dalam juta dolar AS)



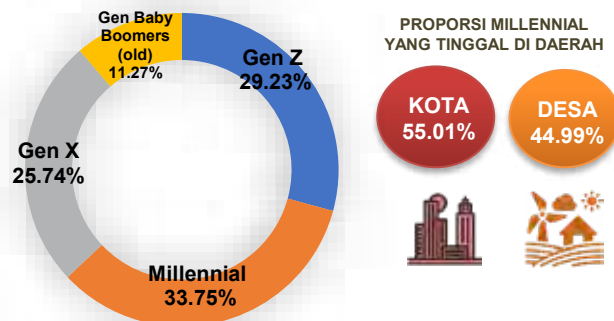
Sumber: OECD

Laporan Bank Dunia tahun 2015 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20% penduduk kelompok pendapatan tertinggi yang diidentifikasi sebagai kelas konsumen. Hal ini menuntut agenda pembangunan untuk lebih inklusif di masa depan sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat berkontribusi dan mendapat manfaat dari pembangunan ekonomi.

Untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi lebih inklusif dan memperbaiki kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, diperlukan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat, seperti melalui perpajakan dan keterlibatan aktif dalam demokrasi. Namun demikian, meningkatnya partisipasi memerlukan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang lebih baik. Tantangan dan tuntutan yang berasal dari kemajuan perekonomian Indonesia telah terkandung dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan seperti Tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, dan juga Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

TENTANG PETA JALAN SDGs INDONESIA

Pergeseran dari sektor agrikultur ke sektor manufaktur menghasilkan ingginya tingkat urbanisasi. Kebanyakan masyarakat tinggal di perkotaan. Pada tahun 2015, 53,3% masyarakat tinggal di perkotaan dan angka tersebut diproyeksikan naik ke angka 63,4% pada tahun 2030 (BPS). Pesatnya kemajuan pembangunan ekonomi juga berakibat pada berubahnya struktur sosio-ekonomi di Indonesia. Tarif hidup yang lebih tinggi menyebabkan masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi, dan menyebabkan kemunculan kelompok kelas menengah. Dinamika ekonomi disertai dinamika kependudukan berakibat pada bangkitnya kelas menengah millennial Indonesia. Fakta tersebut menuntut keperluan akan kehidupan komunitas dan perkotaan yang berkelanjutan. Pemukiman yang layak dan terjangkau serta sistem transportasi yang terintegrasi akan menjadi pokok dari kehidupan warga. Hal tersebut sejalan dengan keseluruhan agenda pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Sensus Populasi, BPS, 2017

Faktanya, Agenda Pembangunan Berkelanjutan/SDGs bukanlah istilah baru di Indonesia. Permasalahan global yang ditangani SDGs sebenarnya sudah terkandung dalam cita-cita Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat dunia juga relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia dewasa ini.

Dengan demikian, komitmen Indonesia untuk mencapai TPB/SDGs bukan hanya tentang memenuhi kesepakatan global namun juga tentang mencapai cita-cita Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. SDGs merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Selain itu, karena tujuan dan target pada SDGs yang mencakup isu lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, dan kemitraan, maka tidak akan ada rumus tunggal untuk mencapainya. Khususnya di Indonesia yang terdiri dari 1.340 kelompok etnis yang beragam dari budaya, bahasa, kepercayaan, maka diperlukan pendekatan multi-disiplin yang juga melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan dari mulai pemerintah, akademisi, LSM, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai SDGs.

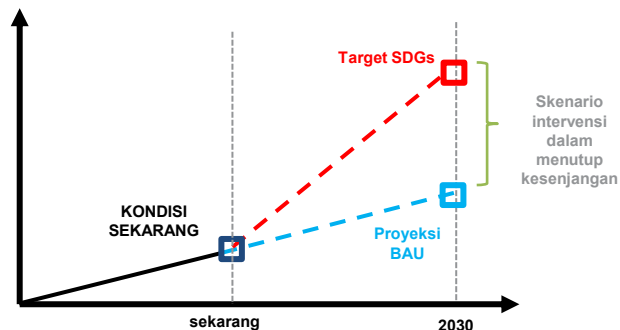


Pencapaian agenda yang ambisius dalam periode yang relatif singkat akan memerlukan seluruh pemangku kepentingan untuk berjuang lebih gigih. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pemantauan dan evaluasi dari pencapaian SDGs membutuhkan perjuangan yang besar. Akan tetapi, sumber daya yang kita miliki sekarang ini sangat terbatas dan memaksa kita untuk membuat prioritas atas tujuan dan target pada SDGs. Dalam melakukan prioritas, kita akan mempertimbangkan target yang mendesak untuk ditangani dan memiliki daya ungkit paling besar terhadap target-target lainnya. Dalam hal ini, isu kunci meruncing kepada isu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, infrastruktur, layanan ekosistem dan biodiversitas, juga pembiayaan administrasi pemerintahan.

TENTANG PETA JALAN SDGs INDONESIA

Dalam memantau sejauh mana posisi Indonesia dalam mencapai target SDGs, kita perlu indikator yang terukur untuk melacak perkembangan SDGs Indonesia. Sebanyak 94 dan 241 indikator global SDGs sebenarnya sudah sejalan dengan target-target dalam RPJMN. Dengan begitu, untuk memahami jalannya proyeksi indikator SDGs, seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki peta jalan yang berlaku sebagai panduan untuk merencanakan dan menargetkan program kegiatan agar sejalan dengan pencapaian SDGs. Peta jalan ini diharapkan bisa digunakan bersama-sama untuk mendukung pencapaian SDGs 2030.

Karena SDGs melibatkan manusia dan lingkungan secara bersamaan, sangat alamiah jika terdapat kesenjangan antara proyeksi baseline dengan targetnya. Pada peta jalan ini, selain skenario business-as-usual (BAU), kami mencoba melakukan proyeksi dengan skenario intervensi kebijakan untuk percepatan pencapaian SDGs 2030. Dengan melakukan itu, kita dapat mengukur apakah skenario intervensi telah sejalan dengan rencana pembangunan nasional



Simulasi proyeksi baseline dan proyeksi skenario intervensi

BAGAIMANA KAMI MEMBUAT PETA JALAN INI?

Pada prinsipnya, kami mencoba membuat sebuah peta jalan yang mudah dipahami bagi seluruh pemangku kepentingan:



RINGKAS



MEMASUKKAN TANTANGAN SETIAP INDIKATOR



MEMPERTIMBANGKAN PILIHAN KEBIJAKAN



ANALISI SITUASI TERKINI



STUDI KELAYAKAN PENCAPAIAN AGENDA 2030

Peta jalan ini berisi mengenai kondisi saat ini dan skenario proyeks untuk beberapa indikator yang diikuti dengan arah kebijakan bag setiap indikator dalam setiap tujuan. Bagian selanjutnya akan berbicara tentang Keterkaitan SDGs dan Kebutuhan Pembiayaan SDGs.

Dalam menuliskan narasi, pertama-tama, kami melakukan kajian teoretis berkenaan dengan indikator yang diproyeksikan. Lalu kami mengkaji secara empiris, membuat perbandingan antar-negara atau wilayah. Terakhir, kami melakukan penilaian apakah angka proyeks dan perhitungan tersebut mungkin dicapai pada tahun 2030.

Karena kami berfokus pada tujuan dan target yang paling relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia, isu kunci pada peta jalan ini meruncing kepada isu-isu di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, infrastruktur – termasuk infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi, telekomunikasi, dan energi hijau– layanan ekosistem dan biodiversitas, juga pembiayaan administrasi pemerintahan

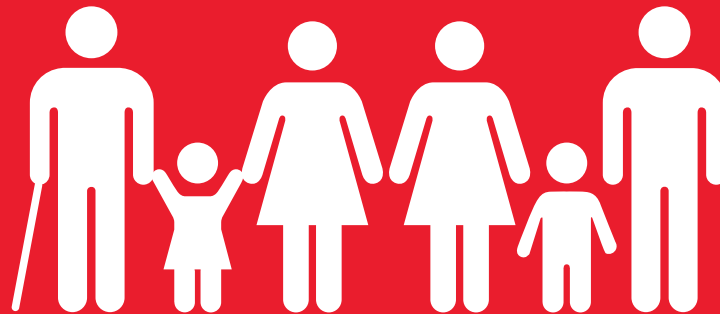


BAB 2

TARGET DAN KEBIJAKAN TPB/SDGs 2030



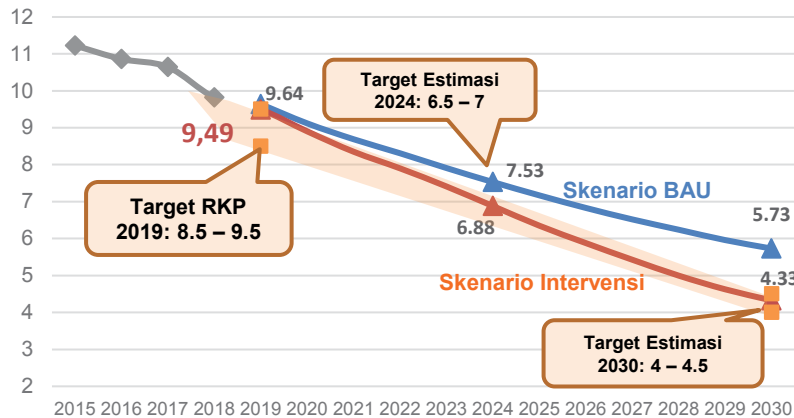
1 TANPA KEMISKINAN





TUJUAN 1 MENGHAPUS KEMISKINAN

1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional



5.73%

Tingkat kemiskinan tahun 2030 dengan skenario *business-as-usual*

4.33%

Tingkat kemiskinan tahun 2030 dengan skenario intervensi berada pada kisaran 4-4.5%

Metode proyeksi perhitungan Bank Dunia, asumsi pertumbuhan, pertumbuhan per desil, inflasi, dan populasi.

Berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ke angka 1-digit, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih besar

Dalam menghapuskan tingkat kemiskinan ekstrem secara menyeluruh

Tingkat kemiskinan yang sudah rendah membuat kemiskinan semakin sulit untuk diturunkan di mana kelompok termiskin lebih sulit keluar dari jerat kemiskinan karena berada dalam keadaan yang jauh lebih rumit dari sekadar ketidakmampuan finansial seperti: tempat tinggal yang terpencil, akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi layak, juga listrik.

- Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah **penurunan tingkat kemiskinan di kawasan termiskin Indonesia**. kawasan timur Indonesia (KTI) selalu memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kawasan barat Indonesia (KBI). Provinsi Papua, misalnya, akan memerlukan intervensi kebijakan khusus agar efektif. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam. Saat bencana terjadi, tingkat kemiskinan berpotensi untuk meningkat dengan tajam.
- Tidak hanya itu, bersamaan dengan menurunkan jumlah orang miskin, kita perlu memastikan bahwa orang-orang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Maka itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan stabilitas makroekonomi (pengendalian pertumbuhan dan inflasi, khususnya harga bahan pokok). Pada tingkat mikro, kebijakan mengenai perlindungan sosial dan ekonomi produktif perlu dilanjutkan.

**Persentase penduduk
di bawah garis kemiskinan nasional**

Tahun	Baseline	Intervensi	Target
2015	11.22	11.22	-
2019	9.64	9.49	8.5 – 9.5
2024	7.53	6.88	6.5 – 7.0
2030	5.73	4.33	4 – 4.5



**Arah Kebijakan
2020-2024**

Strategi

Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas

- Pemantapan jaminan sosial yang komprehensif dan memadai bagi penduduk miskin dan rentan.
- Integrasi bantuan dan subsidi tepat sasaran yang mendorong peningkatan keuangan inklusif.
- Pengembangan kualitas layanan dasar, melalui tata kelola SPM yang handal dan responsif.

Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis

- Penguatan Tim Koordinasi Daerah untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pencapaian SDGs.
- Pemantapan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) yang terhubung dengan basis data kependudukan dan JKN
- Pengembangan sistem data dan layanan satu pintu untuk sinergi program-program pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan kapasitas Pemda dalam analisis, perencanaan dan penganggaran untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

- Mendorong kolaborasi peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan mentoring.
- Peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan (a.l. perhutangan sosial dan Reforma Agraria).
- Pemanfaatan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mengembangkan nilai tambah usaha produktif masyarakat.
- Pengembangan usaha sosial rintisan (social entrepreneurs) untuk mengentaskan permasalahan sosial masyarakat

**Arah Kebijakan
2025-2030**

Strategi

Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas

- Pemantapan bantuan sosial yang terintegrasi dengan keuangan inklusif, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.
- Pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam layanan dasar di seluruh pelosok Indonesia.
- Sinergi dan kerjasama pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, LSM) dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis

- Mendorong inovasi Pemerintah Daerah dalam percepatan pengurangan kemiskinan.
- Pengembangan strategi replikasi di daerah-daerah sulit untuk mendorong pengurangan kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

- Peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan menengah melalui berbagai pelatihan, pendampingan memulai usaha, dan mentoring.
- Menjamin permodalan dan pasar bagi usaha ekonomi lokal.
- Pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat.
- Menciptakan iklim usaha yang harmonis dengan didukung kebijakan yang adil dan merata.



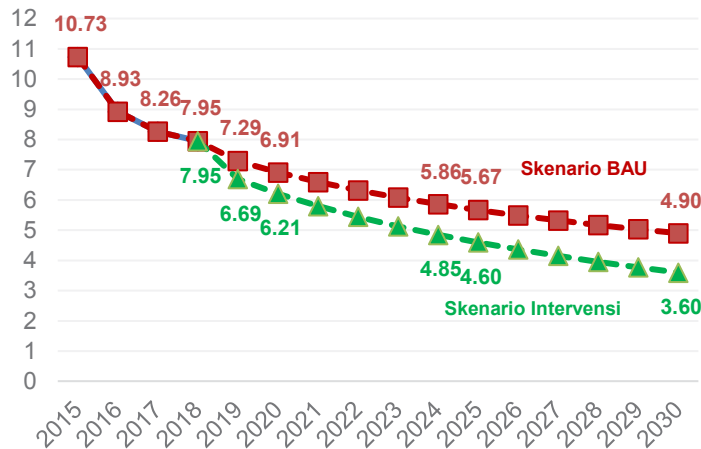
2 TANPA KELAPARAN



2 MENGHAPUS
KELAPARAN

TUJUAN 2 MENGHAPUS KELAPARAN

2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan



Sumber: SUSENAS, BPS

4,90%

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2030 dengan skenario BAU*

3,60%

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2030 dengan skenario intervensi**

* Skenario BAU menggunakan model logaritmik, dengan mempertimbangkan angka PoU riil < Angka Kemiskinan.

** Skenario Intervensi mempertimbangkan hasil Skenario Intervensi kemiskinan serta keterkaitan kemiskinan dengan PoU pada kondisi global saat ini.



- Proporsi masyarakat yang kekurangan konsumsi pangan di Indonesia mengalami penurunan yang tinggi pada periode 2000-2014.¹
- Prevalensi kekurangan konsumsi pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan nasional.

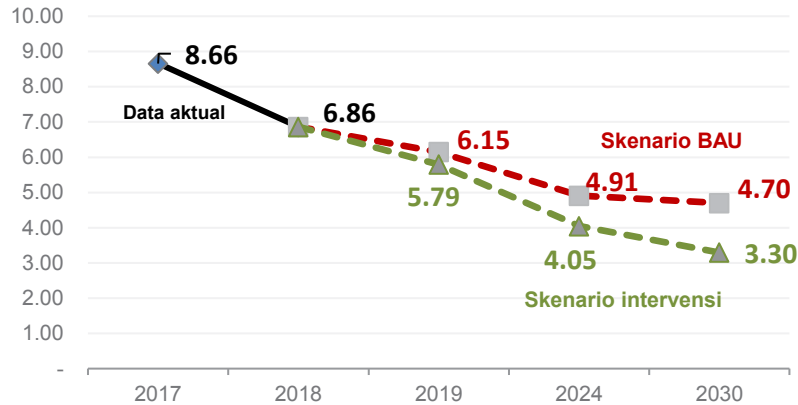
- Dengan demikian, menjadi sangat krusial bagi negara untuk memastikan masyarakat memiliki **akses terhadap bahan makanan pokok** dalam rangka menurunkan jumlah kekurangan konsumsi pangan.
- Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberikan **pengaruh buruk pada sektor pertanian** seperti **bencana alam, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem**. Laporan FAO tahun 2017 menyatakan bahwa stagnannya penurunan angka kekurangan pangan disebabkan oleh meningkatnya **insiden cuaca ekstrem** dan bencana yang terkait dengan **perubahan iklim**.
- Upaya meningkatkan akses dan ketersediaan pangan harus ditingkatkan untuk mencapai target penurunan angka prevalensi kekurangan pangan pada tahun 2030 ke 3,6%. Upaya tersebut antara lain: **penguatan produksi domestik tanaman prioritas, pengelolaan cadangan pangan nasional, pemantapan pasokan komoditas pangan dan harga bahan makanan pokok, serta mitigasi dampak perubahan iklim**.

¹ SUSENAS (BPS).

2 MENGHAPUS
KELAPARAN

TUJUAN 2 MENGHAPUS KELAPARAN

2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan (*Food Insecurity Experiences Scale*)



Sumber: SUSENAS, BPS

4,70

Skala pengalaman kerawanan pangan tahun 2030 dengan skenario BAU

3,30

Skala pengalaman kerawanan pangan tahun 2030 dengan skenario intervensi

Skor skala pengalaman kerawanan pangan: 0-10



- **Skala pengalaman kerawanan pangan** merupakan indikator tambahan dalam mengukur tingkat ketahanan pangan yang pengukurannya berdasarkan respon langsung atas **akses masyarakat terhadap kecukupan bahan makanan**. Indikator tersebut menangkap dimensi akses terhadap ketahanan pangan. Sejak 2017, Indonesia telah menyediakan data skala kerawanan pangan sebanyak dua kali dalam setahun sampai tingkat kabupaten/kota.

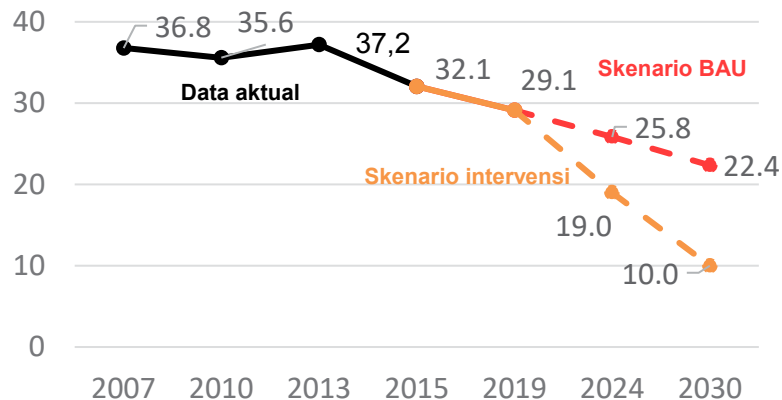
- Tingkat kerawanan pangan pada skala rumah tangga sangat beragam di tiap provinsi di Indonesia. Pada tahun 2017, rumah tangga di **Provinsi Nusa Tenggara Timur** memiliki risiko tertinggi dalam mengalami **kerawanan pangan (31,8%)** sementara Provinsi Bangka Belitung memiliki risiko terendah (3,8%).¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa **akses dalam mendapatkan bahan makanan dan asupan nutrisi** antar-kawasan di Indonesia **masih timpang**.
- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Kementerian Pertanian, 2018) menunjukkan **rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik, jalan, dan air yang layak rentan mengalami kerawanan pangan**. Karena itu, peningkatan ketahanan pangan perlu disertai perbaikan atas akses ekonomi terhadap pangan itu sendiri, seperti **pembangunan infrastruktur** khususnya pada kelompok atau **kawasan miskin**.

¹Eksplorasi Data SUSENAS untuk Intervensi Stunting, BPS (2018).



TUJUAN 2 MENGHAPUS KELAPARAN

2.2.1* Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) pada balita



22.4%

Prevalensi balita stunting tahun 2030 dengan skenario BAU*

10.0%

Prevalensi balita stunting tahun 2030 dengan skenario intervensi

* Model proyeksi eksponensial

Sumber: RISKESDAS, Kementerian Kesehatan

30,8% balita di Indonesia mengalami stunting pada tahun 2018

- Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan **prevalensi stunting yang tinggi** menurut klasifikasi Badan Kesehatan Dunia/WHO. Prevalensi balita stunting di Indonesia merupakan salah satu yang **tertinggi** dibandingkan negara-negara di **Asia Tenggara**.¹
- Selain itu, **anak-anak miskin** di Indonesia **dua kali lipat** lebih mungkin untuk mengalami **stunting** dibandingkan anak-anak seusianya yang tidak miskin.

¹Regional Overview of Food Security and Nutrition, FAO (2018).

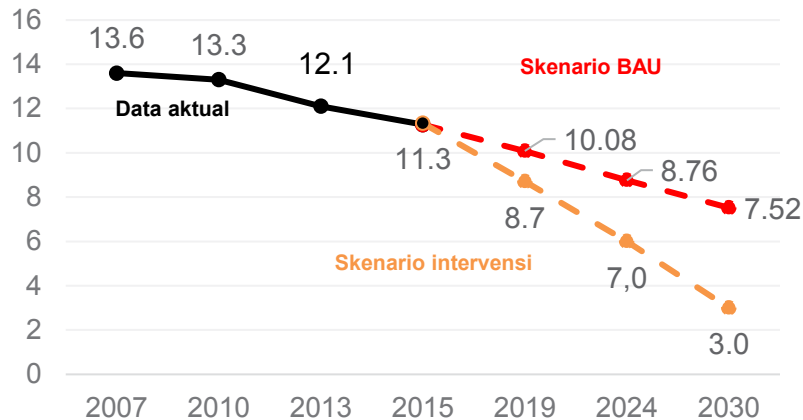
- Pada tahun 2013, **48% balita** dari 20 persen rumah tangga termiskin mengalami **stunting**. Sedangkan pada 20 persen rumah tangga terkaya, persentase balita stunting adalah 29%. Perbedaan ini disebabkan oleh **ketimpangan akses** terhadap sanitasi dan air minum layak, pelayanan kesehatan, nutrisi makanan yang tinggi, dan akses yang tidak layak terhadap praktik pengurusan dan pemberian makanan pada balita antara rumah tangga dengan status sosio-ekonomi dan letak geografis yang berbeda.
- Diperlukan pendekatan multisektoral untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia. Salah satunya dengan **intervensi nutrisi yang terintegrasi pada masa 1.000 hari pertama kehidupan**. Program ini termasuk **penyediaan nutrisi lengkap** bagi ibu hamil dan menyusui, **pemberian ASI eksklusif** dan MPASI yang benar, pemantauan pertumbuhan, **peningkatan akses terhadap sanitasi dan air minum layak**, perkembangan anak usia dini, dan menggalakkan pola asuh anak yang benar.

²Riskesdas, Kementerian Kesehatan (2018)



TUJUAN 2 MENGHAPUS KELAPARAN

2.2.2* Prevalensi wasting (kurus/sangat kurus) pada balita



Sumber: RISKESDAS, Kementerian Kesehatan

10,2% balita di Indonesia mengalami wasting pada tahun 2018

Penelitian oleh Harding, et al. (2017) mengidentifikasi beberapa **penyebab umum stunting dan wasting** antara lain **buruknya nutrisi ibu** saat sebelum dan masa kehamilan. Selain itu beberapa hal lain seperti **pola asupan gizi** pada anak-anak, **buruknya kebersihan diri, sanitasi yang tidak layak**, juga **kemiskinan**, berkaitan erat dengan stunting dan wasting.

7.52%

Prevalensi balita wasting tahun 2030 dengan skenario BAU*

3.00%

Prevalensi balita wasting tahun 2030 dengan skenario intervensi

*Proyeksi model eskponensial

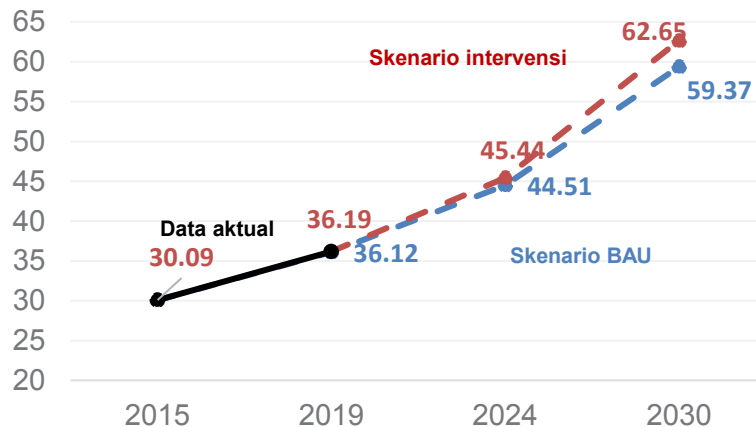
- Salah satu tantangan utama dalam pengentasan gizi buruk di Indonesia adalah **tingginya harga makanan bergizi**. Hampir 40% rumah tangga di Indonesia tidak mampu menerapkan pola makan sehat dengan harga terjangkau.
- Peningkatan status gizi balita memerlukan kebijakan **perluasan akses terhadap makanan benutrisi tinggi** antara lain melalui **program bantuan pangan dan suplemen makanan bagi kelompok miskin dan rentan** yang tepat sasaran. Selain itu, perlu digalakkan perilaku pola makan sehat bernutrisi tinggi dan seimbang, pola asuh anak yang benar, juga peningkatan pelayanan kesehatan seperti **imunisasi dasar lengkap**.

*Cost of Diet and Fill the Nutrient Gap Studies, World Food Programme (2018).



TUJUAN 2 MENGHAPUS KELAPARAN

2.3.1* Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di sektor pertanian



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

59,37

juta Rupiah

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja pertanian tahun 2030 dengan skenario BAU*

62,65

juta Rupiah

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja pertanian tahun 2030 dengan skenario intervensi**

*Proyeksi model logistik.

** Menggunakan proyeksi model OE dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020-2024 adalah 5.7% dan 2025-2030 adalah 6,1%.

- Pada tahun 2050, jumlah **penduduk Indonesia** diperkirakan **tumbuh sebesar 31%**. Jumlah penduduk yang tinggi memerlukan jumlah makanan yang juga tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, **produksi pertanian** Indonesia **harus tumbuh sebesar 60%**.
- Dalam 5 tahun terakhir, sektor pertanian di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan termasuk 1) kualitas sumber daya manusia, 2) penyediaan infrastruktur dan jaringan irigasi, 3) jumlah tenaga kerja dan upah di sektor pertanian, dan 4) kuantitas dan kualitas bibit serta pupuk tanaman.
- Ditambah lagi, mayoritas petani di Indonesia adalah **petani kecil** yang secara rata-rata hanya **mengelola 0,6 hektar lahan pertanian**. Para petani tersebut memiliki **akses yang terbatas** terhadap **teknologi pertanian modern** dan **varietas bibit** tanaman, dan cenderung memiliki **tingkat pendidikan yang rendah**. Mereka sangat berisiko untuk mengalami kemiskinan.
- Berdasarkan uraian di atas, peningkatan kesejahteraan dan produktivitas petani di Indonesia perlu dilakukan melalui pemberian bantuan finansial dan teknis bagi petani untuk mendiversifikasi produk tanamannya.

¹Creative Economy: An Engine to Improve Indonesia's Agriculture, ASEAN Foundation (2019).

²Andoko E., et al., 2018. A Review of Indonesia's Agriculture Development in Recent Years.

Prevalensi FIES

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	8.66	8.66
2019	6.15	5.79
2024	4.91	4.05
2030	4.70	3.30



Prevalensi kurang gizi

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	10.73	10.73
2019	7.29	6.69
2024	5.86	4.85
2030	4.90	3.60

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, beragam, dan aman

- Jaminan pemenuhan pangan pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah dan terkena bencana.
- Penyediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri dan pangan lokal: peningkatan produktivitas, perlindungan lahan pangan, peningkatan kualitas lahan dan air, pengembangan budidaya ramah lingkungan.
- Efisiensi distribusi/logistik dan stabilisasi harga pangan: pemantapan cadangan pangan pemerintah, operasi pasar.
- Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan dan gizi: promosi/kampanye pola pangan sehat, penyediaan infrastruktur keamanan pangan.
- Sistem kewaspadaan pangan dan gizi: peningkatan efisiensi sistem informasi dan penanganan bencana yang terkait dengan pangan dan gizi, pengembangan kelembagaan sosial dalam.

Policy Direction
2025-2030

Strategi

Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, beragam, dan aman

- Perbaiki sistem jaminan pemenuhan pangan pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah dan terkena bencana agar lebih tepat sasaran dan lebih sesuai kebutuhan pangan dari penerima manfaat.
- Penyediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri, termasuk pangan lokal dan pangan olahan.
- Efisiensi distribusi/logistik dan stabilisasi harga pangan: mantapan cadangan pangan pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan dan gizi: efisiensi kelembagaan keamanan pangan.
- Sistem kewaspadaan pangan dan gizi, termasuk pertimbangan kondisi regional dan global.
- Mengembangkan sistem keberlanjutan pangan.

Prevalensi balita stunting			Prevalensi balita wasting			Nilai tambah pertanian/pekerja tani		
Tahun	Baseline	Intervensi	Tahun	Baseline	Intervensi	Tahun	Baseline	Intervensi
2015	32.07	32.07	2015	11.34	11.34	2015	30.09	30.09
2019	29.13	29.13	2019	10.08	8.70	2019	36.12	36.19
2024	25.84	19.00	2024	8.76	7.00	2024	44.51	45.44
2030	22.37	10.00	2030	7.52	3.00	2030	59.37	62.65

Arah Kebijakan 2020-2024	Strategi	<p>Mempercepat perbaikan gizi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan intervensi sensitif secara terintegrasi. • Peningkatan intervensi yang bersifat <i>life saving</i>. • Penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat. • Penguatan sistem surveilans gizi. 	<p>Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas SDM pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan perlindungan terhadap petani sebagai produsen pangan. • Pengembangan bisnis usahatani: pengembangan kemitraan bisnis antara petani dan pelaku usaha lain, pengembangan kluster usahatani. • Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pertanian: perbaikan kelembagaan pendidikan pertanian. • Pengembangan mutu dan nilai tambah hasil produksi pertanian.
		<p>Meningkatkan status gizi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (<i>food based approach</i>). • Peningkatan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan intervensi sensitif secara terintegrasi. • Penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat. • Penguatan sistem surveilans gizi. 	<p>Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas SDM pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan bisnis usahatani: peningkatan kemitraan bisnis petani ke level regional dan global, dan pengembangan kluster usaha tani. • Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pertanian: perbaikan modul pendidikan pertanian, pengembangan program kemitraan pendidikan-industri berbasis pertanian. • Pengembangan mutu dan nilai tambah hasil produksi pertanian.

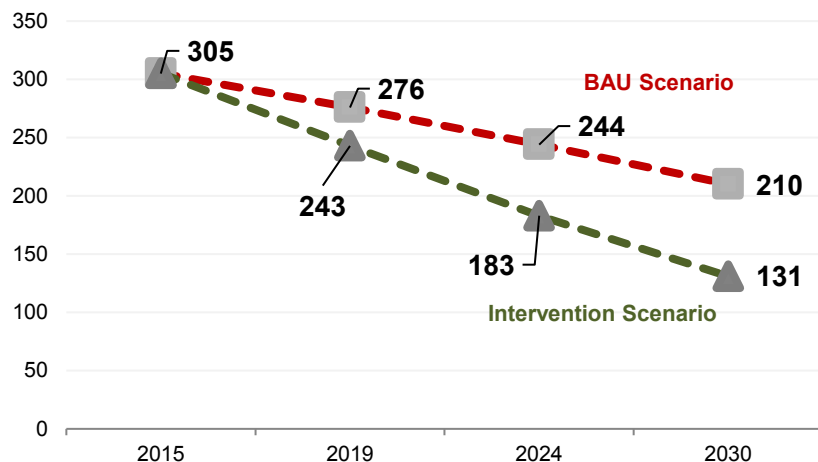
3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA





TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup



Sumber: Sensus Penduduk dan SUPAS

210

AKI per 100.000 kelahiran hidup dengan skenario BAU*

131

AKI per 100.000 kelahiran hidup dengan skenario intervensi**

* Proyeksi model eksponensial

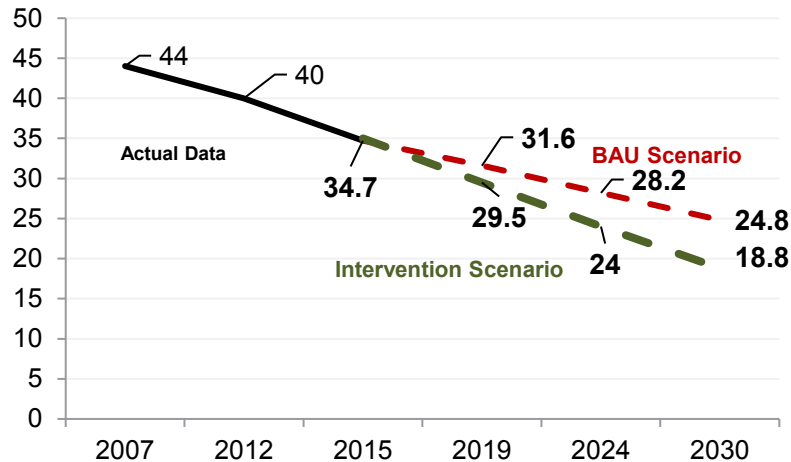
** Skenario Kebijakan yang digunakan adalah ARR 5,0%

Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi

Penyebab utama tingginya angka kematian ibu beragam dari mulai faktor pelayanan fasilitas kesehatan hingga faktor sosial-ekonomi. Di samping itu, para perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kematian saat melahirkan.

- Sebenarnya proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan profesional sangat penting untuk mencegah terjadinya kematian saat persalinan. Namun begitu, masih terdapat ketimpangan akan cakupan tenaga kesehatan profesional antar-wilayah di Indonesia. Cakupan tenaga kesehatan profesional di area Jawa-Bali mencapai 52% sedangkan di luar itu hanya 42%.
- **Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas juga meningkatkan angka kematian ibu.** Selain karena kurangnya fasilitas kesehatan, kendala geografis juga menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Untuk mencegah dan menurunkan angka kematian ibu, sistem rujukan kesehatan ibu dan anak, serta peran bidan profesional perlu ditingkatkan kapastiasnya.

3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup



24.8

AKBa per 1.000 kelahiran hidup tahun 2030 dengan skenario BAU*

18.8

AKBa per 1.000 kelahiran hidup tahun 2030 dengan skenario intervensi**

* Proyeksi model eksponensial

** Skenario Kebijakan yang digunakan adalah ARR 5,0%

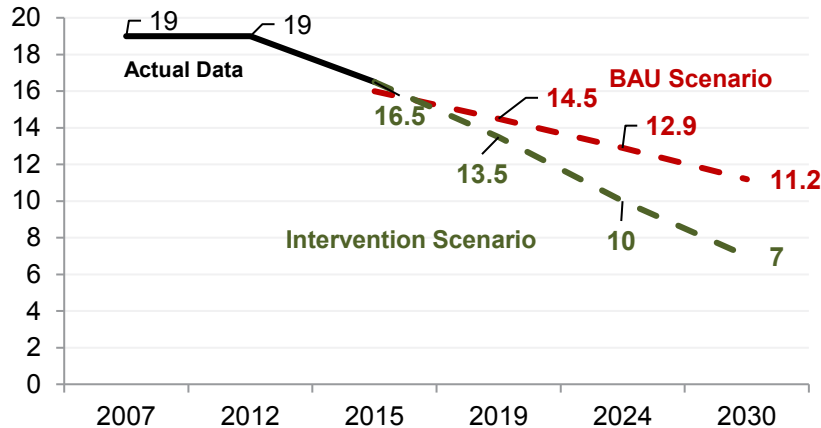
Sumber: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

- Angka kematian balita di Indonesia telah menunjukkan penurunan yang signifikan antara tahun 1960 hingga tahun 2000. Angka tersebut juga ditargetkan untuk terus turun sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga agenda pembangunan global tahun 2030.
- Penurunan AKBa yang signifikan didorong oleh meningkatnya status gizi anak-anak dan menurunnya tingkat kemiskinan. Selain itu, program mitigasi untuk menurunkan AKBa sudah dilakukan seperti: oral hidrasi untuk penanganan diare, kelambu berinsektisida untuk pencegahan malaria, dan secara umum adanya perbaikan fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 4 dekade tersebut.
- Tanpa adanya intervensi kebijakan, AKBa di Indonesia pada tahun 2030 diestimasi akan berada di angka 24,8 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Sementara intervensi kebijakan yang tepat sasaran dapat menurunkan angka estimasi menjadi 18,8 kematian.



TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.2.2* Angka Kematian Anak (AKN) per 1.000 kelahiran hidup



Source: Indonesia Demographic and Health Survey (SDKI)

11.2

AKN per 1.000 kelahiran hidup tahun 2030 dengan skenario BAU*

7.0

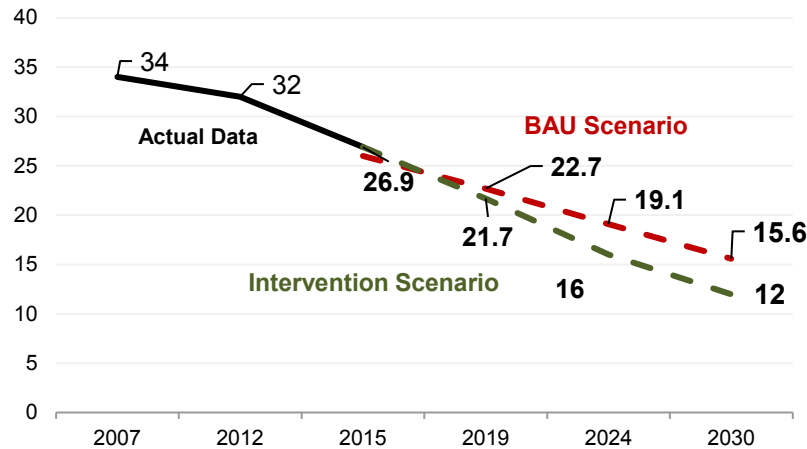
AKN per 1.000 kelahiran hidup tahun 2030 dengan skenario intervensi**

Policy intervention scenario used is ARR 5.0%

- Tiga dari empat kematian pada anak terjadi pada minggu pertama kelahiran dan 40 persennya terjadi pada 24 jam pertama setelah kelahiran. Sebesar 47% dari kematian balita merupakan kematian anak.
- Penyebab kematian anak berhubungan erat dengan fasilitas bersalin. Peningkatan fasilitas bersalin dapat mencegah dan menangani diare, pneumonia, dan komplikasi melahirkan yang merupakan penyebab kematian anak. Tidak hanya fasilitas kesehatan, tenaga profesional yang membantu proses persalinan juga perlu ditingkatkan cakupan dan ketersediannya.
- Selain faktor yang berhubungan dengan kesehatan, faktor sosio-ekonomi juga berkaitan erat dengan tingkat kematian anak. Bayi baru lahir dengan ibu yang berpendidikan rendah, 3 kali lebih mungkin untuk mengalami kematian pada sebulan pertama kelahiran dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan tinggi. Angka kematian anak juga lebih tinggi di area pedesaan di mana fasilitas kesehatan belum sebaik di area perkotaan.

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup



Source: Indonesia Demographic and Health Survey (SDKI)

15.6

AKB per 1.000
kelahiran hidup
tahun 2030 dengan
skenario BAU

12

AKB per 1.000
kelahiran hidup
tahun 2030 dengan
skenario intervensi

- Policy intervention scenario used is ARR 5.0%
- Achievement in 2017: **24**
- RKP target 2019 : **21**



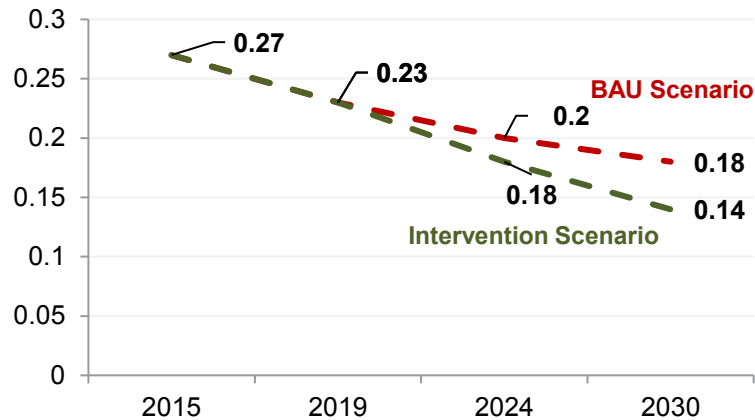
- Meskipun jumlah kematian bayi sudah turun secara signifikan, angka kematian bayi di Indonesia masih merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. AKB di Indonesia 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia, 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand. Dan masih 1,3 kali lipat lebih tinggi dari Filipina.

- Target menurunkan angka kematian bayi ke angka 12 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 menjadi tantangan yang sulit karena penyebab kematian bayi semakin kompleks yang berkaitan erat dengan penanganan masa kehamilan ibu dan masa pasca-persalinan.
- Setengah dari kematian bayi terjadi pada periode neonatal (28 hari pasca-kelahiran). Maka itu, kualitas penanganan saat persalinan dan satu bulan pertama pasca-melahirkan sangat penting dilakukan. Selain itu, imunisasi memiliki peran yang penting dalam mencegah kematian pada bayi dan anak.



TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.3.1. Angka Infeksi Baru HIV per 1.000 Populasi tidak Terinfeksi HIV



Source: Ministry of Health, Republic of Indonesia

0.18

Kasus infeksi HIV baru per 1.000 populasi dengan skenario BAU*

0.14

Kasus infeksi HIV baru per 1.000 populasi dengan skenario intervensi**

* Proyeksi dengan denominator 1.000 populasi maupun populasi berisiko hasilnya sama
 ** Intervensi kebijakan dengan skenario moderat
 *** Target RKP 2019 : <math><0.5</math>



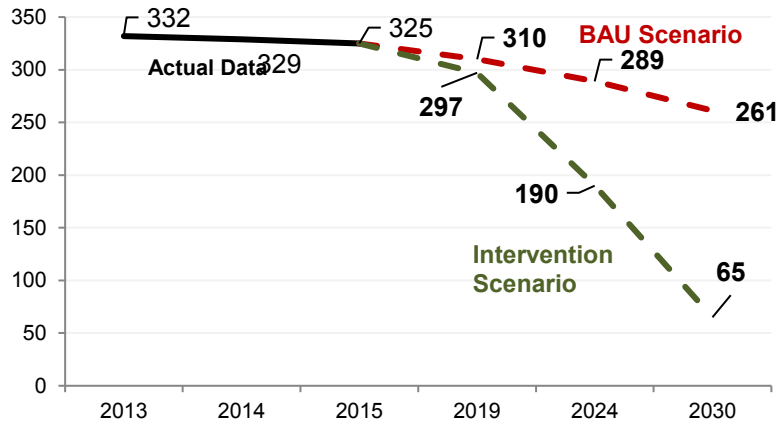
LET'S STOP HIV TOGETHER



- Kasus infeksi HIV yang dilaporkan ditengarai jauh lebih sedikit dari kasus infeksi HIV sebenarnya yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Pada tahun 2018, UNAIDS mengestimasi sebanyak 640.443 orang positif HIV atau mengidap AIDS sementara jumlah orang yang terinfeksi HIV/AIDS yang tercatat hanya 301.959 atau 47%-nya saja.
- Epidemio HIV di Indonesia terkonsentrasi pada populasi tertentu. Pencegahan dan penanganan kasus HIV dapat beragam tergantung budaya setiap daerah. Faktor kebudayaan perlu dipertimbangkan ketika mendesain intervensi kebijakan agar target prevalensi HIV dapat ditekan ke angka 0,14 per 1.000 populasi pada tahun 2030.

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.3.2.(a) Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk



Source: Global TB Report (adjustment)

Insiden TB per 100.000 penduduk

261

Kasus pada tahun
2030 dengan
skenario BAU*

65

Kasus pada tahun
2030 dengan skenario
intervensi**

** Intervensi kebijakan dengan skenario akselerasi

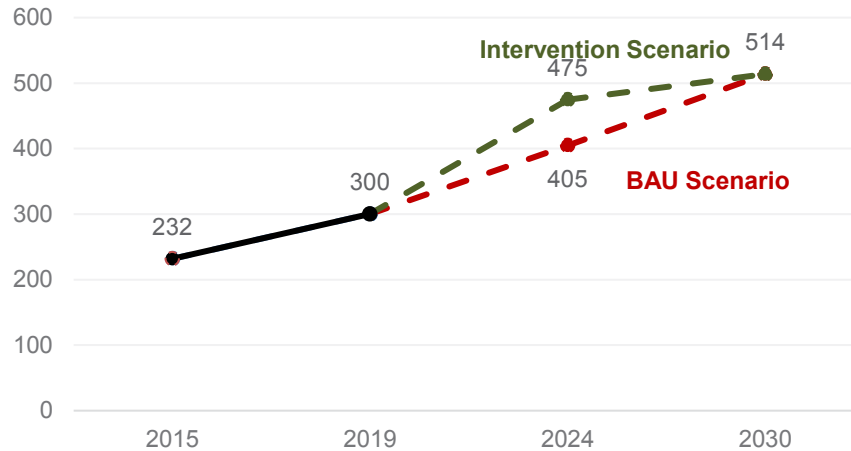
Indonesia merupakan negara dengan kasus tuberculosis tertinggi ketiga di dunia.

- Kasus TB dapat diturunkan dan dicegah dengan memastikan bahwa pasien terinfeksi TB menjalani pengobatan secara menyeluruh tanpa terputus. Namun begitu, hanya sebanyak 53% dari total kasus yang tercatat secara resmi (WHO, 2016). Seperti halnya pada kasus HIV, banyak kasus infeksi TB tidak dilaporkan karena khawatir akan stigma masyarakat terhadap pasien terjangkit TB dan akhirnya membuat pasien menyangkal hal tersebut.
- Dengan desain kebijakan yang tepat, jumlah insiden TB di Indonesia dapat ditekan ke angka 65 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2030. Perlu digarisbawahi bahwa insiden kasus TB sejatinya sangat erat dengan isu kemiskinan, ketimpangan pembangunan, termasuk masih minimnya akses ke fasilitas kesehatan berkualitas.



TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai status eliminasi malaria



514



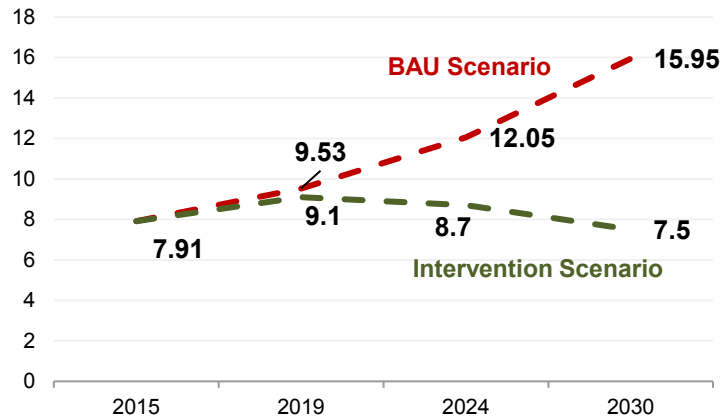
Kabupaten/kota yang mencapai status bebas malaria (dengan intervensi kebijakan)



- Perkembangan Indonesia dalam memberantas Malaria cukup memuaskan di mana sudah lebih dari 50% kabupaten/kota sudah berstatus bebas Malaria.
- Namun begitu, masih ada beberapa daerah yang masih mengalami endemik Malaria, terutama Kawasan Indones Timur di mana temperatur di wilayah timur cenderung lebih tinggi. Ditambah lagi, kawasan timur secara geografis dipenuhi dengan rawa-rawa. Tingkat sanitasi layak dan cakupan imunisasi dasar lengkap pun masih tergolong rendah, serta kemiskinan masih tinggi. Hal tersebut merintang strategi pemberantasan Malaria.
- Terlepas dari itu semua, kabar gembiranya adalah Indonesia diprediksi akan terbebas dari kasus Malaria di tahun 2030. Dengan intervensi kebijakan, daerah bebas Malaria juga lebih cepat untuk dicapai.

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.4.1.(a) Persentase merokok pada pemuda (usia ≤18 tahun)



Source: Riskesdas, Ministry of Health



- Penggunaan tembakau di Indonesia, atau kebiasaan merokok, dimulai sejak sangat dini di usia 12-13 tahun dan didominasi oleh laki-laki daripada perempuan.

* Proyeksi model eksponensial

15.95%

Prevalensi merokok pada remaja tahun 2030 dengan skenario BAU*

7.5%

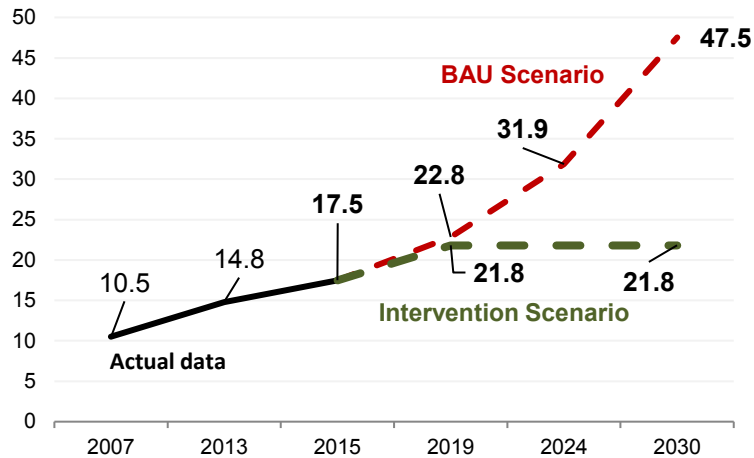
Prevalensi merokok pada remaja tahun 2030 dengan skenario intervensi

- Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan terkait pengendalian kebiasaan merokok melalui beberapa peraturan seperti keharusan area publik bebas asap rokok, pembatasan promosi dan iklan rokok, peringatan akan bahaya merokok lewat gambar pada kemasan rokok, serta pelarangan penjualan rokok pada anak usia di bawah 18 tahun.
- Konsumsi rokok mencapai 12% dari total rata-rata pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Pengeluaran untuk rokok bahkan lebih tinggi dari pengeluaran untuk sayuran dan daging/ikan. Proporsi tersebut juga lebih tinggi di area perdesaan daripada area perkotaan.
- Tanpa komitmen yang kuat untuk pengendalian rokok, prevalensi merokok pada remaja diproyeksikan untuk terus naik hingga 16%. Pengendalian rokok harus dilakukan secara multisektor, bukan hanya sektor kesehatan, namun juga pendidikan, pertanian, industri, juga perdagangan.



TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa (usia ≥ 18 tahun)



Sumber: Riskesdas

* Proyeksi model eksponensial

Prevalensi penderita obesitas terus meningkat. **Pada tahun 2018, 1 dari 5 penduduk dewasa menderita obesitas di Indonesia.**

47.5% | 21.8%

Prevalensi obesitas pada remaja tahun 2030 dengan skenario BAU*

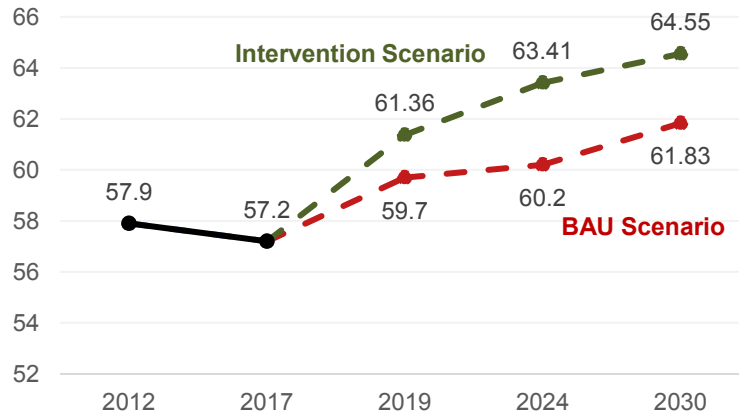
Prevalensi obesitas pada remaja tahun 2030 dengan skenario intervensi



- Obesitas merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Prevalensi penderita obesitas pada penduduk dewasa telah meningkat dua kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang, dari 10,5% pada tahun 2007 ke 21,8% di tahun 2018. Prevalensi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara dan DKI Jakarta.
- Angka prevalensi obesitas diperkirakan terus meningkat hingga tahun 2030, namun angka prevalensinya meningkat lebih tinggi jika tidak ada intervensi kebijakan. Tanpa adanya intervensi, hampir setengah dari penduduk Indonesia diperkirakan menderita obesitas di tahun 2030.
- Kasus obesitas di Indonesia diperburuk oleh gaya hidup tidak sehat seperti pola makan tidak seimbang dan kurang berolah-raga, serta konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak.

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.



61.83%

Pada tahun 2030
dengan skenario
BAU*

64.55%

Pada tahun 2030
dengan skenario
intervensi

*Proyeksi Model Gaussian, BKKBN

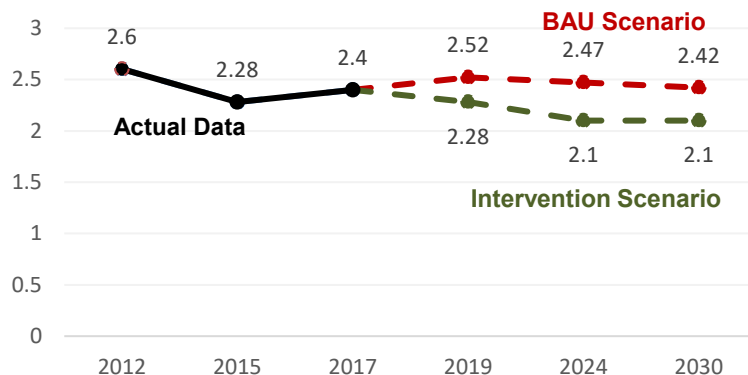
Source: SDKI

- Kebutuhan akan keluarga berencana telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak informasi, edukasi, dan komunikasi tentang keluarga berencana meluas, kesadaran akan kesehatan seksual dan reproduksi pun terus meningkat. Penggunaan kontrasepsi sejatinya berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu. Namun begitu, angka kematian ibu tersebut bisa terus meningkat tanpa kebijakan yang tepat.
- Pada tahun 2017, masih ada 17 provinsi di Indonesia dengan persentase penggunaan alat kontrasepsi di bawah angka persentase nasional (SDKI, 2017). Tantangan dalam meningkatkan angka tersebut terletak pada kesalahan informasi dan konsep mengenai keluarga berencana juga kendala budaya. Pembicaraan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan wanita dianggap taboo.
- Dukungan terus menerus perlu diberikan dari berbagai kalangan agar dapat mengakselerasi agenda pembangunan 2030, khususnya terkait kesehatan dan kesejahteraan.



TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.7.2.(a) Angka Total Fertilitas (TFR)



Sumber: Sensus Penduduk dan SUPAS

Proyeksi model tren

2.42

TFR pada tahun
2030 dengan
skenario BAU*

2.10

TFR pada tahun
2030 dengan
skenario
intervensi

- Proyeksi angka TFR menggunakan baseline SP 2010, dengan TFR sebesar 2,1 dicapai pada tahun 2025 dan di-hold konstan sebesar 2,1 sampai dengan tahun 2035;
- Buku Proyeksi Indonesia 2010-2035 digunakan untuk mengestimasi beberapa indikator dalam penghitungan.

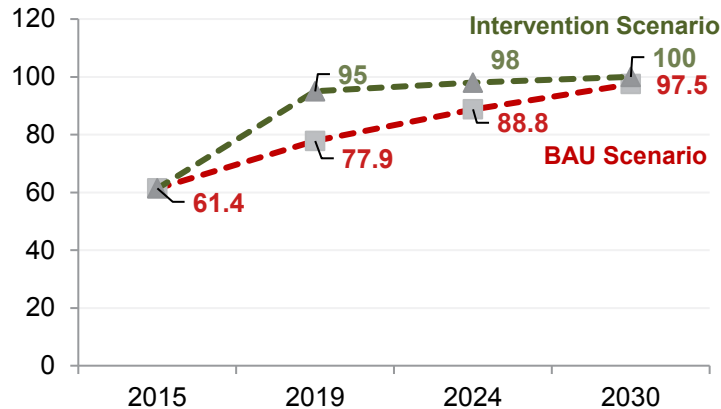
Berbagai program perbaikan nutrisi dan kesehatan

Berkontribusi pada penurunan angka total fertilitas (TFR) di Indonesia

- Angka fertilitas di Indonesia tercatat stagnan selama 10 tahun sejak tahun 2002 hingga 2012, dan angka tersebut menurun ke angka 2.4 pada tahun 2017 (SDKI, 2017). Meski angka tersebut masih tergolong cukup tinggi, proyeksi tren TFR yang menurun memberikan kabar baik.
- Angka fertilitas berhubungan erat dengan penggunaan alat kontrasepsi. Karena itu penurunan angka fertilitas total juga berhubungan dengan kebudayaan dan kepercayaan. Banyak orang enggan menggunakan alat kontrasepsi karena hal tersebut bertentangan dengan kepercayaan mereka.

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



97.5%

Cakupan jaminan kesehatan nasional pada 2030 dengan skenario BAU

100%

Cakupan jaminan kesehatan nasional pada 2030 dengan skenario intervensi

Sumber: BPJS Kesehatan



- Indonesia telah memperkenalkan cakupan kesehatan universal sejak 2014. Keberadaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memperbaiki isu kesenjangan terhadap akses dan fasilitas kesehatan.

- Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait pelayanan kesehatan untuk diselesaikan di Indonesia seperti penduduk yang heterogen dan kompleks, kesenjangan fasilitas kesehatan, kondisi sosial-ekonomi, juga kendala geografis.
- Selain itu, sistem JKN yang ada sekarang masih perlu untuk terus diperbaiki dan diperkuat. Bukan hanya cakupan, tapi juga kualitas pelayanan dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan. Selain dari sisi penyedia jasa pelayanan, tantangan sistem JKN juga terletak pada kemampuan keuangan individu dan jaminan kesehatan bagi pekerja informal.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup			Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup			Angka Kematian Anak per 1.000 kelahiran hidup		
Tahun	Baseline	Intervensi	Tahun	Baseline	Intervensi	Tahun	Baseline	Intervensi
2015	305	305	2015	34.7	34.7	2015	16.5	16.5
2019	276	243	2019	31.6	29.5	2019	14.5	13.5
2024	244	183	2024	28.2	24.0	2024	12.9	10
2030	210	131	2030	24.8	18.8	2030	11.2	7

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi

- Peningkatan pelayanan ibu dan neonatal berkesinambungan baik di fasilitas kesehatan negeri dan swasta.
- Perluasan imunisasi dasar lengkap.
- Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil.
- Peningkatan cakupan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas
- Penguatan fasilitas kesehatan ibu dan anak berbasis komunitas (e.g. *Posyandu*, *Polindes*, *Poskesdes*).
- Perbaikan ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan.

Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

- Pengembangan kawasan dan lingkungan kerja sehat (kota sehat, pasar, sekolah, dan lingkungan kerja).
- Penyediaan transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong aktivitas fisik.
- Penguatan kebijakan kesehatan, dan regulasi peningkatan pajak tembakau dan pelarangan iklan dan promosi rokok, serta pembatasan produk berkadar gula, garam, dan lemak yang tinggi.
- Promosi perilaku hidup sehat yang inovatif.
- Peningkatan akses terhadap pilihan pangan sehat.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah

- Peningkatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh meliputi upaya promosi kesehatan, pencegahan, diagnosa, penanganan penyakit, pengelolaan penyakit, rehabilitasi, dan pelayanan paliatif.
- Peningkatan produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri untuk meningkatkan akses pada produk farmasi dan alkes yang berkualitas.

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	26.9	26.9
2019	22.7	21.7
2024	19.1	16
2030	15.6	12



Insiden TB per 100.000 penduduk			Persentase Merokok pada Remaja		
Tahun	Baseline	Intervensi	Tahun	Baseline	Intervensi
2015	325	325	2015	7.91	7.91
2019	310	297	2019	9.53	9.1
2024	289	190	2024	12.05	8.7
2030	261	65	2030	15.95	7.5



Arah Kebijakan 2020-2024	Strategi	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan</p> <p>Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat kesehatan; peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan; serta penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan.</p>
		<p>Peningkatan pengendalian penyakit</p> <p>Pengendalian faktor risiko penyakit yang berfokus pada perluasan deteksi dini dan <i>real time surveillance</i>, serta penguatan keamanan kesehatan termasuk penguatan <i>alert system</i> kejadian luar biasa dan karantina kesehatan.</p>

Arah Kebijakan 2025-2030	Strategi	<p>Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p> <p>Penyesuaian sistem iuran dan tarif untuk keberlanjutan pendanaan JKN; perluasan kepesertaan terutama sektor informal dan pekerja penerima upah; penerapan <i>active purchasing</i> dan perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, serta penguatan kelembagaan dan sistem monitoring dan evaluasi JKN.</p>
-----------------------------	----------	--

Angka Total Fertilitas (TFR)		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	2.28	2.28
2019	2.52	2.28
2024	2.47	2.10
2030	2.42	2.10

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	61.4	61.4
2019	77.9	Min.95
2024	88.8	98.0
2030	97.5	100



GOAL 3 GOOD HEALTH AND WELLBEING

Jumlah Kabupaten/Kota Bebas Malaria

Year	Baseline	Intervention
2015	225	225
2019	300	300
2024	475	475
2030	514	514

Jumlah kasus infeksi HIV baru per 1.000 penduduk tidak terinfeksi

Year	Baseline	Intervention
2015	0.27	0.27
2019	0.23	0.23
2024	0.20	0.18
2030	0.18	0.14



Kebutuhan Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern

Year	Baseline	Intervention
2015	57.97	59.61
2019	59.70	61.36
2024	60.20	63.41
2030	61.83	64.55

Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa

Year	Baseline	Intervention
2015	17.48	17.48
2019	22.83	21.8
2024	31.86	21.8
2030	47.54	21.8



4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



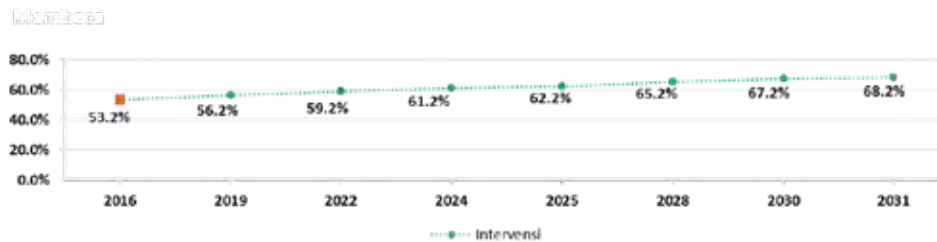
4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.1.1* Proporsi anak-anak pada: (a) kelas 4 (empat) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika

Proporsi Anak-anak Kelas 4 yang Mencapai Standar Kemampuan Minimum dalam Membaca (tren proyeksi)

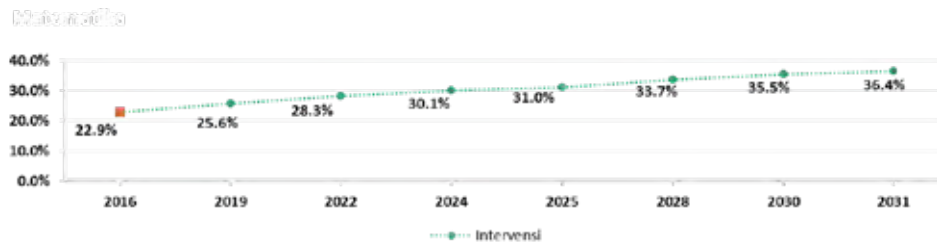


67.2%

Proporsi anak-anak kelas 4 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca pada tahun 2030 dengan skenario intervensi

- Indikator diukur menggunakan hasil tes AKSI. Data hasil tes AKSI hanya tersedia pada tahun 2016 sehingga proyeksi berdasarkan BAU tidak dapat dilakukan.
- Proyeksi indikator berdasarkan skenario intervensi dilakukan berdasarkan *expert judgement* (sumber: *Ideas for Indicators and Targets for Quality Education*, TASS 2018):
 - ✓ Subjek membaca menggunakan asumsi pertumbuhan 4 persen per tahun.
 - ✓ Subjek matematika menggunakan asumsi pertumbuhan 3 persen per tahun.
- Angka pertumbuhan tersebut berdasarkan asumsi bahwa seluruh Kabupaten/Kota melakukan intervensi untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam membaca dan matematika.

Proporsi Anak-anak Kelas 4 yang Mencapai Standar Kemampuan Minimum dalam Matematika (tren proyeksi)



35.5%

Proporsi anak-anak kelas 4 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam matematika pada tahun 2030 dengan skenario intervensi

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.1.1* Proporsi anak-anak pada: (a) kelas 4 (empat) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika

- Pada tes membaca dan matematika di tingkat nasional, secara berurutan, sebanyak 46,83% serta 77,13% anak-anak kelas empat mendapatkan skor yang rendah. Sementara itu, hanya 6,06% dan 2,29% di antaranya meraih skor 'cukup baik'. Dalam kedua tes tersebut, siswa yang berasal dari Kawasan Timur Indonesia cenderung menunjukkan hasil yang lebih rendah daripada siswa sebayanya di Kawasan Barat Indonesia yang mencerminkan adanya ketimpangan antar-wilayah yang cukup tinggi.
- Meski sumber daya pendidikan sudah ditingkatkan dalam satu dekade terakhir, peningkatan hasil pembelajaran masih belum terlihat secara signifikan. Hal ini menandai perlunya peningkatan kualitas belanja anggaran di sektor pendidikan.
- Untuk mendorong potensi pendidikan di Indonesia, dibutuhkan peningkatan pada lingkungan belajar dan mengajar, kurikulum ajaran, serta pengelolaan sekolah. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan teknis kepada guru dan sekolah agar dapat meningkatkan pembelajaran siswa; dan juga memberikan bantuan perencanaan dan penganggaran yang efisien untuk memenuhi standar pendidikan nasional pada level sekolah, kecamatan dan provinsi.

¹Indonesian National Assessment Programme (INAP) test results, Ministry of Education and Culture (2016).

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

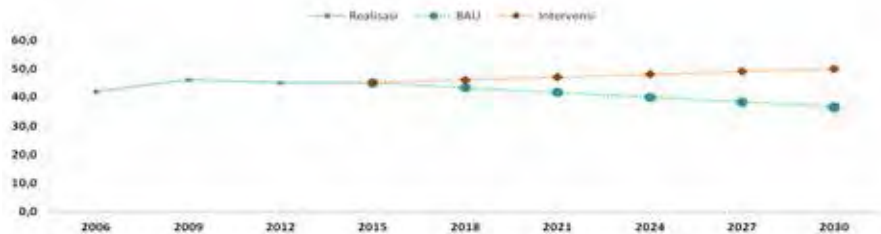


TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.1.1* Proporsi remaja pada: (a) kelas 9 (sembilan) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika

Standar Kemampuan Membaca (tren proyeksi)

Sumber: OECD

**36.7%**

Proporsi anak-anak kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca tahun 2030 dengan skenario BAU

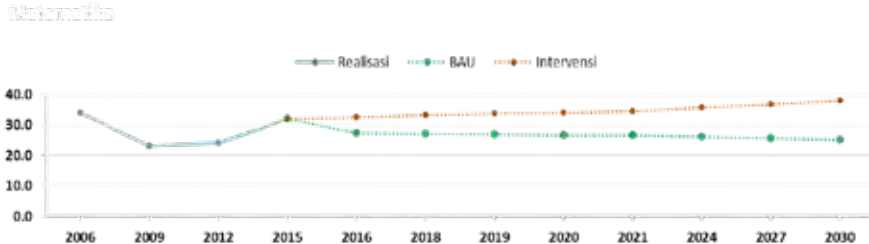
50.0%

Proporsi anak-anak kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca tahun 2030 dengan skenario intervensi

- Indikator diukur menggunakan hasil tes PISA.
- Proyeksi BAU mengikuti trend negara-negara di ASEAN di mana setiap tahunnya mengalami penurunan sebesar 1,67 persen.
- Proyeksi intervensi dihitung dengan mengikuti pergerakan angka di negara-negara yang memiliki karakteristik hampir serupa dengan Indonesia (Brazil, Hong Kong-China, Mexico, Thailand, Vietnam) dimana setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 0,33 persen.

Standar Kemampuan Matematika (tren proyeksi)

Sumber: OECD & Kemendikbud

**25.0%**

Proporsi anak-anak kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam matematika tahun 2030 dengan skenario BAU

38.0%

Proporsi anak-anak kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam matematika tahun 2030 dengan skenario intervensi

- Indikator diukur menggunakan hasil tes PISA.
- Proyeksi BAU menggunakan trend data PISA sebelumnya.
- Proyeksi intervensi dihitung dengan mengikuti pertumbuhan di negara-negara Asia Pasifik, yaitu meningkat sebesar 0,4 persen setiap tahunnya.



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.1.1* Proporsi remaja pada: (a) kelas 9 (sembilan) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika

- Sejak keikutsertaan pertama pada tes Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) di tahun 2000, hasil skor tes membaca dan matematika pelajar Indonesia meningkat secara substansial sebesar 27 poin dan 26 poin— setara dengan sekitar satu tahun ajaran¹. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa hasil tes membaca pelajar Indonesia mengalami penurunan dan stagnasi sejak tahun 2009 di mana skor rata-rata yang diperoleh siswa Indonesia berada di nilai 402, 396, dan 397 masing-masing pada tahun 2009, 2012, dan 2015².
- Terlepas dari peningkatan substansial pada tes membaca dan matematika, **secara rata-rata Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga serta negara OECD lainnya**. Pada tahun 2015, Indonesia **menempati posisi ke-62 dari 72 negara partisipan**, sebuah kemajuan jika dibandingkan tahun 2013 dimana Indonesia menempati posisi ke 71³.
- **Hasil pembelajaran yang tidak sejalan** dengan besar sumber daya yang **diinvestasikan oleh pemerintah** dalam bidang pendidikan menunjukkan perlunya penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selain itu, untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di Indonesia, diperlukan seperangkat regulasi yang ditujukan untuk memperkaya pengetahuan guru akan mata pelajaran serta pendistribusian guru yang kompeten secara merata ke seluruh wilayah.

¹⁻²Indonesia PISA 2015, World Bank (2017).

³PISA 2015 Results, OECD (2016).



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Sederajat (tren proyeksi)



Sumber: BPS

106.24%

APK
SD/MI/Sederajat
pada tahun 2030
dengan skenario
BAU*

106.24%

APK
SD/MI/Sederajat
pada tahun 2030
dengan skenario
intervensi

*menggunakan model logaritmik

APK SD/MI/Sederajat sudah pada tingkatan cukup baik sehingga tidak perlu skenario intervensi percepatan untuk peningkatannya, atau dengan kata lain perhitungan skenario intervensi sama dengan perhitungan intervensi saat ini (BAU).

- Angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan dasar di Indonesia mengalami fluktuasi yang substansial dari tahun ke tahun, serta cenderung mengalami penurunan mulai tahun 1996 hingga 2018¹
- Angka partisipasi kasar di tingkat provinsi juga menunjukkan tidak ada kesenjangan yang signifikan antar-wilayah di Indonesia. Angka partisipasi kasar tertinggi dicapai oleh provinsi Maluku Utara (109,4%) sedangkan provinsi Papua (94,28%) menempati posisi paling rendah.²
- Angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan dasar (SD/MI/Sederajat) telah dinilai baik, sehingga tidak perlu ada intervensi substansial. Namun demikian, **pengawasan tetap dibutuhkan** untuk memastikan angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan dasar **tetap bergerak stabil** untuk tetap mencapai target pada tahun 2030.

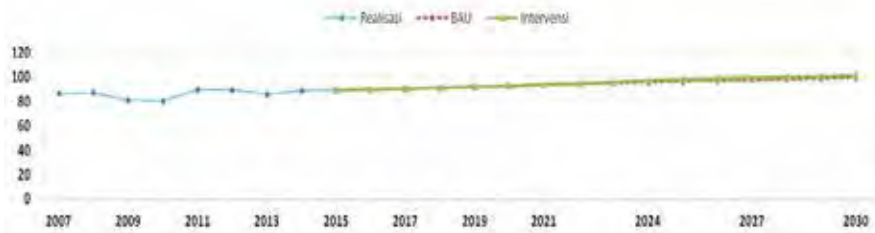
¹Statistik Pendidikan, Bank Dunia (2016) & Kemendikbud (2019).

²APK dan APM SD, SMP, dan SMA; Kemendikbud (2019).

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat (tren proyeksi)



Sumber: BPS

99.48%

APK
SMP/MTs/Sederajat
pada tahun 2030
dengan skenario
BAU*

101.49%

APK
SMP/MTs/Sederajat
pada tahun 2030
dengan skenario
intervensi

* Menggunakan model linier

- Perhitungan nilai proyeksi intervensi menggunakan asumsi semua anak yang tidak sekolah (ATS) dapat kembali ke sekolah.
- Asumsi untuk pencapaian angka ini, bahwa program gerakan kembali bersekolah dilakukan secara sungguh-sungguh.

- Secara nasional, APK tingkat SMP/MTs/Sederajat di Indonesia telah mencapai hampir 100% pada tahun 2018. Namun begitu, meski mayoritas provinsi di Indonesia telah mencapai APK di kisaran 95 - 106%, APK di provinsi Papua hanya mencapai 73,40% saja.¹
- Di Papua khususnya, besar kemungkinan rendahnya angka partisipasi sekolah disebabkan oleh jarak tempuh yang panjang bagi murid untuk pergi ke sekolah. Secara nasional, rata-rata jarak rumah ke Sekolah Menengah Pertama terdekat adalah 7,9 km. Sementara itu, jarak tempuh rata-rata yang dilalui oleh **anak-anak di Papua dari rumah ke SMP terdekat adalah 39,5km.**² Hal ini membuktikan bahwa kesenjangan fasilitas pendidikan dan infrastruktur pendukungnya merupakan salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam mencapai APK yang ditargetkan pada tahun 2030.
- Selain itu, pemerintah daerah juga perlu didorong untuk aktif menjalankan program '**kembali ke sekolah**' dengan mengumpulkan data anak putus sekolah di tingkat kecamatan/desa serta mengalokasikan APBD maupun dana desa untuk mendukung program tersebut.

¹APK dan APM SD, SMP, dan SMA; Kemendikbud (2019).

²PODES, BPS (2014).



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar PAUD (tren proyeksi)



Sumber: BPS

Perhitungan proyeksi BAU yang menggunakan data trend sejak tahun 2017 menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya yaitu sebesar 2 persen. Angka ini dianggap sudah cukup optimis untuk menaikkan APK PAUD.

65.51%

**APK
SMP/MTs/Sederajat
pada tahun 2030
dengan skenario
BAU***

**Menggunakan model linier*

- Tujuan utama dari pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah mempersiapkan pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajaran anak. Pendidikan usia dini penting bagi agenda pembangunan Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk pembangunan di masa depan.
- Angka partisipasi kasar tingkat PAUD di Indonesia menunjukkan hasil yang stabil selama beberapa tahun ke belakang. Partisipasi anak-anak yang berada di pulau Jawa dalam pendidikan pra-sekolah cenderung lebih besar dibandingkan anak-anak yang tinggal di luar pulau Jawa. Di Yogyakarta, capaian APK PAUD-nya adalah sebesar 68,47%, sedangkan provinsi Papua hanya mencapai 12,44%.¹ Selain itu, data BPS menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga berpendapatan menengah ke bawah dan mereka yang tinggal di daerah perdesaan cenderung lebih sedikit mengikuti pendidikan pra-sekolah.
- Dengan hanya sepertiga anak-anak Indonesia yang mengikuti pendidikan pra-sekolah, maka diperlukan perluasan jangkauan PAUD, terutama pada wilayah dengan angka partisipasi terendah. Selain itu, penting untuk meningkatkan kualitas PAUD karena pengalaman anak-anak dengan PAUD yang berkualitas berhubungan dengan tingkat partisipasi sekolah di tingkat selanjutnya.

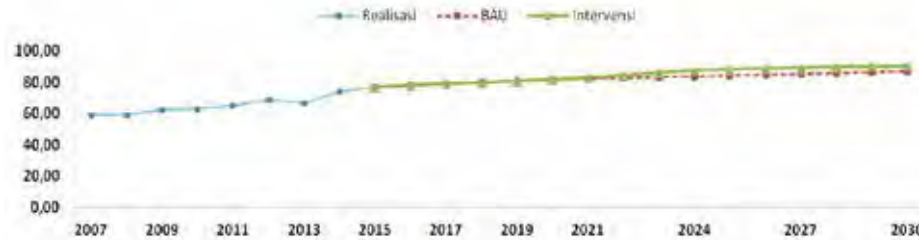
¹APK PAUD per provinsi, BPS



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat (tren proyeksi)



Sumber: BPS

86.88%
APK
SMA/SMK/Sederajat pada tahun 2030 dengan skenario BAU*

90.55%
APK
SMA/SMK/Sederajat pada tahun 2030 dengan skenario intervensi

* Menggunakan model logaritmik

- Intervensi yang dilakukan yaitu menjangkau sebagian anak-anak yang lulus SMP tetapi tidak melanjutkan ke pendidikan menengah, dan sebagian anak yang putus sekolah di pendidikan menengah.
- Asumsi untuk pencapaian angka ini, bahwa program gerakan kembali bersekolah dilakukan secara sungguh-sungguh.



- Di tahun 2017, angka partisipasi kasar Indonesia di tingkat SMA/MA/ Sederajat mencapai 82,84%, meningkat sebesar 18% dari tahun 2011. Serupa dengan kondisi yang terjadi pada tingkat SMP/Mts/Sederajat, kesenjangan antar-wilayah yang tinggi juga masih ditemukan di provinsi Papua dengan APK terendah sebesar 67,94% pada tahun yang sama.¹

¹Statistik Pendidikan: Potret Pendidikan Indonesia, BPS (2016).

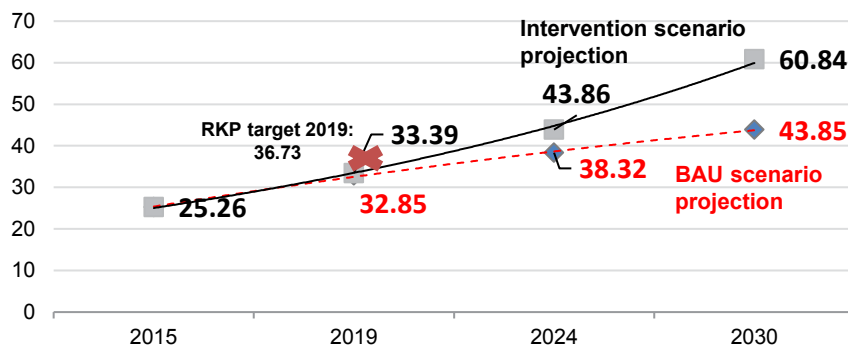
- Selain kesenjangan wilayah timur dan barat, ditemukan pula kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar-kelompok pendapatan.
- Angka partisipasi kasar yang tidak mencapai 100% menandakan adanya anak-anak yang tidak bersekolah, baik karena putus sekolah maupun tidak melanjutkan ke tingkat SMA/MA/Sederajat. Data BPS menunjukkan bahwa hanya 57,22% dari lulusan SMP yang melanjutkan ke tingkat SMA/MA/Sederajat pada tahun 2016, sementara 1 dari 20 murid tidak menyelesaikan pendidikan SMA/MA/Sederajat.¹ Anak laki-laki dan anak yang tinggal di pedesaan cenderung lebih rentan putus sekolah apabila dibandingkan dengan perempuan dan anak-anak sebayanya yang tinggal di daerah perkotaan.



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (tren proyeksi)



43.85%

APK Perguruan Tinggi pada tahun 2030 dengan skenario BAU*

60.84%

APK Perguruan Tinggi pada tahun 2030 dengan skenario intervensi

Sumber: BPS

* Menggunakan model proyeksi linier

- Teori pertumbuhan ekonomi modern menjelaskan peran penting kualitas sumber daya manusia pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Studi terkini menunjukkan bahwa pada negara-negara berpendapatan menengah ke bawah, pendidikan tinggi meningkatkan pendapatan individu, pertumbuhan ekonomi, produktivitas serta transfer teknologi.¹
- APK tingkat pendidikan tinggi mengalami peningkatan dari 11,5% pada tahun 1996 ke 25,26% pada tahun 2015, tumbuh sebesar 4,37% per tahunnya.² Perbedaan yang mencolok juga ditemukan pada beberapa kelompok pendapatan, di mana kuintil kelompok pendapatan tertinggi mengalami peningkatan APK sebesar 59,61%, sementara kelompok pendapatan terendah hanya mengalami kenaikan APK sebesar 5,08%. Angka ini menunjukkan adanya representasi yang tidak proporsional antara murid dari keluarga berpendapatan sangat tinggi dan mereka yang berpendapatan sangat rendah.
- Sistem bantuan finansial yang komprehensif – termasuk di dalamnya beasiswa untuk murid cerdas yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sistem identifikasi murid sekolah menengah berpotensi, serta sistem untuk mengidentifikasi murid yang kurang beruntung pada perguruan tinggi – dapat secara efektif mengurangi disparitas tersebut. Bantuan finansial dalam menghadapi masalah ketimpangan telah dipraktikkan oleh banyak negara berpendapatan menengah seperti Chili, Brazil dan Kolombia.

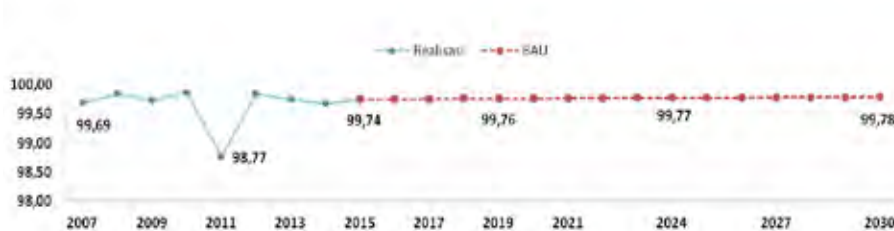
¹Tertiary Education in Indonesia: Direction for Policy, Bank Dunia (2014).

²Statistik Pendidikan, Bank Dunia (2016) & APK PT, BPS (2016).

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat & (2) SMP/MTs/ sederajat

Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di tingkat SD/MI/ sederajat (tren proyeksi)



Data Source: BPS

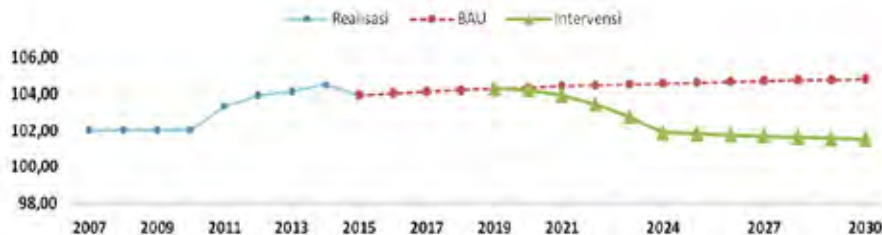
99.78
Rasio APM perempuan/laki-laki tingkat SD/MI/ sederajat tahun 2030 dengan skenario BAU*

99.78
Rasio APM perempuan/laki-laki tingkat SD/MI/ sederajat tahun 2030 dengan skenario intervensi

* Menggunakan model logaritmik

Proyeksi BAU sudah menunjukkan nilai yang baik, yaitu bergerak mendekati 100 persen pada tahun 2030 sehingga intervensi saat ini sudah dianggap berjalan dengan baik.

Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di tingkat SMP/MTs/ sederajat (tren proyeksi)



104.83
Rasio APM perempuan/laki-laki tingkat SMP/MTs/ sederajat tahun 2030 dengan skenario BAU *

101.50
Rasio APM perempuan/laki-laki tingkat SMP/MTs/ sederajat tahun 2030 dengan skenario intervensi

* Menggunakan model logaritmik

- Kecenderungan data trend menunjukkan angka yang terus meningkat, atau tetap terjadi kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki.
- Perhitungan 2020-2024 menggunakan asumsi semua ATS pada butir c kembali bersekolah pada tahun 2024 sehingga terjadi penurunan rasio APM perempuan:laki-laki pada jenjang SMP secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan anak yang putus sekolah sebagian besar laki-laki.
- Perhitungan proyeksi intervensi 2025-2030 menggunakan perhitungan dengan penurunan yang natural.

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat & (4) Perguruan Tinggi

Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat (tren proyeksi)



Sumber: BPS

104.26

Rasio APM perempuan/laki-laki SMA/SMK/MA/ sederajat tahun 2030 dengan skenario BAU*

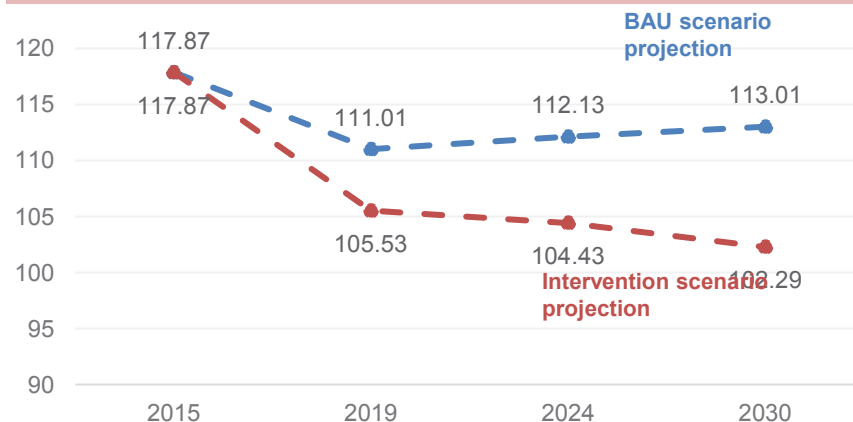
102.31

Rasio APM perempuan/laki-laki SMA/SMK/MA/ sederajat tahun 2030 dengan skenario intervensi

* Menggunakan model logaritmik

- Perhitungan nilai proyeksi intervensi menggunakan asumsi semua anak yang tidak sekolah (ATS) dapat kembali ke sekolah.
- Asumsi untuk pencapaian angka ini, bahwa program gerakan kembali bersekolah dilakukan secara sungguh-sungguh.

Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki tingkat Perguruan Tinggi (tren proyeksi)



113.01

Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi tahun 2030 dengan skenario BAU*

102.29

Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi tahun 2030 dengan skenario intervensi

*Menggunakan proyeksi moving average

Sumber: SUSENAS, BPS



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di tingkat (1) SD/MI/ sederajat, (2) SMP/MTs/ sederajat, (3) SMA/SMK/MA/ sederajat, dan (4) Perguruan Tinggi



- Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di seluruh tingkat pendidikan di Indonesia, kecuali sekolah dasar, menunjukkan partisipasi perempuan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Angka ini dibuktikan melalui data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan jumlah anak laki-laki yang putus sekolah di tingkat SMP dan SMA mencapai 2-3 kali lipat angka putus sekolah pada perempuan.¹
- Meski demikian, pola di tingkat daerah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Di tingkat SMA/ sederajat, provinsi-provinsi berikut menunjukkan kesenjangan rasio APM perempuan terhadap laki-laki yang tinggi yakni: Sumatera Barat (124,15), Nusa Tenggara Barat (86,18) dan Gorontalo (143,63). Disparitas yang nyata juga ditemukan di tingkat perguruan tinggi di mana rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada sepertiga provinsi-provinsi di Indonesia tercatat berada di kisaran 120-160.²
- Untuk mencapai target rasio APM perempuan terhadap laki-laki di angka mendekati 100, penerapan kebijakan yang bersifat *one size fits all* harus dihindari. Pendekatan yang dilakukan harus berorientasi lokal yang diambil dari hasil pengamatan permasalahan putus sekolah pada kedua gender dan kondisi sosial budaya di tiap daerah.

¹Kemendikbud, 2018.

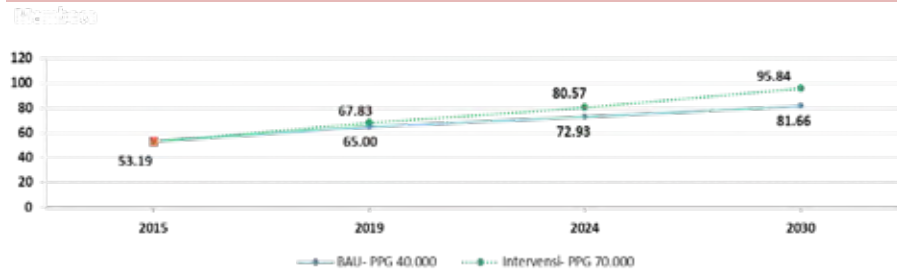
²BPS, 2016.



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.c.1* Persentase guru yang bersertifikat pendidik – (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB)

Persentase guru yang bersertifikat pendidik (tren proyeksi)



Sumber: Proyeksi GTK, Kemendikbud

81.66%
Proporsi guru yang bersertifikat pendidik tahun 2030 dengan skenario BAU

95.84%
Proporsi guru yang bersertifikat pendidik tahun 2030 dengan skenario intervensi

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi BAU dan intervensi di antaranya:

- Sesuai peraturan perundangan, guru sasaran sertifikat adalah guru tetap dan dilakukan melalui program pendidikan profesi guru (PPG).
 - Proyeksi BAU menggunakan asumsi bahwa sertifikasi melalui PPG hanya dibiayai oleh APBN sebanyak target tahun 2017 yaitu sebanyak 40.000 orang.
 - Skenario intervensi menggunakan kapasitas maksimum LPTK dalam melaksanakan program PPG, yaitu sebanyak 70.000 ribu untuk PPG guru dalam jabatan.
 - Skenario intervensi belum memperhitungkan peningkatan kapasitas LPTK sebagai hasil dari revitalisasi LPTK, serta mengasumsikan bahwa guru baru yang diangkat sudah memiliki sertifikasi pendidik.
- Peningkatan akses pendidikan hendaknya disertai dengan peningkatan mutu pembelajaran, di antaranya dengan menggunakan sertifikasi guru sebagai salah satu kriteria. Namun penelitian dari Ree et al. (2017) menyebutkan bahwa sertifikasi guru tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil pembelajaran.
 - Kenaikan upah guru melalui sertifikasi sebagai insentif kinerja dinilai tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas mengajar guru. Karena itu, penyempurnaan program sertifikasi pendidik sangat dibutuhkan untuk mendorong kualitas dan hasil pembelajaran siswa. Menggunakan insentif berbasis kinerja pada program sertifikasi merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan karena hal tersebut dianggap efektif dalam meningkatkan hasil belajar murid di negara lain, misalnya India.

Proporsi anak di (a) kelas 4 yang mencapai standar kemampuan minimum

Tahun	Membaca	Matematika
	Intervensi	Intervensi
2016	53.2	22.9
2019	56.2	25.6
2024	61.2	30.1
2030	67.2	35.5



**Arah Kebijakan
2020-2024**

Strategi

Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun

- Bantuan pendidikan yang memadai bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu
- Pemerataan layanan pendidikan berkualitas antarwilayah
- Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah melalui revitalisasi program retrieval (gerakan kembali bersekolah)

Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar siswa memperoleh keterampilan dasar, kemampuan berpikir kritis, memiliki nilai-nilai dan karakter pribadi untuk lebih produktif

- Penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada matematika, literasi dan sains di semua jenjang, dan penguatan pendidikan karakter, budi pekerti, agama, dan kewargaan.
- Penguatan pelaksanaan assessment hasil belajar siswa melalui penguatan peran guru untuk penilaian pembelajaran di kelas, serta pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran sebagai bagian perbaikan pembelajaran.

**Arah Kebijakan
2025-2030**

Strategi

Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun

- Bantuan pendidikan yang memadai bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu
- Pemerataan layanan pendidikan berkualitas antarwilayah
- Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah melalui revitalisasi program retrieval (gerakan kembali bersekolah)

Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar siswa memperoleh keterampilan dasar, kemampuan berpikir kritis, memiliki nilai-nilai dan karakter pribadi untuk menjadi warga negara yang produktif

- Penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada matematika, literasi dan sains di semua jenjang, dan penguatan pendidikan karakter, budi pekerti, agama, dan kewargaan.
- Penguatan pelaksanaan asesmen hasil belajar siswa melalui penguatan peran guru untuk penilaian pembelajaran di kelas, serta pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran sebagai bagian perbaikan pembelajaran.

Proporsi remaja di: (c) kelas 9 yang memenuhi standar kemampuan minimum

Tahun	Membaca		Matematika	
	Baseline	Intervensi	Baseline	Intervensi
2015	45.0	45.0	32.0	32.0
2019	42.8	46.1	26.8	33.6
2024	40.0	48.0	26.0	35.6
2030	36.7	50.0	25.0	38.0

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

- Pengembangan model pendidikan vokasi yang sesuai dengan pembangunan daerah dan didorong oleh kerjasama dengan dunia usaha/industri
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja
- Peningkatan sertifikasi lulusan vokasi

Meningkatkan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan

- Revitalisasi LPTK
- Penataan mekanisme pengangkatan dan penempatan guru baru
- Pemerataan guru dalam jabatan, antar satuan pendidikan dan antarwilayah
- Penguatan fungsi kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah/ madrasah dalam melakukan penjaminan mutu layanan pendidikan

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

- Pengembangan model pendidikan vokasi yang sesuai dengan pembangunan daerah dan didorong oleh kerjasama dengan dunia usaha/industri
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja
- Peningkatan sertifikasi lulusan vokasi

Meningkatkan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan

- Pemerataan guru dalam jabatan, antar satuan pendidikan dan antarwilayah
- Penguatan fungsi kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah/ madrasah dalam melakukan penjaminan mutu layanan pendidikan

APK PAUD		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	34.50	34.50
2019	42.77	42.77
2024	53.10	53.10
2030	65.51	65.51

APK SD/MI/ sederajat		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	107.84	107.84
2019	107.24	107.24
2024	106.71	106.71
2030	106.24	106.24



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini

- Meningkatkan komitmen Pemda dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini
- Penguatan kualitas kelembagaan PAUD

Meningkatkan kesetaraan kualitas layanan pendidikan

- Penguatan pendidikan kesetaraan dan dengan memperhatikan target kelompok usia yang menjadi prioritas sasaran dan paling bermasalah
- Penguatan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas berbasis pada keunggulan potensi daerah

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini

- Meningkatkan komitmen Pemda dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini
- Penguatan kualitas kelembagaan PAUD

Meningkatkan kesetaraan kualitas layanan pendidikan

- Penguatan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas berbasis pada keunggulan potensi daerah

Meningkatkan pemenuhan Anggaran Pendidikan

Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk seoptimal mungkin digunakan dalam peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing layanan pendidikan.

APK SMP/MTs/ sederajat		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	89.35	89.35
2019	92.05	92.05
2024	95.43	97.44
2030	99.48	101.49

APK SMA/SMK/MA/ sederajat		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	77.13	77.13
2019	80.78	80.78
2024	84.02	87.69
2030	86.88	90.55



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas

- Bantuan pendidikan (Bidik Misi, Adik, PPA)
- Penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas
- Pemerataan kualitas PT antardaerah melalui percepatan akreditasi prodi PT di luar Jawa
- Peningkatan dosen yang berkualitas antara lain melalui beasiswa S2/S3
- Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan

Penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi

- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi sesuai standar industri dan dunia usaha
- Pengendalian izin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan prodi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja
- Penguatan kewirausahaan di pendidikan tinggi vokasi

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Penguatan Otonomi Perguruan Tinggi

- Skema pendanaan inovatif untuk perguruan tinggi melalui pemanfaatan *public-private-partnership*
- Meningkatkan fokus dan kualitas penelitian melalui penyederhanaan dan penguatan ekosistem pendidikan, penelitian dan pengembangan

Pengembangan prodi inovatif yang sesuai kebutuhan pembangunan dan industri

- Kemitraan PT dan industri untuk penyesuaian kurikulum, pengembangan prodi, kegiatan riset dan pengembangan;
- Fleksibilitas dalam membuka dan menutup prodi untuk merespon dinamika pasar kerja

Pengembangan perguruan tinggi sebagai pusat unggulan dan pengembangan IPTEK

- Kerja sama dan detasering antar-perguruan tinggi yang setingkat dan berbeda
- Klusterisasi perguruan tinggi dalam rangka *mission differentiation*



APK Perguruan Tinggi

Year	Baseline	Intervention
2015	25.26	25.26
2019	32.85	33.39
2024	38.32	43.86
2030	43.85	60.84



Rasio APM perempuan/laki-laki tingkat SD/ sederajat

Tahun	Baseline	Inervensi
2015	99.74	99.74
2019	99.76	99.76
2024	99.77	99.77
2030	99.78	99.78

Rasio APM perempuan/laki-laki tingkat SMP/ sederajat

Tahun	Baseline	Inervensi
2015	103.91	103.91
2019	104.27	104.27
2024	104.57	101.86
2030	104.83	101.50

Rasio APM perempuan/laki-laki tingkat SMA/ sederajat

Tahun	Baseline	Inervensi
2015	102.25	102.25
2019	103.06	103.06
2024	103.72	102.49
2030	104.26	102.31

Rasio APM perempuan/laki-laki tingkat perguruan tinggi

Tahun	Baseline	Inervensi
2015	117.87	117.87
2019	111.01	105.53
2024	112.13	104.43
2030	113.01	102.29

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi

- Penguatan kelembagaan sertifikasi kompetensi, dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di sektor pendidikan dengan di sektor ketenagakerjaan

Persentase guru yang bersertifikat pendidik

Tahun	Baseline	Inervensi
2015	53.19	53.19
2019	65.00	67.83
2024	72.93	80.57
2030	81.66	95.84

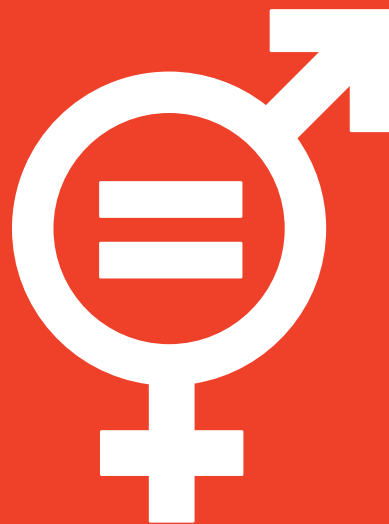
Pengembangan program studi inovatif yang sesuai kebutuhan pembangunan dan industri

- Kemitraan PT dan industri untuk penyalarsan kurikulum, pengembangan prodi, kegiatan riset dan pengembangan;
- Fleksibilitas dalam membuka dan menutup prodi untuk merespon dinamika pasar kerja





5 KESETARAAN GENDER



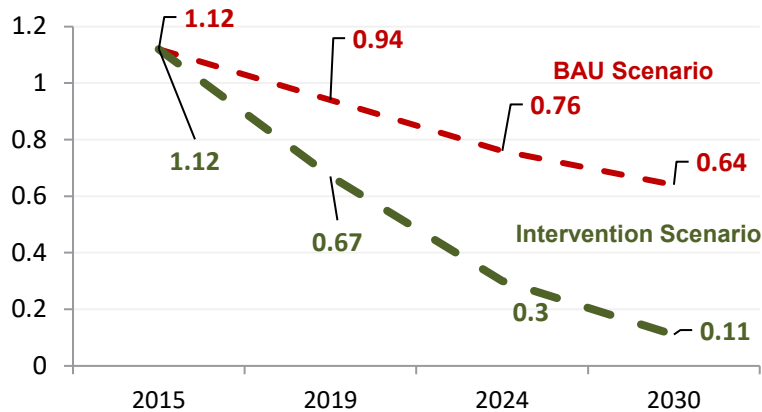
5 KESETARAAN GENDER



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

5.3.1.* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun & 18 tahun

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun



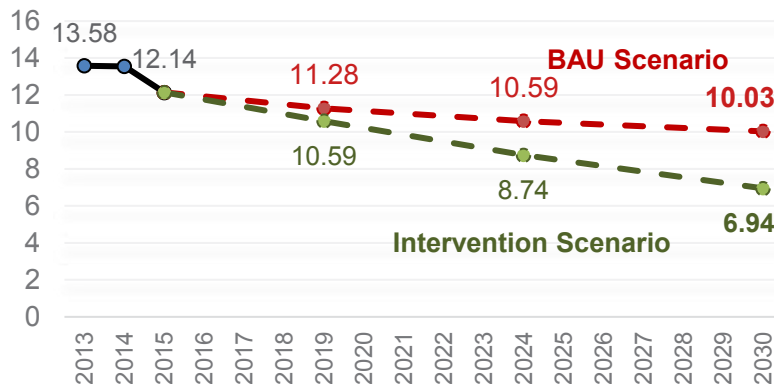
0.64%

Proporsi perempuan pernah kawin sebelum 15 th tahun 2030 dengan skenario BAU

0.11%

Proporsi perempuan pernah kawin sebelum 15 th tahun 2030 dengan skenario intervensi

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun



10.03%

Proporsi perempuan pernah kawin sebelum 18 th tahun 2030 dengan skenario BAU

6.94%

Proporsi perempuan pernah kawin sebelum 18 th tahun 2030 dengan skenario intervensi

Sumber: SUSENAS, BPS



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

5.3.1.* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun & 18 tahun

- Pernikahan anak termasuk ke dalam kekerasan hak asasi manusia, khususnya perempuan. Pernikahan anak membatasi pendidikan, kesehatan, dan potensi pendapatan dan keamanan dari anak perempuan. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan karena banyak efek buruk akibat pernikahan anak seperti kerugian secara ekonomi hingga menurunnya kondisi kesehatan (Otoo-Ooyortey&Pobi, 2003; World Vision, 2013).
- Dari perspektif kesehatan, pernikahan dini berbahaya bagi anak-anak perempuan karena anak-anak masih dalam fase tumbuh kembang, sehingga baik secara fisik maupun mental, mereka tidak siap. Selain itu, anak-anak yang menikah di bawah usia 15 tahun sulit untuk menamatkan pendidikan dan mengembangkan potensinya. Anak-anak yang menikah di bawah umur yang cukup lebih mudah terpapar kekerasan, perceraian, kematian saat melahirkan, dan melahirkan anak-anak yang kurang berkualitas.
- Pernikahan anak di Indonesia sangat erat terkait dengan kepercayaan dan tradisi karena pernikahan dilihat sebagai sarana menghindarkan anak dari seks bebas (BKKBN, 2012). Komitmen dari pihak-pihak yang terlibat seperti keluarga dan pesohor agama/kepercayaan, perlu dilibatkan untuk mengakhiri pernikahan anak.



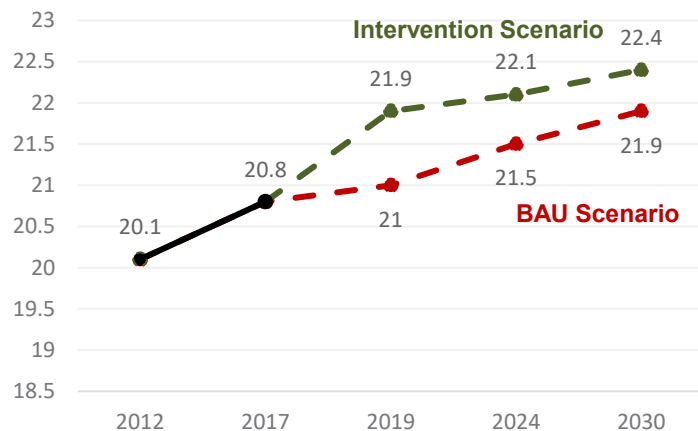
- Tingginya angka pernikahan anak juga sedikitnya dipengaruhi oleh UU Pernikahan tahun 1974 yang menyatakan bahwa laki-laki sudah legal untuk menikah di usia 19 tahun, dan perempuan di usia 16 tahun. Untuk mengatasi ini, saat ini DPR dalam proses untuk menaikkan batas usia minimum anak perempuan untuk menikah ke usia 19 tahun.
- Menurunkan angka pernikahan anak tidak bisa lagi hanya bergantung pada skenario BAU. Perlu ada intervensi kebijakan yang multi-disipliner seperti peningkatan akses ke pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Jika itu dilakukan, angka pernikahan dini dapat ditekan ke angka 6,9% pada tahun 2030, lebih rendah dari skenario BAU (10%).
- Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki prevalensi pernikahan anak yang tinggi (UNICEF, 2014). BPS juga mencatat bahwa pernikahan dini pada tahun 2017 adalah sebesar 11,5%, meningkat dari 11.1% tahun 2016. Meski demikian, pada tahun 2018 angkanya turun kembali ke angka 11.2%. Sejumlah 20 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki proporsi perempuan di bawah usia 18 tahun yang pernah menikah lebih tinggi dari angka nasional, khususnya di perdesaan.

5 KESETARAAN GENDER



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun



Data Source: SDKI

21.9

tahun

Median usia perkawinan pertama perempuan tahun 2030 dengan skenario BAU

22.4

tahun

Median usia perkawinan pertama perempuan tahun 2030 dengan skenario intervensi

- Salah satu indikator lain untuk memonitor fenomena pernikahan anak dapat dilihat dari median usia perkawinan pertama perempuan. Di Indonesia, median usia perkawinan pertama adalah usia 20 tahun. Usia 20 tahun sebenarnya masih cukup muda untuk menikah. Organisasi internasional merekomendasikan usia perkawinan adalah 21 tahun. Ketika perempuan menikah terlalu muda, mereka rentan kehilangan kesempatan untuk mengejar pendidikan tinggi.
- Meski begitu, angka indikator ini menunjukkan tren yang menjanjikan. Pada tahun 2030, diproyeksikan median usia perkawinan adalah 21.9 tahun. Namun angka proyeksi ini bisa dinaikkan lebih tinggi ke angka 22.4 tahun jika semua pemangku-kepentingan ikut serta berkomitmen mengakhiri pernikahan dini.

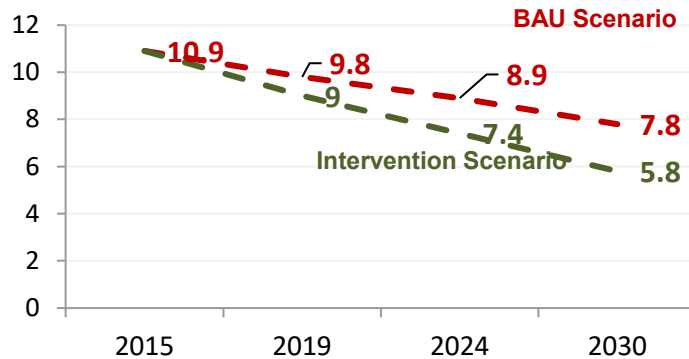
Median usia kawin pertama perempuan 25-49 tahun

Tahun	Baseline	Intervensi
2017	20.8	20.8
2019	21	21.9
2024	21.5	22.1
2030	21.9	22.4



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

5.6.1.(a) Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi



Sumber: SDKI

7.8%

Kebutuhan KB tidak terpenuhi tahun 2030 dengan skenario BAU

5.8%

Kebutuhan KB tidak terpenuhi tahun 2030 dengan skenario intervensi

- Menurunkan angka KB yang tidak terpenuhi merupakan bagian dari aksi bersama yang disebut “Keluarga Berencana” 2020 untuk mendukung perempuan dan anak perempuan mendapatkan hak dan kemandiriannya. Penggunaan metode kontrasepsi telah berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu dan praktik aborsi yang tidak aman. Hal tersebut telah menyelamatkan jutaan hidup perempuan.
- Mengatur dan mengendalikan angka fertilitas juga dapat memperkuat kesejahteraan ekonomi bagi setiap rumah tangga yang juga berarti menurunkan tingkat kemiskinan di jangka panjang (PBB, 2015). Meski banyak paket kebijakan yang sudah berhasil dalam mengendalikan angka fertilitas, masih ada ruang untuk diperbaiki.
- Angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di Indonesia menunjukkan tren yang menurun, diproyeksikan akan turun ke angka 7.8% saja pada tahun 2030 dengan skenario BAU. Angka ini dapat ditekan lebih jauh lagi ke angka 5.8% dengan intervensi kebijakan.

Kebutuhan KB tidak terpenuhi

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	10.9	10.9
2019	9.8	9.0
2024	8.9	7.4
2030	7.8	5.8



Proporsi perempuan usia 20-24 tahun pernah kawin sebelum 15 tahun

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	1.12	1.12
2019	0.94	0.67
2024	0.76	0.3
2030	0.64	0.11


Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merata

- Mengembangkan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan sesuai karakteristik wilayah dan sasaran serta berdasarkan siklus hidup;
- Memperkuat komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling tentang KB dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
- Memperluas akses pelayanan KB di era JKN melalui penguatan kapasitas fasilitas kesehatan, jaminan kualitas pelayanan dan pembiayaan, dan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi;
- Meningkatkan KIE, akses layanan kesehatan reproduksi dan life skills pada remaja yang responsif gender, ramah remaja, berbasis keluarga, dimulai dari praremaja dan terkoordinasi secara multisector; dan
- Memperkuat lingkungan strategis yang mendukung mencakup data dan informasi kependudukan, KB dan keluarga, regulasi, kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia, dan kerja sama lintas sektor.

Penguatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merata

- Memperkuat pelaksanaan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan sesuai karakteristik wilayah dan sasaran serta berdasarkan siklus hidup;
- Memastikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling tentang KB dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, berkualitas dan berkelanjutan;
- Memperkuat akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dalam skema JKN;
- Memperkuat KIE, akses layanan kesehatan reproduksi dan life skills pada remaja yang responsif gender, ramah remaja, berbasis keluarga, dimulai dari praremaja dan terkoordinasi secara multisector; dan
- Memastikan bekerjanya lingkungan strategis yang mendukung mencakup data dan informasi kependudukan, KB dan keluarga, regulasi, kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia, dan kerja sama lintas sektor

**Arah Kebijakan
2020-2024**
Strategi
**Arah Kebijakan
2025-2030**
Strategi

Proporsi perempuan usia 20-24 tahun pernah kawin sebelum 18 tahun

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	12.14	12.14
2019	11.28	10.59
2024	10.59	8.74
2030	10.03	6.94



Penguatan Pencegahan Pernikahan Anak

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

- Penguatan kerangka regulasi dan hukum
- Promosi anak sebagai agen perubahan untuk mencegah pernikahan anak
- Peningkatan akses dan kualitas kesejahteraan, termasuk wajib belajar 12 tahun
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi anak-anak, orang tua, keluarga, komunitas masyarakat, dan pemerintah
- Peningkatan koordinasi dan sinergi antar-daerah, antar-pemangku kepentingan, lintas kementerian, sector swasta, media, dan LSM.
- Pengembangan sistem informasi data yang terintegrasi, lengkap, dan berkelanjutan.

Mengakhiri Pernikahan Anak

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

- Memastikan kerangka regulasi dan hukum untuk mengakhiri pernikahan anak
- Memastikan akses dan kualitas kesejahteraan, termasuk wajib belajar 12 tahun
- Penguatan kolaborasi antara anak, orang tua, keluarga, komunitas, dan pemerintah
- Penguatan koordinasi dan sinergi antar-daerah, antar-pemangku kepentingan, lintas kementerian, sector swasta, media, dan LSM.
- Penguatan system informasi data yang terintegrasi, lengkap, dan berkelanjutan



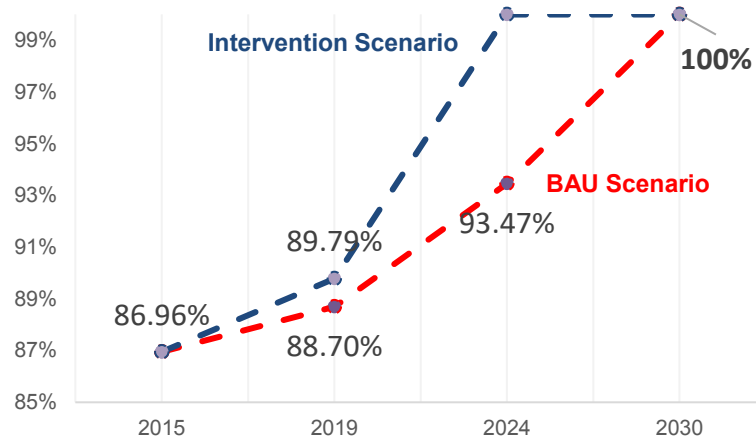
6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK





TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak



Akses menyeluruh terhadap sumber air minum layak bagi semua tahun 2030

Sumber: Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Bappenas

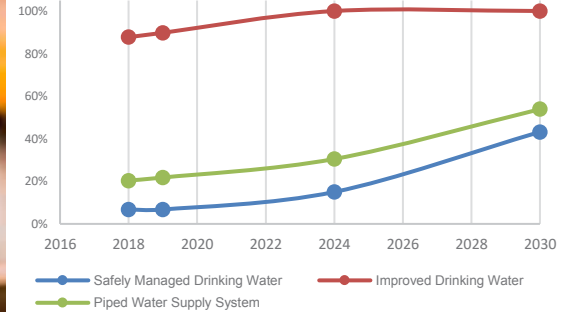
- Akses terhadap air minum dan pelayanan dasar merupakan prioritas nasional dan hal itu sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia. BAB sembarangan dan air limbah yang tidak diolah mengkontaminasi persediaan air dan menjadi sumber penyebaran penyakit diare juga kolera. Satu dari empat anak balita di Indonesia mengalami diare, yang merupakan penyebab utama kematian balita (UNICEF, 2018). Pada tahun 2018, 30,8% anak balita juga mengalami stunting (Risikesdas, 2018). Intervensi yang kuat, seperti penyediaan air minum, dapat berkontribusi sebesar 70% terhadap pencegahan stunting.
- Akses terhadap layanan sumber air minum layak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2018, sebesar 87,75% penduduk memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak termasuk yang bersumber dari perpipaan (20,14%) dan non-perpipaan (67,61%). Namun cakupan dari cadangan air yang dikelola secara aman masih rendah. Sebuah studi menyatakan bahwa akses terhadap sumber air minum yang aman hanya sebesar 8,5% (Hasil Survei Kualitas Air DIY, 2015). Berdasarkan data proxy dari studi tersebut, angka nasional hanya sebesar 6,8%.
- Meskipun angka proyeksi pada tahun 2030 menyatakan bahwa akses terhadap sumber air minum layak sudah universal, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum aman dan sistem persediaan air perpipaan. Akses terhadap air minum aman ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2024 dan 43,15% pada tahun 2030. Sementara itu, akses terhadap sistem persediaan air perpipaan ditargetkan mencapai 30,54% pada tahun 2024, dan 53,94% pada tahun 2030.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	86.96	86.96
2019	89.71	89.79
2024	99.54	100
2030	100	100



Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, aman, dan sistem sumber air perpipaan



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Pencapaian Akses Air Minum Layak 100% dan Akses Air Minum Aman 15%

- Peningkatan keamanan sumber air minum secara kualitas dan kuantitas.
- Peningkatan cakupan sistem persediaan air perpipaan dan non-perpipaan.
- Peningkatan kapasitas operator dalam menyediakan sumber air minum aman.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan institusi
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi komunitas

Dukungan Pembiayaan Pembangunan Air Layak Sekitar 22 Juta SR Hingga Tahun 2024

- Penegakkan regulasi tarif FCR untuk swasembada dan pertumbuhan PDAM
- Optimisasi strategi pembiayaan dan inovasi pembiayaan, juga potensi PPP.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Pencapaian Akses Air Minum Layak 100% dan Akses Air Minum Aman 43,15%

- Penurunan layanan air bukan penerimaan dan kapasitas tunggu dari sistem penyediaan air.
- Percepatan pembangunan infrastruktur untuk sistem sumber air minum aman perpipaan.
- Pelaksanaan rencana pengamanan air untuk meningkatkan akses terhadap air minum aman melalui keran.

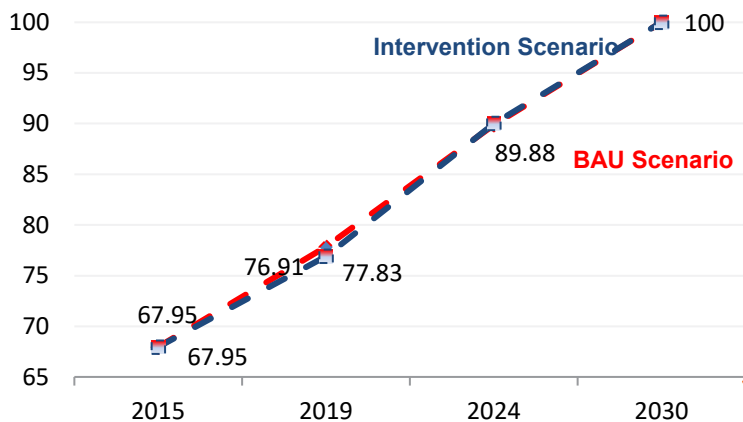
Dukungan Pembiayaan Pembangunan Air Layak Sekitar 35.52 Juta SR Tahun 2030

- Optimisasi strategi pembiayaan dan inovasi pembiayaan, juga potensi PPP.



TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak



Sumber: SUSENAS, BPS
Proyeksi: Bappenas (berdasarkan tangga sanitasi SDGs)

100%



Akses menyeluruh terhadap sanitasi layak bagi semua dapat tercapai tahun 2030

Proyeksi (baseline) menunjukkan bahwa target sanitasi tahun 2024 (90% RT) dan target tahun 2030 (100% RT) akan terpenuhi

- Senada dengan akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak berkaitan erat dengan kesehatan dan lingkungan. Khususnya, kurangnya akses terhadap sanitasi layak akan menurunkan kualitas air dan berpengaruh terhadap meningkatkan prevalensi stunting pada anak-anak dengan koefisien korelasi sebesar 0,66 (Riskesdas, 2013).
- Selain akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap sanitasi yang aman juga merupakan bagian dari agenda 2030. Pada tahun 2018, hanya sebesar 7,42% rumah tangga di Indonesia memiliki akses ke sanitasi yang aman. Pada tahun 2030, pemerintah menargetkan angka tersebut naik ke 53,71% yang tentu dapat dicapai dengan pengelolaan lumpur tinja untuk sanitasi *on-site*, dan sistem pembuangan untuk sanitasi *off-site*.
- Indonesia juga masih menghadapi tantangan mengenai perilaku masyarakat akan praktik sanitasi. Masih ada 9,36% rumah tangga yang mempraktikkan BAB sembarangan baik di perkotaan maupun perdesaan (Bappenas, 2018). Pemerintah bertujuan agar Indonesia bebas dari perilaku BAB sembarangan pada tahun 2024.
- Kepemimpinan yang lebih kuat, komitmen, pengaturan regulasi dan kelembagaan yang baik, serta kapasitas teknis baik di level nasional dan regional, diperlukan untuk mempercepat penyediaan akses sanitasi yang layak bagi semua.

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	67.95	67.95
2019	77.83	76.91
2024	89.88	90
2030	100	100



Layanan Sanitasi yang Berkelanjutan

Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hingga 90% (termasuk 20% sanitasi aman) dan menurunkan BAB sembarangan hingga 0%:

- Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah (termasuk pengelolaan lumpur tinja dan sistem pembuangan), pengetahuan dan kemampuan teknis, dan kerja sama dengan multi-pihak (swasta dan akademisi)
- Penguatan fungsi pengaturan dan pelaksanaan pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah.
- Pembuatan regulasi pengelolaan air limbah dan memastikan implementasinya di daerah termasuk alokasi pendanaan untuk sanitasi, pembayaran wajib untuk layanan sanitasi, mekanisme insentif, hukuman, subsidi, dan kewajiban bagi rumah tangga untuk memiliki akses terhadap sanitasi aman.
- Penguatan implementasi program perubahan perilaku untuk menghentikan praktik BAB sembarangan, termasuk mekanisme pemantauan secara berkala dan asistensi berkualitas bagi komunitas, desa, dan pemerintah daerah.
- Pengembangan mekanisme pembiayaan berkualitas, termasuk pembiayaan inovatif, subsidi pintar, dan belanja berkualitas untuk pembangunan sanitasi.

Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman

Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hingga 100% (termasuk 53,71% sanitasi aman):

- Penguatan layanan sanitasi berkelanjutan.
- Percepatan peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman.
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sistem sanitasi dan implementasi program sanitasi.
- Pelaksanaan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mengembangkan program sanitasi.
- Peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk pengembangan sanitasi layak.

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi



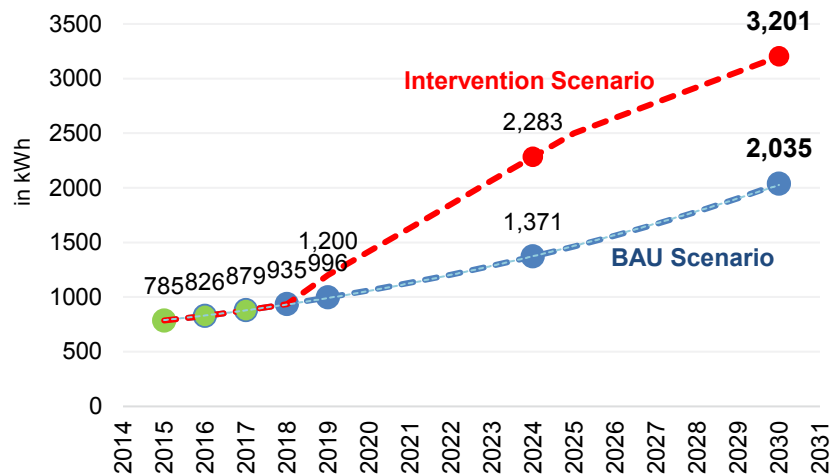
7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU





TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

7.1.1.(a) Konsumsi Listrik per Kapita



2.035
kWh

Konsumsi listrik per kapita pada tahun 2030 dengan skenario BAU

3.201
kWh

Konsumsi listrik per kapita pada tahun 2030 dengan skenario intervensi

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



• Konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator pembangunan karena konsumsi listrik menunjukkan aktivitas ekonomi suatu negara. Konsumsi listrik per kapita Indonesia mengalami kenaikan yang stabil dalam beberapa tahun dan diiringi dengan peningkatan rasio elektrifikasi.

- Peningkatan konsumsi listrik per kapita harus disertai dengan perbaikan akses terhadap tenaga listrik di masa depan. Mayoritas daerah yang belum teraliri listrik berlokasi di daerah terpencil yang di luar jangkauan PLN. Sedangkan daerah terpencil tersebut perlu meningkatkan aktivitas ekonominya sehingga permintaan listrik pun terus bertambah.
- Dari sisi pasokan, fokus kebijakan harus seputar pemerataan akses terhadap listrik. Ketimpangan akses listrik di daerah masih merupakan tantangan pembangunan seperti Nusa Tenggara Timur yang akses terhadap listriknya hanya 61,9% sementara elektrifikasi di banyak provinsi sudah di atas 85%¹.

¹Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018.

Konsumsi Listrik per Kapita

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	785 kWh/kapita	785 kWh/kapita
2019	996 kWh/kapita	1,200 kWh/kapita
2024	1,371 kWh/kapita	2,283 kWh/kapita
2030	2,035 kWh/kapita	3,201 kWh/kapita



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Memperluas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan

- Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna meningkatkan kapasitas daya listrik nasional, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan pasokan listrik disertai dengan percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi wilayah;
- Penyediaan energi listrik semakin luas dan merata ke seluruh wilayah tanah air, termasuk untuk daerah-daerah perbatasan, terpencil, dan kepulauan;
- Peningkatan peran swasta dalam penyediaan listrik;
- Penyesuaian tarif menuju nilai keekonomian yang diikuti oleh peningkatan kondisi keuangan dan kemampuan investasi BUMN bidang ketenagalistrikan.

Meningkatkan kualitas BUMN di bidang ketenagalistrikan

- Pembinaan BUMN dalam rangka regionalisasi usaha, penguatan manajemen usaha maupun permodalan yang sehat dan penerapan kaidah standar internasional.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan

- Penguatan kapasitas daya listrik nasional, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan pasokan listrik, dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- Pemanfaatan energi listrik yang luas dan merata ke seluruh tanah air, termasuk untuk daerah perbatasan, terpencil, dan kepulauan, untuk mendorong ekonomi produktif (tidak hanya penerangan);
- Penguatan peran swasta dalam penyediaan listrik;
- Penyesuaian tarif listrik sesuai keekonomian secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai melalui pemberian subsidi listrik tepat sasaran;
- Peningkatan kehandalan pasokan listrik.



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Mendorong pemanfaatan listrik untuk memenuhi kebutuhan energi final sektor transportasi, rumah tangga, dan industri

- Pengembangan kendaraan bertenaga listrik atau hybrid;
- Pengembangan angkutan kereta api cepat terpadu (Mass Rapid Transit/MRT), kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT), dan trem;
- Pengembangan manajemen transportasi cerdas (Intelligent Transport System/ITS);
- Pemanfaatan listrik untuk peralatan-peralatan rumah tangga
- Pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan pariwisata
- Perluasan pemanfaatan listrik untuk kesehatan dan pendidikan.

Meningkatkan kualitas pasokan listrik

- Peningkatan kehandalan (penurunan durasi dan frekuensi pemadaman) sistem ketenagalistrikan nasional, baik pembangkitan, jaringan, dan distribusi tenaga listrik.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Meningkatkan pemanfaatan listrik untuk memenuhi kebutuhan energi final sektor transportasi, rumah tangga, dan industri (industri skala kecil, menengah, dan besar)

- Penguatan pengembangan kendaraan bertenaga listrik atau hybrid;
- Penguatan pengembangan angkutan kereta api cepat terpadu (Mass Rapid Transit/MRT), kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT), dan trem;
- Perluasan produksi dan pemanfaatan listrik untuk peralatan-peralatan rumah tangga dan industri;
- Pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan pariwisata;
- Perluasan pemanfaatan listrik untuk kesehatan dan pendidikan

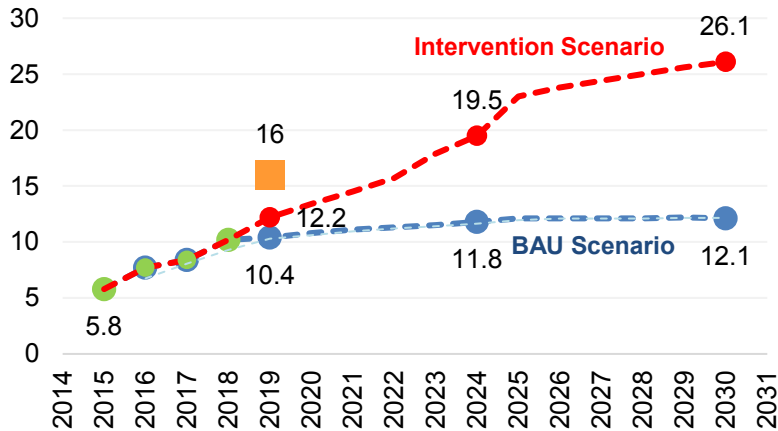
Meningkatkan kualitas pasokan listrik

- Peningkatan kehandalan (penurunan durasi dan frekuensi pemadaman) sistem ketenagalistrikan nasional, baik pembangkitan, jaringan, dan distribusi tenaga listrik.



TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

7.2.1* Bauran Energi Terbarukan



12.1%

Bauran energi
terbarukan tahun
2030 dengan
skenario BAU

26.1%

Bauran energi
terbarukan tahun
2030 dengan
skenario intervensi

Target dalam rancangan RPJMN 2020-2024 adalah 20%

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- Bauran energi primer di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil dan batu bara yang berkontribusi sebesar 38% dan 30% dari total energi primer tahun 2016¹. Penggunaan energi terbarukan terus meningkat namun belum mencapai potensi penuhnya dan tertinggal dibandingkan sumber energi tradisional lain seperti batu bara dan fosil.
- Saat ini, pasokan utama dari energi terbarukan di Indonesia datang dari tenaga air, lalu biomas, panas bumi, dan biodiesel. Sumber energi ini belum dikembangkan secara optimal karena menghadapi banyak kendala seperti biaya investasi awal yang tinggi, lokasi geografis, dan rendahnya efisiensi.
- Dengan kecepatan pengembangan energi terbarukan seperti sekarang, target bauran EBT hingga 23% tahun 2025 akan sulit dicapai. Sebuah kajian dari BPPT (2018) memperkirakan proporsi EBT dari total energi primer hanya mencapai 12,9% tahun 2025 dan 14,9% tahun 2050.
- Kebijakan yang lebih ambisius dan program EBT yang komprehensif yang melibatkan banyak pihak perlu diimplementasikan untuk mempercepat pencapaian bauran energi terbarukan di Indonesia.

¹Indonesia Energy Outlook 2018, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT (2018).

Bauran Energi Terbarukan

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	5.8%	5.8%
2019	10.4%	12.2%
2024	11.8%	19.5%*
2030	12.1%	26.1%

*Target RPJMN adalah 20%

**Meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik**

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

- Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau perluasan jaringan (grid);
- Menganggarkan pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan terlistriki dalam jangka panjang;
- Pembentukan badan usaha EBT tersendiri yang ditugasi Pemerintah untuk mengembangkan, memanfaatkan dan/atau membeli EBT;
- Peningkatan peran serta swasta;
- Penerapan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan;
- Pembenahan regulasi untuk memaksimalkan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan EBT.
- Penyusunan rencana pembangunan energi baru dan terbarukan yang implementatif.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Memperkuat pemanfaatan aneka energi baru terbarukan

- Penguatan pengembangan smart grid system;
- Penguatan skema penganggaran untuk pembangunan infrastruktur EBT;
- Pembangunan industri dalam negeri untuk mendukung pembangunan PLT EBT.

Mengembangkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

- Penguatan kapasitas nasional di bidang keselamatan penggunaan tenaga nuklir;
- Penyusunan pra-studi kelayakan (kajian akademik) untuk memutuskan perencanaan pembangunan PLTN;
- Penyiapan pembangunan PLTN.



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Mengkaji pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

- Penelitian pengembangan teknologi PLTN disertai aspek aspek keekonomian dan keselamatan;
- Penyusunan peta jalan (roadmap) implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional;
- Penyiapan kebutuhan regulasi dan institusi implementasi PLTN
- Penyiapan penguasaan teknologi PLTN.

Mempercepat pemanfaatan panas bumi

- Penyiapan lapangan panas bumi sebagai WKP baru panas bumi;
- Penyempurnaan mekanisme tender pengadaan pengembang dalam perusahaan panas bumi dan percepatan pelaksanaan tender WKP baru;
- Pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk mengurangi risiko eksplorasi panas bumi.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Meningkatkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan

- Penguatan peran badan usaha EBT;
- Peningkatan promosi investasi sektor EBT;
- Penyempurnaan skema-skema pembiayaan;
- Penyempurnaan skema harga listrik dari pembangkit EBT.

Mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk pengembangan energi baru dan terbarukan

- Pengembangan teknologi dan inovasi peralatan/permesinan/ sarana transportasi untuk pemanfaatan biofuel;
- Pengembangan teknologi dan inovasi pemanfaatan energi baru.



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

- Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi, industri, dan pembangkit;
- Penyediaan lahan khusus untuk kebun energi;
- Pengembangan komoditas yang potensial/varietas unggul di luar kebutuhan pangan;
- Penyempurnaan mekanisme *off taker* BBN (jaminan pasar), termasuk standar, subsidi, dan harga bahan baku, serta harga jual BBN.

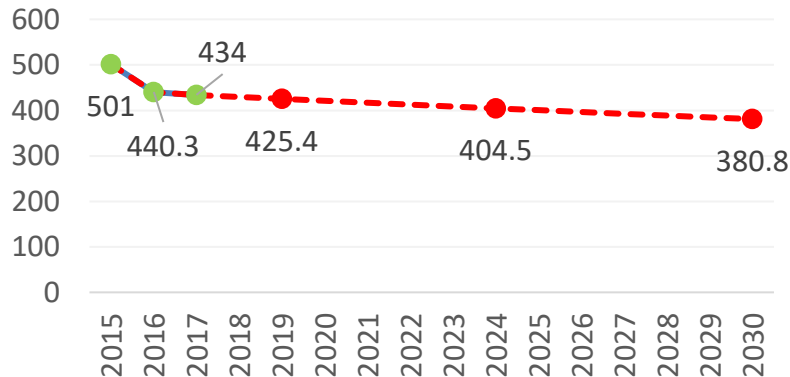
Meningkatkan potensi dan kualitas data Energi Baru dan Terbarukan

- Peningkatan kualitas dan kuantitas survei potensi energi air, bioenergi, surya, dan angin;
- Pelaksanaan survei potensi arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut, serta EBT lainnya.



GOAL 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

7.3.1* Intensitas Energi Primer



380.8

SBM/miliar Rupiah

Intensitas energi primer tahun 2030 dengan skenario intervensi

Tidak memungkinkan adanya proyeksi baseline karena angka yang fluktuatif dan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- Intensitas energi mengindikasikan seberapa besar energi yang digunakan untuk memproduksi satu unit output ekonomi. Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan seberapa efisien sebuah negara mengkonversi energi menjadi Produk Domestik Bruto (PDB).
- Sejak tahun 2000, Indonesia telah menunjukkan penurunan intensitas energi primer yang signifikan dari 5,31 juta Joule/\$ terhadap PDB menjadi 3,53 juta Joule/\$ terhadap PDB tahun 2015, setara dengan 1,36% penurunan setiap tahun¹. Dibandingkan dengan kawasan Asia Timur dan Pasifik, intensitas energi primer di Indonesia sudah lebih rendah dari rata-rata kawasan.
- Efisiensi energi di Indonesia diraih paling tinggi oleh kelompok industri –cakupan tertinggi dari kewajiban kebijakan efisiensi, sektor jasa dan transportasi². Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kewajiban efisiensi energi berperan penting dalam mengurangi intensitas energi primer. Pemerintah dapat menggalakkan efisiensi energi melalui kebijakan serupa untuk berbagai sektor dengan memberikan insentif untuk meningkatkan area pendinginan di sektor konstruksi dan mendirikan standar efisiensi bahan bakar untuk sektor transportasi.

¹ Bank Dunia dan OECD (2016).

² Energy Efficiency in Indonesia, International Energy Agency (2018).

Intensitas Energi Primer

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	501 SBM/Miliar Rupiah	501 SBM/Miliar Rupiah
2019		425.4 SBM/Miliar Rupiah
2024		404.5 SBM/Miliar Rupiah
2030		380.8 SBM/Miliar Rupiah



Meningkatkan efisiensi energi

- Pengaturan pemakaian energi yang efisien dan ramah lingkungan pada kawasan pengguna energi terintegrasi;
- Pengembangan penggunaan sistem dan teknologi hemat energi terutama di kawasan industri (implementasi manajemen energi dan efisiensi peralatan);
- Penggunaan teknologi pembangkit listrik yang lebih efisien;
- Pengurangan rugi-rugi (losses) pada transmisi dan distribusi listrik;
- Pelaksanaan konservasi energi sektor transportasi;
- Penggantian peralatan di sektor-sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya;
- Penyusunan standar terkait rancang bangun gedung hemat energi.

Menciptakan iklim yang mendukung pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi

- Pembentukan badan konservasi energi;
- Pengembangan kebijakan Usaha Jasa Konservasi Energy (Energy Service Company/ESCO) untuk implementasi proyek efisiensi energi;
- Pelaksanaan program dan audit manajemen energi;
- Peningkatan kemampuan teknis manajer dan auditor energi;
- Pemberian fasilitas insentif (fiskal dan non fiskal) bagi industri yang melaksanakan efisiensi energi;
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi melalui kampanye hemat energi dan listrik.

Memperkuat pelaksanaan efisiensi energi

- Penerapan SNI atas peralatan pemanfaat energi untuk berbagai sektor;
- Penerapan manajemen dan audit energi sesuai standar internasional untuk berbagai sektor;
- Penerapan standar terkait rancang bangun gedung hemat energi.

Menjaga stabilitas iklim yang mendukung pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi

- Penguatan kebijakan Usaha Jasa Konservasi Energi (Energy Service Company/ESCO);
- Pelaksanaan program dan audit manajemen energi;
- Review fasilitas insentif (fiskal dan non-fiskal) bagi industri yang melaksanakan efisiensi energi secara berkala.

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

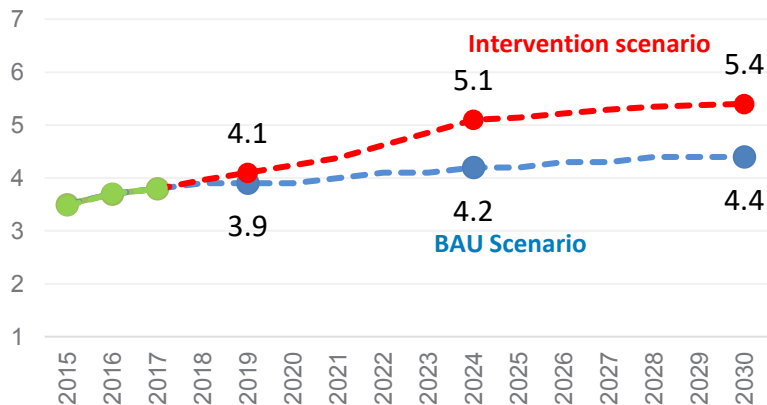
8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI





TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

8.1.1* Laju pertumbuhan PDB riil per kapita



4.4%

Laju pertumbuhan PDB riil per kapita tahun 2030 dengan skenario BAU

5.4%

Laju pertumbuhan PDB riil per kapita tahun 2030 dengan skenario intervensi

Sumber:

- 1) Data: BPS
 - 2) Proyeksi BAU dan intervensi: BAPPENAS
- ** Menggunakan model Oxford Economics

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan

Kesejahteraan dapat diukur dengan PDB riil per kapita. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara garis besar dipengaruhi oleh dua hal yaitu: 1) Pertumbuhan ekonomi, dan 2) Laju pertumbuhan penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat pendapatan per kapita, yang berakibat pada penurunan angka kesejahteraan masyarakat.

- Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur serta sektor jasa yang memiliki produktivitas lebih tinggi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2% diperlukan agar dapat mencapai angka pertumbuhan PDB riil per kapita hingga 5,4% dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,7%.
- Pendekatan yang multisektoral harus dilakukan untuk mempercepat pencapaian target. Langkah-langkah utama yang dapat dilakukan untuk mendorong transformasi struktural di Indonesia salah satunya adalah meningkatkan interkoneksi melalui pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap komoditas bahan mentah melalui diversifikasi produk.

Laju pertumbuhan PDB riil per kapita

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	3,5%	3,5%
2019	3,9%	4,1%
2024	4,2%	5,1%
2030	4,4%	5,4%



Percepatan transformasi struktural melalui modernisasi pertanian, reindustrialisasi, dan pemanfaatan sumber pertumbuhan baru

- Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna
- Peningkatan kewirausahaan dan manajemen pertanian
- Peningkatan skala usaha pertanian
- Peningkatan standardisasi dan kualitas produk pertanian
- Penguatan basis industri
- Pemanfaatan pasar domestik sebagai sumber pertumbuhan dan inovasi produk
- Penerapan Industry 4.0
- Peningkatan ekspor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi
- Peningkatan partisipasi dalam Global Production Network
- Peningkatan manufaktur (desain, perawatan, konstruksi dan jasa keuangan)
- Peningkatan industri halal dan recycle
- Peningkatkan konektivitas destinasi dan inovasi produk pariwisata, dengan fokus MICE, wisata minat khusus, dan cross border tourism
- Peningkatan peringkat Indonesia dalam Tourism and Travel Competitiveness Index (TTCI)
- Penguatan industri film, animasi, games, dan music

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Melanjutkan kebijakan reformasi struktural melalui peningkatan produktifitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan

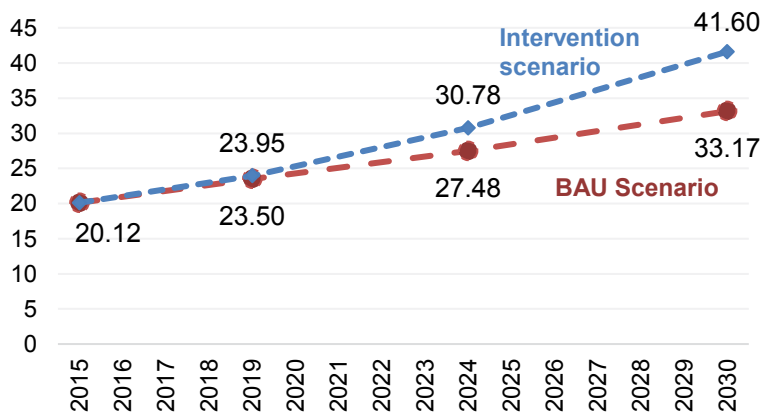
- Memperkuat kebijakan reformasi struktural
- Meningkatkan produktivitas ekonomi
- Melaksanakan pembangunan yang inklusif dan pemerataan pendapatan masyarakat
- Menjaga stabilitas harga domestik dan daya saing internasional
- Mempertahankan keberlangsungan lingkungan

GOAL 8



TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

8.3.1.(c) Persentase Askes UMKM ke Layanan Keuangan



33.17%

Persentase akses UMKM ke layanan keuangan tahun 2030 dengan skenario BAU

41.60%

Persentase akses UMKM ke layanan keuangan tahun 2030 dengan skenario intervensi*

*Proyeksi: Direktorat Pengembangan UMKM dan Koperasi, Bappenas

- Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017, sektor UMKM berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB Indonesia dan sebesar 97,02% terhadap total jumlah pekerja di Indonesia.¹
- Penelitian oleh Burger et al. (2015) menyatakan terdapat empat tantangan terpenting bagi UMKM Indonesia, yaitu: (1) akses ke layanan keuangan/kredit; (2) akses ke bahan mentah; (3) permasalahan tenaga kerja dan sumber daya manusia; serta (4) akses ke pasar dan permintaan.
- Memperbaiki akses pelaku UMKM ke layanan keuangan formal/modern merupakan hal krusial dalam menjembatani kebutuhan modal UMKM, yang dapat mendorong produktivitas dan kinerja UMKM dalam perekonomian. Namun, kebanyakan UMKM belum memiliki akses pada layanan keuangan formal yang disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan maupun faktor budaya serta agama yang membatasi akses terhadap layanan keuangan.
- Pertumbuhan fintech (layanan keuangan digital) menjadi salah satu solusi yang dapat mendekatkan UMKM ke layanan keuangan modern. Di tahun 2030, target akses UMKM ke layanan keuangan mencapai 42% (dengan skenario kebijakan). Hal ini sangat mungkin untuk dicapai mengingat pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses UMKM serta pengusaha ke layanan keuangan sebagai target kebijakan utama serta melakukan reformasi structural untuk mendorong produktivitas perekonomian.

¹Kementerian Koperasi dan UMKM, 2018.

Persentase Askes UMKM ke Layanan Keuangan		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	20.12%	20.12%
2019	23.50%	23.95%
2024	27.48%	30.78%
2030	33.17%	41.60%



Peningkatan Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Kewirausahaan

- Peningkatan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan seperti *LAKU PANDAI* dan layanan keuangan digital
- Peningkatan kesadaran dan literasi keuangan melalui berbagai promosi dan kampanye terkait informasi dan pengetahuan keuangan (produk dan jasa)
- Pembangunan basis data UMKM
- Penyusunan peraturan pembiayaan formal yang lebih berpihak bagi UMKM
- Perluasan akses pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra-mikro



Melanjutkan kebijakan reformasi structural melalui peningkatan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

- Penciptaan inovasi dalam layanan keuangan yang menjangkau seluruh masyarakat (produk, penyaluran, jasa, dan saluran distribusi)
- Perluasan layanan keuangan dengan mekanisme pembiayaan rantai-nilai melalui sinergi dengan telekomunikasi, lembaga non-bank, termasuk lembaga pengelola dana sosial keagamaan (ZISWAF)

- Layanan pemeringkatan kredit

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Arah Kebijakan
2025-2030

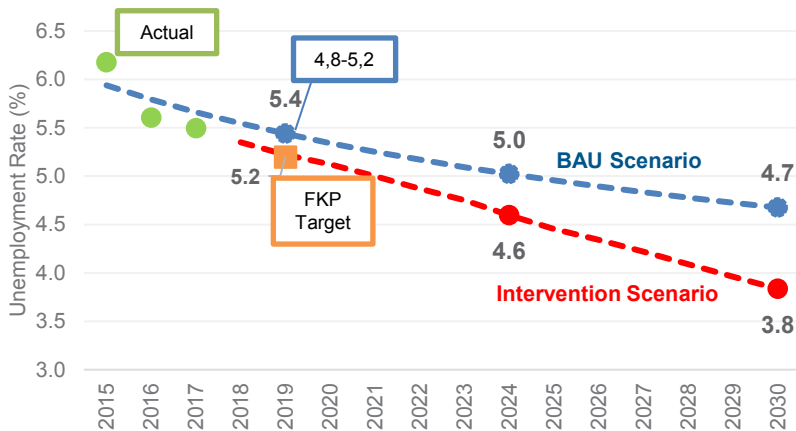
Strategi

GOAL 8



TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka



4.7% Tingkat pengangguran terbuka tahun 2030 dengan skenario BAU*

3.8% Tingkat pengangguran terbuka tahun 2030 dengan skenario intervensi**

*Proyeksi baseline dari BPS

**Skenario intervensi dari Bappenas

Sumber: SAKERNAS, BPS (Periode Agustus)



Indonesia telah berhasil menekan tingkat pengangguran ke angka 5,34% pada tahun 2018. Namun demikian, meski tingkat pengangguran tergolong rendah, masih ada tantangan mengenai pengangguran terselubung serta angkatan kerja berproduktivitas rendah.

¹ Indonesia Jobs Outlook 2017, ILO (2017)

- Pengangguran usia muda di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN¹, dan berada di atas rata-rata dunia pada tahun 2017. Data terkini menunjukkan adanya pengangguran angkatan muda (15-24 tahun) sebesar 19,7% di tahun 2018 (BPS)
- Selain itu, permasalahan yang perlu dibenahi adalah adanya mismatch antara lulusan dan pekerjaan yang tersedia. Sejatinnya, transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa perlu diiringi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas tinggi.
- Untuk mencapai target penurunan pengangguran ke angka 3,8% pada tahun 2030, masalah pengangguran usia muda, kualitas pekerjaan, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja harus diatasi dengan meningkatkan jumlah dan memfasilitasi tenaga kerja terlatih.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	6.2%	6.2%
2019	5.4%	5.2%
2024	5.0%	4.6%
2030	4.7%	3.8%



Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

- Penciptaan lapangan kerja layak dan inklusif seluas-luasnya di sektor yang bernilai tambah tinggi.
- Peningkatan tumbuhnya investasi padat pekerja.
- Peningkatan keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi melalui pemerataan akses pendidikan tinggi, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Peningkatan efektivitas pemanfaatan keahlian melalui pemetaan kebutuhan keahlian masa depan, pemanfaatan keahlian untuk inovasi, dan pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dan sosial.
- Perkuatan sistem keahlian (skills system) melalui penataan kelembagaan vokasi, peningkatan kerjasama dengan industri, dan pengembangan skema pembiayaan pelatihan.
- Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam pasar kerja (perempuan, miskin, penyandang disabilitas, pemuda).
- Penegakan penerapan prinsip kesetaraan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan yang sama.
- Pengembangan skema dan pemantapan perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Increasing productive workers

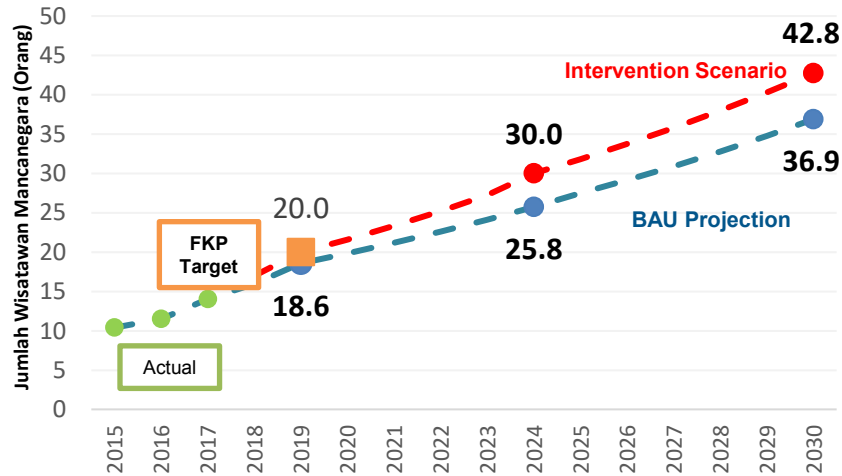
- Peningkatan keahlian tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja yang kompleks dan bernilai tambah tinggi.
- Penguatan fasilitasi transisi lapangan kerja ke sektor industri.
- Penguatan relevansi pendidikan dan pelatihan terutama di bidang keteknikan dan teknologi informasi.
- Pemanfaatan optimal kreativitas dan inovasi untuk penciptaan lapangan kerja formal.
- Penerapan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi tenaga kerja.

GOAL 8



TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancanegara



36.9
juta
jumlah wisman
tahun 2030
dengan skenario
BAU

42.8
juta
jumlah wisman
tahun 2030
dengan skenario
intervensi

- Indonesia memiliki potensi kekayaan alam, budaya, sejarah, dan sosial yang besar. Paduan aspek-aspek tersebut dapat menjadikan Indonesia menjadi negara destinasi wisata utama di dunia. Pada tahun 2018, Indonesia menempati posisi kesembilan negara dengan pertumbuhan pariwisata tertinggi di dunia (WTTC, 2018). Pertumbuhan ini melampaui negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Wisatawan mancanegara merupakan salah satu faktor penting bagi penerimaan devisa, serta penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah.
- Meskipun arus wisatawan mancanegara diproyeksikan akan terus melonjak dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia masih perlu meningkatkan berbagai aspek pendukung wisata untuk memanfaatkan momentum yang ada. Diperlukan peningkatan infrastruktur fisik pendukung pariwisata seperti pengadaan jalan, bandara, hotel dan restoran, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di sektor jasa agar target wisman sebanyak 42.8 juta orang pada tahun 2030 dapat tercapai.

Jumlah Wisatawan Mancanegara (juta orang)

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	10.4	10.4
2019	18.6	20
2024	25.8	30*
2030	36.9	42.8



* Target RPJMN adalah 25-28 juta orang

Peningkatan Daya Saing Pariwisata Indonesia

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

- Inovasi produk pariwisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rerata pengeluaran harian wisatawan, terutama wisatawan mancanegara.
- Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata terutama di destinasi unggulan.
- Peningkatan pengelolaan destinasi dan layanan pariwisata yang didukung penerapan standar pariwisata berkelanjutan.
- Peningkatan investasi pariwisata dan penguatan rantai pasok industri pariwisata yang didukung optimalisasi sumber daya local.
- Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang terampil dan kompeten dengan didukung perbaikan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikasi kompetensi.
- Penguatan citra pariwisata dan perluasan/diversifikasi pemasaran.

GOAL 8

Peningkatan Keragaman Wisata

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

- Peningkatan kuantitas dan kualitas dari ragam destinasi pariwisata.
- Peningkatan informasi produk pariwisata ke pasar dunia yang lebih luas.
- Mendorong integrasi sektor swasta yang lebih besar pada industri pariwisata dengan memberikan fasilitas kemudahan investasi dan akses pasar.
- Peningkatan relevansi produk pariwisata yang ditawarkan melalui media pemasaran itu sesuai dengan pengalaman aktual wisatawan.
- Pengembangan model partisipasi masyarakat berbasis nilai-nilai lokal untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi.
- Peningkatan integrasi kelembagaan kepariwisataan sebagai kesatuan pengelolaan dengan destinasi wisata se-ASEAN yang mampu bersaing di pasar dunia.



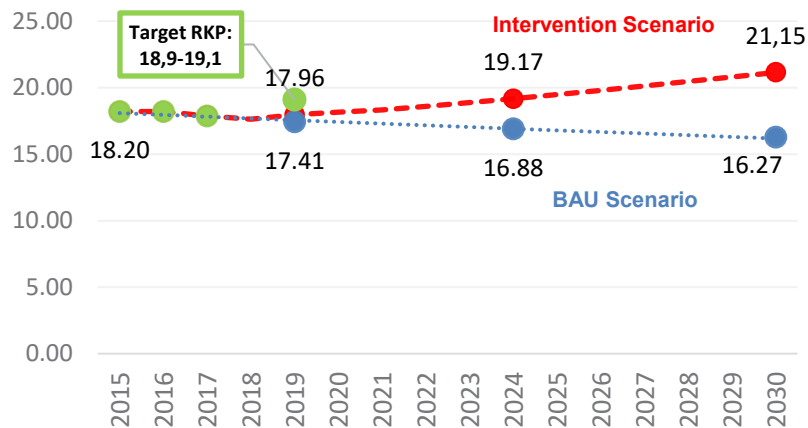
9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR





TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB



Data source: BPS

16.27%

Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB tahun 2030 dengan skenario BAU

21.15%

Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB tahun 2030 dengan skenario intervensi

The target of RPJMN 2020-2024 is 21%

- Proses transformasi structural mendorong adanya pergeseran sektor primer seperti pertanian dan pertambangan ke sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi seperti sektor industri dan jasa. Dengan demikian, ketergantungan perekonomian terhadap sektor primer perlu dikurangi, dan proporsi PDB yang lebih tinggi perlu berasal dari sektor industri dan jasa.
- Sejak tahun 2015, proporsi sektor non-migas telah berkurang secara perlahan dari 18,2% ke 17,63% pada tahun 2018. Angka tersebut diestimasi terus menurun dan Indonesia akan mengalami sebuah deindustrialisasi prematur jika tidak ada intervensi.
- Ada tiga faktor penghambat berkembangnya sektor manufaktur di Indonesia, yaitu: turunnya produktivitas pekerja di tengah rendahnya upah, biaya logistik yang tidak efisien hingga 24% terhadap PDB (dibandingkan Thailand yang hanya 16%), serta rumitnya prosedur regulasi.¹ Maka itu, diperlukan seperangkat kebijakan yang bisa mendukung tercapainya target nilai tambah sektor manufaktur nonmigas terhadap PDB pada tahun 2030 sebesar 21,15%.

¹The US Chamber of Commerce (AmCham), 2016.

Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	18.20	18.20
2019	17.41	17.96
2024	16.88	19.17
2030	16.27	21.15



Arah Kebijakan 2020-2024

Strategi

- Pengembangan Industrialisasi**
- Peningkatan Keterampilan+Kompetensi SDM dan Tata Kelola Usaha
 - Inovasi melalui Kerja Sama Triple Helix
 - Investasi yang Berorientasi GPN, Teknologi dan Ekspor
 - Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produksi Sektor Primer
 - Ketersediaan Infrastruktur, Energi dan Logistik
 - Peningkatan Manfaat FTA dan Promosi Ekspor
 - Peningkatan Manuervice dan Industri Daur Ulang
 - Pemanfaatan Pengungkit Keunggulan Kompetitif: Industry 4.0, Ekonomi Kreatif dan Digital
 - Optimasi Permintaan: Pasar Domestik, Industri Halal, Healthy and Leisure Lifestyle

- Pengembangan Sub-sektor Industri**
- Perkuatan industri hulu dan antara terutama di subsektor kimia dan logam
 - Peningkatan ekspor subsektor unggulan:
 - ❑ Sub-sektor berbasis teknologi: otomotif , mesin dan peralatan elektronik
 - ❑ Sub-sektor padat karya: tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki
 - ❑ Sub-sektor berbasis SDA: makanan minuman, pengolahan ikan, CPO dan turunannya

Arah Kebijakan 2025-2030

Strategi

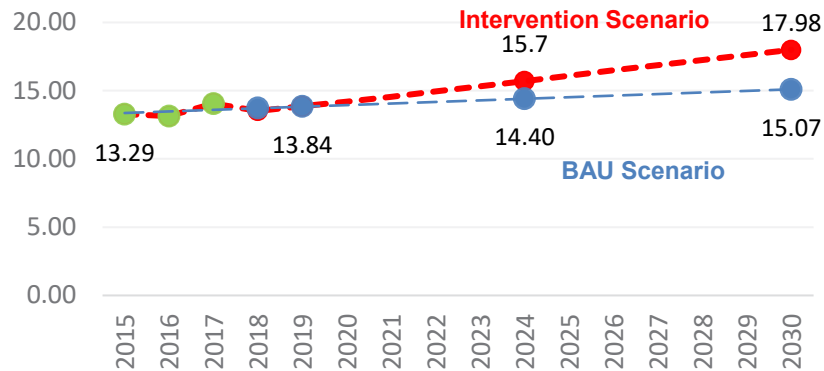
- Pengembangan industri dengan kompleksitas dan nilai tambah tinggi**
- Kebijakan makroekonomi yang kondusif
 - Peningkatan belanja R&D oleh pemerintah serta IPR dan penguatan linkage Technopark
 - Kemudahan investasi asing
 - Pemberian insentif bagi industri yang melakukan riset
 - Ekstensifikasi model industri unggul
 - Fasilitasi kemudahan industri, termasuk skala kecil dan menengah, untuk bergabung dalam GPN
 - Penguatan jasa industri dalam mendukung kawasan industri dan ekspansi global
 - Pengembangan industri hijau

GOAL 9



TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

9.2.2* Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur



Sumber: Sakernas, BPS 2015
Proyeksi: Bappenas

15.07%
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur tahun 2030 dengan skenario BAU

17.98%
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur tahun 2030 dengan skenario intervensi

Asumsi menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,7 persen pada tahun 2020-2024 (*scenario moderate* dalam KEM RPJMN 2020-2024) dan 6,1 persen pada 2025-2030

- Mayoritas tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian meskipun sektor tersebut bukan lagi penyumbang terbesar bagi PDB. Di samping itu, proporsi pegawai yang bekerja pada sektor manufaktur berada dalam kondisi stagnan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun dalam satu dekade terakhir.¹ Angka ini menunjukkan bahwa kualifikasi dan kompetensi pekerja di Indonesia masih belum sesuai dengan laju transformasi struktural perekonomian.
- Sebagian besar tenaga kerja Indonesia merupakan tenaga kerja tidak terdidik di mana banyak dari mereka yang hanya menyelesaikan pendidikan SD (26%), diikuti dengan pendidikan SMP (18%) dan SMA (17%).¹ Maka tidak heran jika masalah *skill mismatch* masih menjadi hambatan terbesar bagi isu ketenagakerjaan dan pertumbuhan sektor manufaktur.
- Pengembangan pelatihan maupun pendidikan vokasi yang terarah hendaknya menjadi prioritas kebijakan agar portofolio keterampilan tenaga kerja Indonesia dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar. Selain itu, pengembangan tersebut hendaknya diaplikasikan melalui kerja sama dengan sektor swasta agar pemerintah dan asosiasi usaha dapat bertukar informasi sehingga pendidikan dan pelatihan vokasi dapat menyesuaikan permintaan pasar tenaga kerja.

¹ BPS, 2018.

Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	13.29	13.29
2019	13.84	13.85
2024	14.40	15.70
2030	15.07	17.98



Pengembangan SDM Industri

- Peningkatan pendidikan dan keahlian SDM industri yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi.
- Penguatan kerja sama dengan dunia usaha dalam peningkatan keahlian SDM industri.
- Pelaksanaan strategi industrialisasi yang dapat mendorong pertumbuhan industri padat pekerja
- Fasilitasi kemudahan perpindahan tenaga kerja di pasar kerja.

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja Industri Ke Arah Industri Dengan Kompleksitas Dan Nilai Tambah Tinggi

- Penguatan fasilitasi transisi lapangan kerja ke sektor industri.
- Penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- Penguatan relevansi pendidikan dan pelatihan terutama di bidang keteknikan dan teknologi informasi.

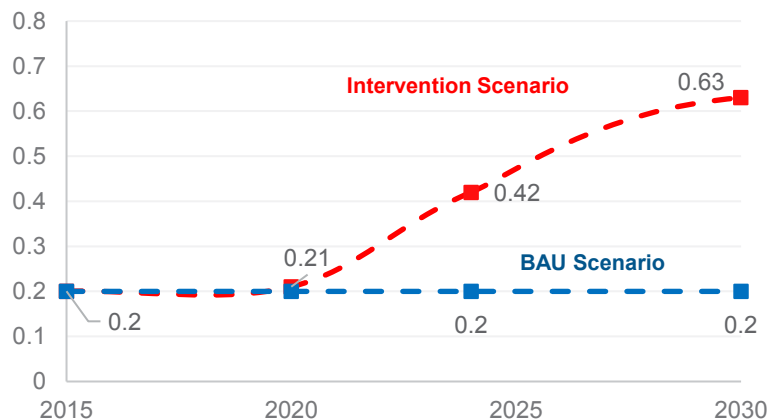
Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi



TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDB



0.20%

Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB tahun 2030 dengan skenario BAU

0.63%

Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB tahun 2030 dengan skenario BAU

Sumber Data:

* Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

** Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045

- Teori pertumbuhan ekonomi modern menyatakan bahwa inovasi merupakan sumber pertumbuhan utama dewasa ini. Inovasi merupakan salah satu produk riset/penelitian dan pengembangan (litbang) yang artinya litbang merupakan sumber pertumbuhan utama bagi perekonomian. Tantangan utama pengelolaan litbang di Indonesia antara lain adalah rendahnya anggaran riset serta pengelolaan dana riset yang belum optimal dan efisien.
- Di Indonesia, jumlah penduduk yang memiliki gelar doktor per 1.000 penduduk hanya mencapai 0,143 (143 lulusan doktor per 1 juta penduduk). Angka ini lebih rendah dari Malaysia (0,509) dan jauh lebih rendah dari Jepang (6,438), Jerman (3,99), dan Amerika (9,85) (Kemristekdikti, 2018).
- Di era perekonomian berbasis pengetahuan, anggaran untuk penelitian dan pengembangan harus ditingkatkan secara signifikan untuk memajukan kualitas riset, membudayakan pola pikir ilmiah, dan untuk meningkatkan komersialisasi produk penelitian.
- Tanpa adanya komitmen dari para pemangku kepentingan, jumlah anggaran litbang akan sulit meningkat di masa depan. Untuk meningkatkan anggaran litbang secara signifikan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, pendidikan tinggi, dan masyarakat untuk membangun ekosistem nasional terlebih dahulu.

Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDB

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	0.20%	0.15%
2019	0.20%	0.21%
2024	0.20%	0.42%
2030	0.20%	0.63%

Sumber: RIRN berdasarkan APBN-P atau (GBAORD)/GDP

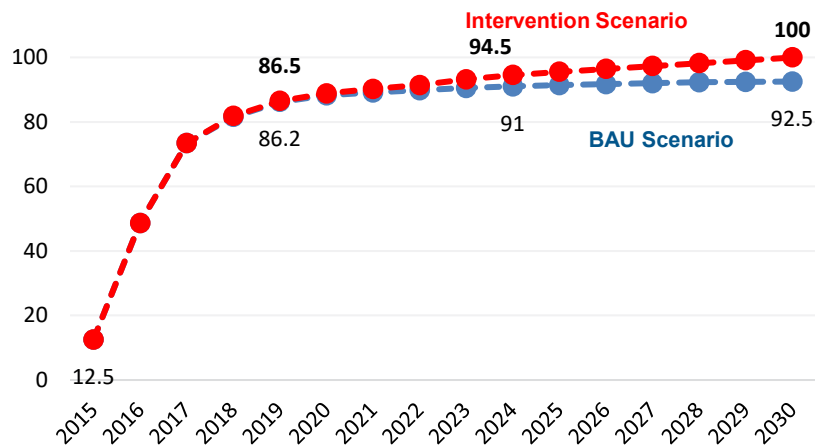


Arah Kebijakan 2020-2024	Strategi	IPTEK dan Inovasi pada Bidang Fokus RIRN untuk Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan	Pengembangan Research Power-House	Penciptaan Ekosistem Inovasi	Optimalisasi anggaran litbang
		Prioritas Riset Nasional, Pemetaan potensi SDA dan budaya per wilayah Indonesia, teknologi ramah lingkungan, teknologi untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penguasaan teknologi garda depan	Peningkatan kualitas, kuantitas, dan produktivitas SDM Iptek, Pengembangan Infrastruktur litbang strategis, Pusat Unggulan IPTEK	Penguatan kapasitas dan layanan STP, pendampingan technopreneur/start-up, dukungan regulasi	Budget Refocussing, kolaborasi swasta, Dana Inovasi Nasional
Arah Kebijakan 2025-2030	Strategi	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Litbang yang Lebih Efektif dan Efisien	Pengembangan Ekosistem Inovasi yang Advanced dan Terintegrasi	Pengembangan Sistem Anggaran dan Insentif Litbang	
		Penguatan kegiatan litbang yang telah terintegrasi terutama dari sisi sinergitas kegiatan riset termasuk skema kerjasama dan sharing facilities antar instansi	Penguatan ekosistem-ekosistem inovasi yang telah advanced secara operasional dan terintegrasi mulai dari knowledge sources di berbagai level (perguruan tinggi, lembaga risbang, dll), hingga ke pemanfaat yang juga di berbagai level (IKM hingga ke industri besar berteknologi tinggi). Tentunya dengan melibatkan seluruh aktor terkait di kalangan akademisi/expert, Pemerintah, bisnis, dan komunitas	Pengembangan sistem anggaran dan insentif litbang yang dikelola melalui platform yang terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya dan ekosistem inovasi, sehingga tujuan proporsi anggaran riset Pemerintah terhadap PDB sebesar 0,63 persen dapat tercapai memanfaatkan secara optimal tahun 2030	



TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

9.c.1* Proporsi Penduduk yang Terlayani *Mobile Broadband*



92.5%

Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* tahun 2030 dengan skenario BAU

100%

Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* tahun 2030 dengan skenario intervensi

Sumber: Kementerian Informasi dan Komunikasi



- Dewasa ini saat teknologi digital menjadi hal yang tak bisa dihindari dan orang-orang semakin perlu untuk saling terhubung demi mengikuti perkembangan zaman, layanan mobile broadband merupakan hal yang krusial untuk pemberdayaan masyarakat. Komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan mobile broadband di seluruh wilayah Indonesia telah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan capaian penetrasi internet mencapai 90% pada tahun 2019 (Kemkominfo, 2019)

- Namun begitu, disparitas pembangunan antara kawasan timur dan barat Indonesia memengaruhi rendahnya angka penduduk yang terlayani mobile broadband. Di Maluku dan Papua misalnya, sebanyak 55% desa belum terjangkau sinyal telepon seluler, dan hanya 60% dari penduduk yang menguasai penggunaan telepon seluler (SUSENAS, 2014).
- Komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memformulasikan kebijakan yang terarah dapat mempercepat pencapaian agenda 2030. Target tahun 2030 sangat mungkin dicapai seiring angka indikator ini menunjukkan tren yang menjanjikan dalam satu dekade mendatang.

Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	12.5%	12.5%
2019	86.2%	86.5%
2024	91%	94.5%
2030	92.5%	100%



- Asumsi yang digunakan adalah menggunakan tren peningkatan jangkauan 2G melalui program USO kominfo dan asumsi rasio elektrifikasi mendekati 100% pada tahun 2020 (listrik sebagai salah satu modal dasar pembangunan BTS serta pendorong peningkatan permintaan).
- Skenario kebijakan utama adalah mendorong permintaan karena pada prinsipnya telekomunikasi seluler dipengaruhi oleh tersedianya pasar.

Arah Kebijakan
2025-2030

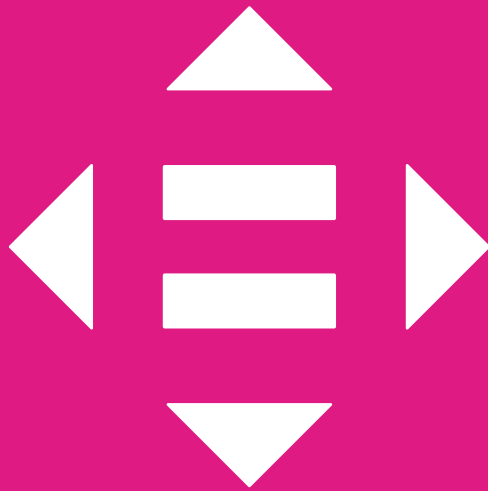
Strategi

Pengembangan Jangkauan *mobile broadband*

- Peningkatan literasi SDM Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)
- Peningkatan jangkauan sel melalui program *last mile* di daerah-daerah *blankspot* (titik hitam)
- Penyediaan konten dan aplikasi layanan masyarakat yang berbasis *mobile*
- Ketersediaan Infrastruktur pendorong ketersediaan demand (listrik, jalan dan sentra perekonomian)



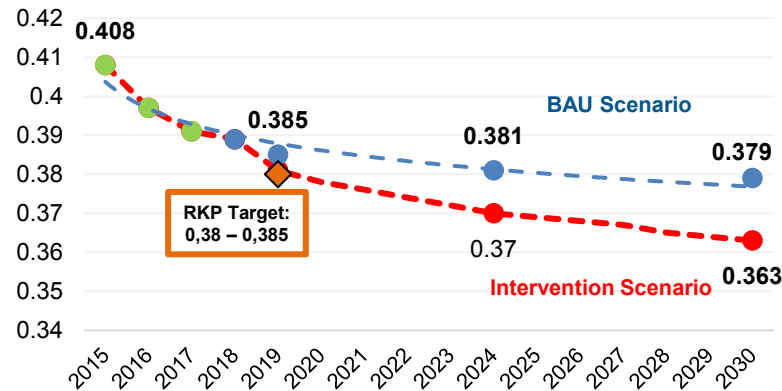
10 BERKURANGNYA KESENJANGAN





TUJUAN 10 MENGURANGI KETIMPANGAN

10.1.1* Koefisien Gini



Sumber: Bappenas

0.379

Koefisien Gini
tahun 2030
dengan
skenario BAU

0.363

Koefisien Gini
tahun 2030
dengan skenario
intervensi

- Rasio Gini meningkat secara tajam sejak tahun 2004 dan mencapai puncaknya ke angka 0,413 pada tahun 2013. Lonjakan komoditas (2004-2012) diperkirakan berkontribusi terhadap peningkatan rasio Gini tersebut. Namun sejak tahun 2015, rasio Gini telah menurun secara bertahap.
- Pada bulan Maret 2019, rasio Gini mencapai 0,382, menurun sebesar 2,4 poin dalam 5 tahun. Angka tersebut tergolong moderat untuk ukuran kesenjangan. Angka ini pun termasuk rendah dibandingkan negara berkembang lainnya, menunjukkan distribusi pendapatan yang sudah lebih merata di Indonesia. Rasio Gini dipengaruhi oleh dinamika perekonomian dan bisa saja tidak sejalan dengan tingkat kemiskinan. Meski sudah rendah, angka rasio Gini belum dapat menggambarkan kesejahteraan secara umum. Namun begitu baik rasio Gini maupun kemiskinan di Indonesia telah menurun dalam 4 tahun terakhir.
- Kesenjangan lebih jelas terlihat di wilayah perkotaan di mana rasio Gini perkotaan mencapai 0,392 sementara rasio Gini perdesaan hanya sebesar 0,317 (BPS, 2019).

- Daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi tercatat memiliki kesenjangan ekonomi yang juga tinggi. Kesenjangan pendapatan tertinggi diraih oleh Yogyakarta, Gorontalo, dan Jawa Barat dengan koefisien Gini masing-masing 0,423; 0,407; dan 0,402. Sementara Bangka Belitung dengan rasio Gini 0,269, Kalimantan Utara (0,295), dan Sumatera Barat (0,306) memiliki rasio Gini terendah dibandingkan provinsi lain.
- Melalui program yang tepat sesuai mandat RPJMN 2015-2019, proporsi pengeluaran kelompok menengah turun ke angka 46,09% pada tahun 2018, sementara proporsi pengeluaran kelompok termiskin mengalami peningkatan. Berbagai kebijakan seperti bantuan sosial, reformasi jaminan sosial, dan dana desa berkontribusi terhadap penurunan angka Gini. Dari tahun 2015 ke 2018, indeks Gini menunjukkan tren yang menurun dan target rasio Gini sebesar 0,363 tahun 2030 sangat mungkin untuk dicapai dengan kebijakan pelengkap, khususnya dalam mengatasi ketimpangan perkotaan. Untuk terus meningkatkan konsumsi masyarakat termiskin menjadi lebih dari 20% (saat ini 17%) diperlukan pemberdayaan ekonomi juga bantuan sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran yang didukung oleh kebijakan fiskal.

Koefisien Gini		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	0.408	0.408
2019	0.385	0.385
2024	0.381	0.370
2030	0.379	0.363



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan

- Peningkatan kualitas kebijakan fiskal yang mendukung redistribusi yang lebih merata bagi masyarakat miskin dan rentan
- Peningkatan kontribusi usaha mikro dan kecil bagi penurunan ketimpangan
- Penguatan sistem pajak berkeadilan
- Peningkatan ekonomi perdesaan;
- Peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan, antara lain melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan (reforma agraria dan perhutanan sosial); dan
- Pengendalian inflasi dan harga pangan melalui optimalisasi tarif impor.

Meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan vokasi dan relevansi keahlian tenaga kerja

- Pemerataan akses pendidikan dan pelatihan vokasi melalui kerjasama pemerintah dan dunia usaha, salah satunya berupa insentif pajak bagi perusahaan yang memberikan kesempatan pelatihan bagi pekerjanya;
- Pengembangan pendidikan vokasi didasarkan pada kebutuhan ekonomi lokal dan keunggulan di daerah;
- Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam pasar kerja;
- Peningkatan keterpaduan dunia usaha dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi permintaan kompetensi tenaga kerja;
- Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan kesempatan kerja; dan
- Peningkatan keterampilan dan keahlian pekerja migran sesuai dengan kebutuhan pasar.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Menjaga Stabilitas Pertumbuhan yang Memihak Masyarakat Miskin dan Rentan serta Menstimulasi Pertumbuhan Masyarakat Kelompok Menengah

- Penguatan kebijakan fiskal yang mendukung redistribusi yang lebih merata bagi masyarakat miskin dan rentan
- Peningkatan daya saing UMKM dalam pasar global

Meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja yang kompleks dan bernilai tambah tinggi

- Penguatan fasilitasi transisi lapangan kerja ke sektor industri; dan
- Penguatan relevansi pendidikan dan pelatihan terutama bidang keteknikan dan teknologi informasi.

GOAL 10



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Memperkuat perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi

- Penguatan sistem asistensi sosial untuk penghidupan yang layak dengan jaminan sosial yang memadai;
- Reformasi sistem jaminan sosial menuju sistem yang berkesinambungan dan cakupan semesta, termasuk penambahan program kesejahteraan pekerja Unemployment Insurance, Long-Term Care dan PBI untuk SJSN Ketenagakerjaan;
- Harmonisasi sistem administrasi JKN dan SJSN Ketenagakerjaan;
- Pengembangan pendekatan inovatif dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal; dan
- Percepatan integrasi basis data terpadu dan sistem administrasi kependudukan.

Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, inklusif, dan bernilai tambah tinggi

- Peningkatan investasi pada sektor yang padat karya
- Pengembangan kewirausahaan;
- Penguatan hubungan industrial; dan
- Penerapan struktur skala upah yang lebih baik.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Menjaga stabilitas pertumbuhan yang memihak masyarakat miskin dan rentan serta menstimulasi pertumbuhan masyarakat kelompok menengah

- Peningkatan kualitas sistem pajak berkeadilan
- Peningkatan koordinasi program dan sistem penargetan bagi kelompok pendapatan menengah; dan
- Penerapan kebijakan pangan yang dapat berkontribusi dalam menstabilkan volatilitas harga.

Menyempurnakan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi

- Penyempurnaan sistem evaluasi dan monitoring administrasi JKN dan SJSN Ketenagakerjaan;
- Percepatan perluasan cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal; dan
- Pemanfaatan satu data kependudukan untuk pelaksanaan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi.

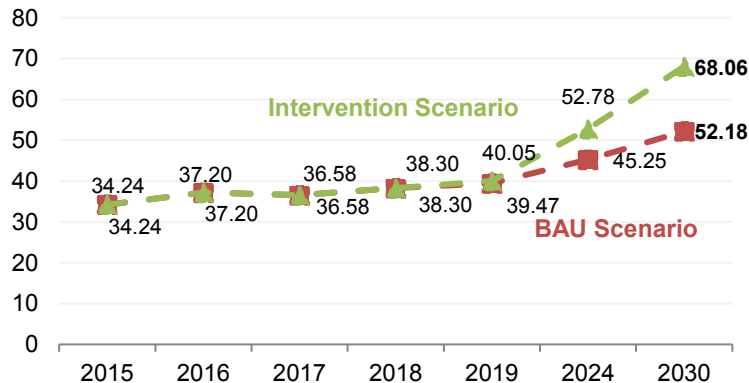
11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN





TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau



52.18%

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau tahun 2030 dengan skenario BAU

68.06%

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau tahun 2030 dengan skenario intervensi

Sumber: SUSENAS, BPS

- Ledakan penduduk dan kelangkaan tanah merupakan permasalahan yang umum ditemui di berbagai negara. Harga rumah yang semakin tidak terjangkau secara langsung memunculkan daerah kumuh dan urban sprawl yang dapat menurunkan kualitas kehidupan perkotaan.
- Pada tahun 2018, hanya 38,30% atau 26,85 juta rumah tangga yang memenuhi empat kriteria hunian yang aman dan layak secara nasional, di mana pada daerah perkotaan hanya terdapat 42,3% rumah tangga yang dapat memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2024, angka tersebut ditargetkan naik ke angka 53,19% melalui seperangkat kebijakan yang dirancang untuk memberantas daerah kumuh dan daerah urban sprawl.
- Mengacu pada fungsinya untuk memberikan jaminan penyediaan hunian yang aman dan layak, pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan untuk memenuhi empat kriteria dasar pemukiman kumuh, yaitu: ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak. Dua kriteria tambahan digunakan untuk memperkuat keamanan dan kelayakan hunian yaitu, keamanan bermukim dan keterjangkauan.
- Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan 'Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh' dengan menyusun strategi yang bertujuan untuk menata, mencegah, dan mengurangi daerah kumuh sesedikit mungkin. Termasuk di dalamnya strategi berupa distribusi kepemilikan tanah secara layak, layanan infrastruktur, skema pembiayaan, undang-undang, kapasitas pemangku kepentingan, kebijakan dan peraturan, serta perencanaan yang holistik.

Proportion of Households with Access To Adequate and Affordable Housing

Year	Baseline	Intervention
2015	34.24	34.24
2019	39.47	40.05
2024	45.25	52.78
2030	52.18	68.06



Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

A. Sisi Permintaan

- Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan dalam rangka mewujudkan pembiayaan perumahan yang murah, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan dana jaminan sosial/pensiun.
- Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
- Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumah secara swadaya.

B. Sisi Pasokan

- Peningkatan keterpaduan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dengan sistem transportasi.
- Peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan perumahan melalui inclusive urban renewal dan konsolidasi tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh perkotaan.
- Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman.
- Pembentukan dan peningkatan peran badan perumahan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di perkotaan.
- Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi MBR.

C. Enabling Environment

- Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan.
- Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk perumahan.
- Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

GOAL 11



Memastikan seluruh rumah tangga memiliki akses pada hunian yang layak, aman dan terjangkau beserta layanan infrastruktur dasarnya dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh

- Pemantapan peran serta pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan hunian layak, aman dan terjangkau.
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan perumahan dan permukiman untuk seluruh kriteria hunian yang layak.
- Penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar permukiman.
- Peningkatan efisiensi subsidi perumahan yang berkelanjutan.
- Peningkatan efisiensi lahan perkotaan untuk penyediaan perumahan melalui inclusive urban renewal dalam rangka penanganan permukiman kumuh.

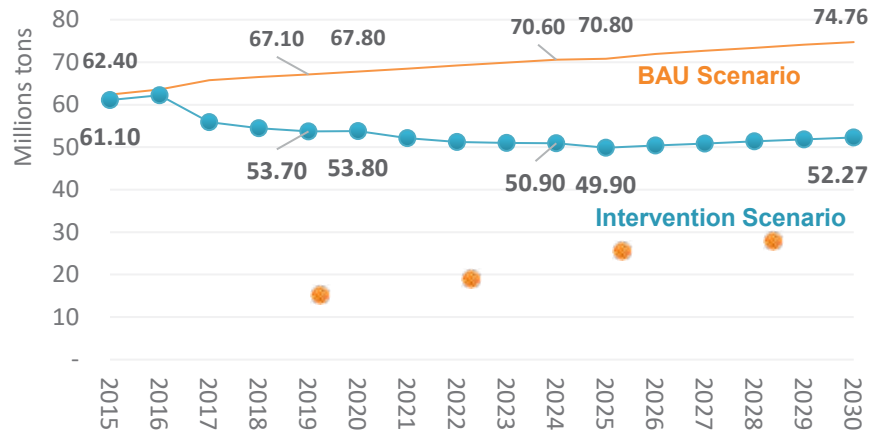
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB





TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

12.5... * Produksi Sampah



74,6
Juta ton

Produksi sampah
tahun 2030
dengan skenario
BAU

52,27
Juta ton

Produksi sampah
tahun 2030
dengan skenario
intervensi

Sumber: Strategi dan Kebijakan Nasional (2017)

- Indonesia diestimasi akan menghasilkan sampah sekitar 190.000 ton per hari, yang didominasi oleh sampah organik. Sampah plastik menyumbang sebesar 25.000 ton setiap hari dimana 20% dari jumlah tersebut berakhir di sungai dan laut.¹ Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua setelah Tiongkok sebagai negara penyumbang sampah plastik terbanyak ke lautan.
- Infrastruktur serta teknologi pengelolaan sampah tidak mampu mengejar laju urbanisasi di Indonesia. Masalah ini juga diperparah dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya mengolah sampah di tingkat rumah tangga serta betapa sampah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama sampah plastik.
- Pemerintah menetapkan target untuk mengurangi sampah hingga 70% pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang masif. Mengubah perilaku masyarakat akan timbunan dan pengelolaan sampah merupakan kunci utama penurunan produksi sampah di Indonesia. Selain itu, penetapan kebijakan yang lebih radikal seperti pelarangan pemakaian plastik sekali pakai juga dapat menjadi solusi – Bali telah mengimplementasikan kebijakan tersebut pada awal tahun 2019 untuk menekan produksi sampah di Indonesia.

¹The waste challenge in Indonesia: Is Indonesia at a tipping point?, The Jakarta Post (2019).

Produksi Sampah (juta ton)		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	62.40	61.10
2019	67.10	53.70
2024	70.60	50.90
2030	74.76	52.27



Peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga termasuk sampah plastik

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

- Menyusun draft Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengurangan sampah rumah tangga.
- Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- Penguatan komitmen dari badan eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah dalam menyediakan anggaran untuk pengurangan sampah rumah tangga.
- Pembuatan sistem informasi.
- Penguatan keterlibatan komunitas masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam rangka mengurangi sampah rumah tangga.

Penguatan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

- Optimalisasi Reuse, Reduce, Recycle.
- Pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya (sumber energi alternatif, sumber bahan industri, pupuk organik, industri kreatif).
- Implementasi *Circular Economy*.
- Standardisasi pelayanan pengelolaan sampah spesifik.
- Penguatan penguasaan teknologi bersih untuk mendukung pengurangan produksi sampah
- Penerapan Extended Producer Responsibility.
- Optimisasi pengelolaan sampah khusus.
- Penguatan dan sinergi kerangka regulasi dan kelembagaan pengelolaan sampah
- Pengurangan emisi karbon yang bersumber dari sampah.



13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

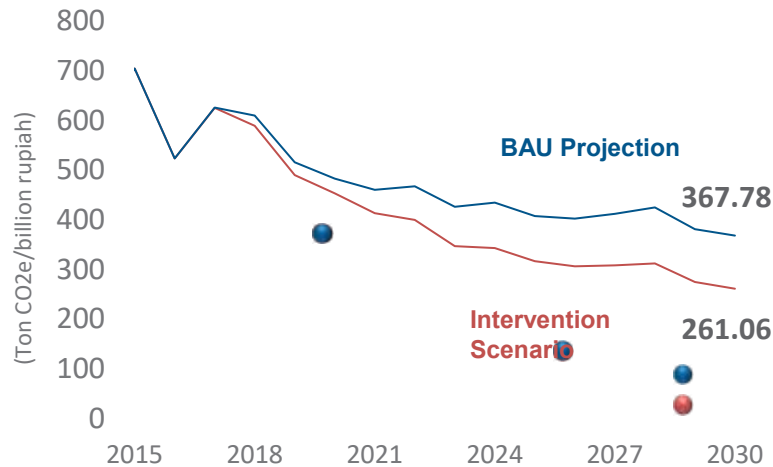


13 PEMANGANAN PERUBAHAN IKLIM



TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

13.2.1.(b) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca



367,78

Ton CO₂e/miliar
Rupiah

pada tahun
2030 dengan
skenario BAU

261,06

Ton CO₂e/miliar
Rupiah

pada tahun 2030
dengan skenario
intervensi

Source: Direktorat Lingkungan Hidup, Bappenas

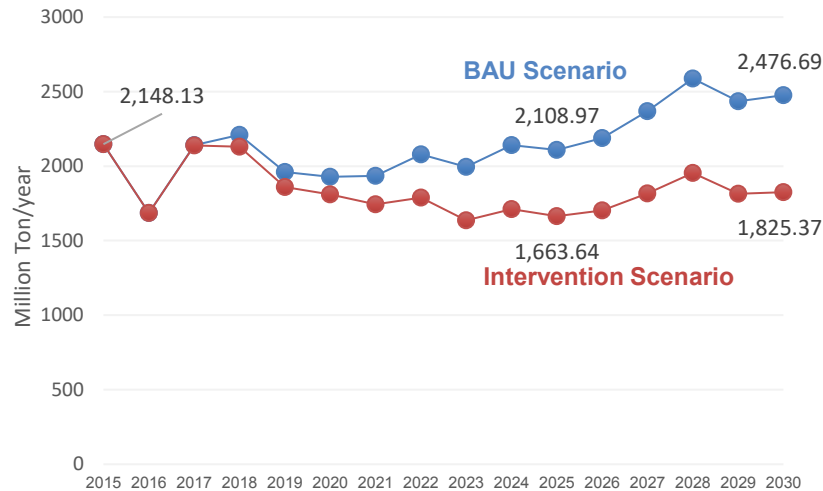
Pada tahun 2030, emisi gas rumah kaca di Indonesia paling banyak berasal dari konsumsi bahan bakar fosil yang berkontribusi sebesar 57% dari total emisi gas rumah kaca.

- Selain konsumsi bahan bakar fosil, deforestasi dan alih fungsi lahan juga berkontribusi sekitar 30% dari total emisi gas rumah kaca (Bappenas, 2019). Kebakaran hutan dan lahan gambut menghasilkan lebih dari 1 juta ton CO₂ emisi yang utamanya disebabkan oleh pembukaan lahan (Anderson et al, 2016).
- Penanganan perubahan iklim perlu melibatkan peningkatan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi, juga memperluas reforestasi hutan. Namun begitu, karena target pembangunan yang multi-sektoral, penanganan perubahan iklim juga perlu searah dengan menjaga pertumbuhan ekonomi.



TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

13.2.1.(c) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca



2.476

Million ton CO₂e

in 2030 with
BAU
scenario

1.825

Million ton CO₂e

in 2030 with
intervention
scenario

Source: Directorate for the Environment, Bappenas

Indonesia merupakan penghasil emisi GRK tertinggi kelima di dunia (WRI, 2014).

Meski intensitas emisi mengalami penurunan, pertumbuhan permintaan batu bara yang mencapai 7,4% pada tahun 2018 merupakan salah satu yang tertinggi di dunia (PwC, 2018). Padahal, konsumsi batu bara merupakan salah satu faktor utama emisi GRK.

- Di Indonesia, upaya untuk mendorong ekonomi hijau masih dilakukan oleh sektor tertentu di pemerintahan dan komunitas LSM. Sementara beberapa perusahaan besar dan sector lain di pemerintahan menolak reformasi tersebut karena dipandang sebagai penghalang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional (Anderson et al, 2016).
- Ketidakmampuan untuk melakukan sinkronisasi tujuan pembangunan berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan akan peraturan mengenai reforestasi dan moratorium lahan gambut.

Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ² e/Miliar Rupiah)			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (juta Ton CO ² e)		
Tahun	Baseline	Intervensi	Tahun	Baseline	Intervensi
2015	703,79	703,85	2015	2,148	2,148
2019	515,76	489,57	2019	1,961	1,859
2024	434,16	342,77	2024	2,140	1,710
2030	367,78	261,06	2030	2,476	1,825



Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Hutan, Lahan, dan Gambut

Mengembalikan fungsi ekosistem, DAS, dan jasa lingkungan hutan; mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan, pemberdayaan dan pelestarian kehutanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Transportasi

Tersedianya sarana transportasi yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

Pertanian

Penguatan ketahanan pangan nasional yang Berkelanjutan.

Energi

Perluasan pelaksanaan efisiensi energi serta penyediaan energi baru terbarukan.

Industri

Optimalisasi dan peningkatan efektivitas penggunaan energi dan bahan baku dalam proses produksi industri.

Pengelolaan Limbah

Tersedianya sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi.

Blue Carbon

Mempertahankan luasan dan pengembalian fungsi ekosistem hutan bakau.

Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ² e/Miliar Rupiah)			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (juta Ton CO ² e)		
Tahun	Baseline	Intervensi	Tahun	Baseline	Intervensi
2015	703,79	703,85	2015	2,148	2,148
2019	515,76	489,57	2019	1,961	1,859
2024	434,16	342,77	2024	2,140	1,710
2030	367,78	261,06	2030	2,476	1,825



Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Pembangunan Rendah Karbon

Hutan, Lahan, dan Gambut

Implementasi moratorium lahan hutan, lahan gambut, dan lahan bakau; pencegahan kebakaran lahan gambut; implementasi penebangan berdampak rendah (RIL); dan restorasi hutan dan reforestasi hutan dan lahan gambut.

Transportasi

Penyediaan moda transportasi yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan; pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan.

Industri

Peningkatan teknologi bersih dan pengelolaan industri hijau.

Pertanian

Peningkatan aktivitas pertanian yang progresif; praktik pengelolaan pertanian yang berkelanjutan; peningkatan lahan pertanian padi untuk mencapai ketahanan pangan

Energi

Perluasan implementasi efisiensi energi dan EBT; Peningkatan penggunaan biofuel.

Ekonomi

Investasi teknologi hijau; pengurangan subsidi energi.

Pengelolaan Limbah

Penanganan sampah rumah tangga; pengelolaan limbah industri; dan pengelolaan dan efisiensi industri.

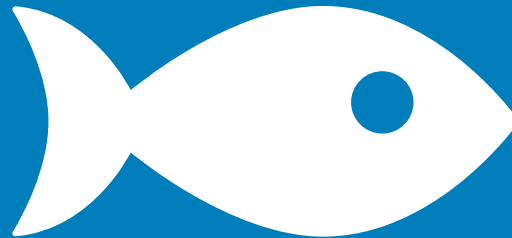
Blue Carbon

Mempertahankan tutupan laut dan mengembalikan fungsi ekosistem bakau dan lamun.

GOAL 13



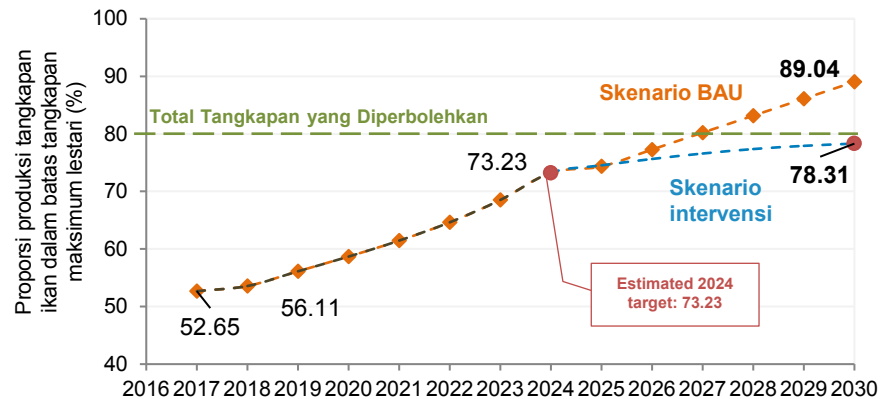
14 EKOSISTEM LAUTAN





TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN

14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman



89.04%

Proporsi tangkapan ikan nasional tahun 2030 dengan skenario BAU

78.31%

Proporsi tangkapan ikan nasional tahun 2030 dengan skenario intervensi

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Proyeksi: Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas

Catatan:

- Gambar ini menunjukkan jumlah agregat spesies ikan komersil pada seluruh WPP. Pengukuran secara detail perlu dipertimbangkan berdasarkan kelompok spesies dan WPP.
- Hingga 2030, tangkapan maksimum lestari (MSY) adalah 12,54 juta ton; TAC 80% (berdasarkan Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO)

MSY 2011 : 6,52 juta ton (7 kelompok spesies utama)
Ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal
MSY 2017 : 12,54 juta ton (9 kelompok spesies utama)
Big Ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang penaeid, ikan karang, lobster, cumi-cumi, kepiting lumpur, kepiting biru.

- Teritori Indonesia terdiri dari 70% area kelautan yang dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Produksi tangkapan ikan laut tumbuh dari tahun 2014–2018 dan mencapai 6,72 juta ton tahun 2018.
- Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan praktik penangkapan ikan berkelanjutan untuk memelihara kelestarian sumber daya laut yang searah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu pendekatannya adalah memastikan keberlanjutan melalui implementasi manajemen WPP.
- Tantangan masih datang baik dari perikanan hulu dan hilir termasuk tata kelola dan praktik penangkapan ikan. Hal itu perlu ditanggulangi dengan beberapa strategi seperti optimisasi kapasitas tangkapan baik dalam hal produktivitas dan kualitas tangkapan, mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, memperkuat rantai pasok, dan mekanisme pelacakan, meningkatkan kehandalan data untuk asesmen persediaan dan langkah pengelolaan, dan melaksanakan tata kelola perikanan yang inklusif baik di tingkat WPP, provinsi, maupun nasional.

Proporsi tangkapan jenis ikan dalam batasan biologis aman		
Tahun	Baseline	Intervensi
2017	52.65%	52.65%
2019	56.11%	56.11%
2024	73.23%	73.23%
2030	89.04%	78.31%



Arah Kebijakan 2020-2024

Strategi

Peningkatan Tata Kelola Perikanan

- Penetapan WPP sebagai badan pengelolaan di 3 lokasi pilot.
- Pelaksanaan asesmen stok perikanan yang komprehensif secara regular di 11 lokasi WPP untuk menyediakan data dan statistik perikanan yang handal.
- Pengembangan platform perikanan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.
- Peningkatan izin melaut yang transparan dan optimum melalui implementasi strategi penangkapan dan pengaturan, termasuk kuota tangkapan.

Revitalisasi Praktik Penangkapan Ikan Berkelanjutan

- Pemenuhan prinsip ramah lingkungan pada standar pengelolaan perikanan.
- Dukungan penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.
- Peningkatan kesehatan ekosistem pesisir untuk mendukung keberlanjutan produksi perikanan.
- Peningkatan kapasitas dan akses sumber daya bagi nelayan kecil.
- Pemberantasan aktivitas penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing).

Arah Kebijakan 2025-2030

Strategi

Penguatan Tata Kelola Perikanan

- Penguatan dan replikasi otoritas manajemen WPP di 11 lokasi WPP.
- Penguatan pengelolaan data stok perikanan berdasarkan kelompok spesies dan WPP.
- Implementasi kebijakan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan penguatan serta operasionalisasi platform perikanan di tingkat nasional dan daerah.
- Pengembangan perizinan yang efisien dan berbasis-digital untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produksi perikanan.

Implementasi Penangkapan Ikan Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

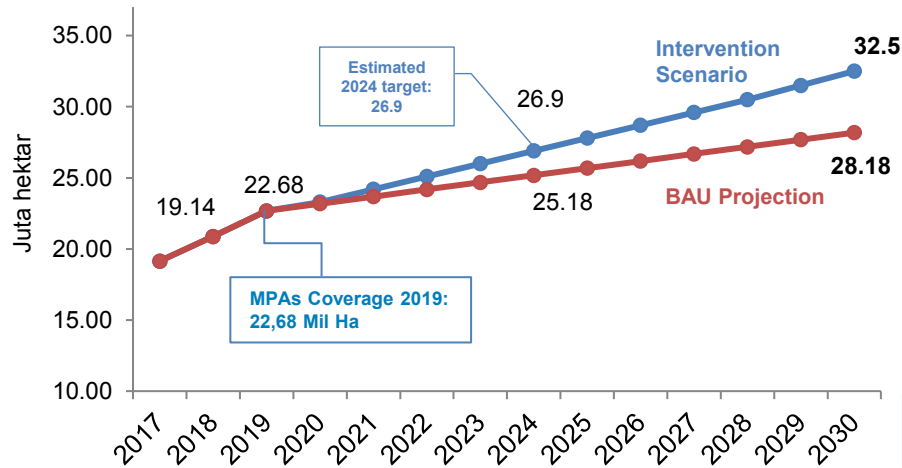
- Penerapan instrument keberlanjutan untuk setiap usaha perikanan baik di tingkat nasional dan daerah.
- Penguatan integrasi hulu dan hilir untuk optimalisasi pengembangan perikanan dalam mempercepat produksi perikanan yang berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah.
- Mendorong rasionalisasi dan modernisasi kapal penangkap ikan.
- Penguatan aktivitas perikanan yang legal, tercatat, dan teregulasi di tingkat nasional dan daerah.

GOAL 14



TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN

14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan



8.6%

Persentase luas kawasan konservasi perairan tahun 2030 dengan skenario BAU

10%

Persentase luas kawasan konservasi perairan tahun 2030 dengan skenario intervensi

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Proyeksi: Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas

- Indonesia dengan 17 ribu pulau dan garis pantai sepanjang 99 ribu kilometer dikenal sebagai negara mega-biodiversitas. Banyak sekali potensi sumber daya laut yang dapat ditingkatkan yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat baik di masa sekarang dan masa depan. Kawasan konservasi perairan dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat sekitarnya.
- Pada pertengahan 2019, Indonesia telah membentuk 22,68 juta hektar KKP, sekitar 6,97% dari total perairan Indonesia. Indonesia juga telah berkomitmen untuk mempercepat pembentukan dan meningkatkan KKP menjadi 32,5 juta hektar atau sekitar 10% dari total wilayah perairan Indonesia. Namun begitu, untuk benar-benar mendapatkan manfaat sumber daya laut dan perikanan, bukan hanya meningkatkan kuantitas KKP namun perlu juga diperhatikan pengelolaan KKP yang sudah dibentuk.
- Tantangan yang masih perlu diperhatikan adalah mengenai efektivitas pengelolaan KKP, dan juga sumber daya manusianya, kapasitas manajemen, dan infrastruktur pendukungnya. Partisipasi dari komunitas daerah setempat untuk menangani degradasi lingkungan yang utamanya disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan ilegal dan sampah laut juga diperlukan untuk mendukung tujuan menjaga ekosistem laut.



Coverage of Marine Protected Areas (Mil Ha)		
Year	Baseline	Intervention
2017	19.14	19.14
2019	22.68	22.68
2024	25.18	26.90
2030	28.18	32.50

Arah Kebijakan 2020-2024

Strategi

Penguatan Tata Kelola dan Sinergi Kelembagaan

- Integrasi regulasi dan kebijakan konservasi.
- Dukungan pembentukan KKP di tingkat provinsi.
- Peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur di kawasan konservasi.
- Pengembangan kerja sama multi-pihak.
- Penguatan rencana manajemen dan operasional.

Pemeliharaan Kesehatan Ekosistem dan Dukungan Pemanfaatan KKP

- Pengawasan tren biofisika dan target konservasi.
- Peningkatan partisipasi masyarakat setempat di kawasan pengelolaan.
- Pemberdayaan kehidupan komunitas setempat melalui pemanfaatan kawasan yang berkelanjutan.
- Pelaksanaan pengawasan rutin dan pengendalian izin pemanfaatan.
- Rehabilitasi ekosistem dan habitat.

Pengembangan Pembiayaan KKP Jangka Panjang yang Berkelanjutan

- Analisis kesenjangan pembiayaan.
- Pengembangan mekanisme pembayaran jasa ekosistem.
- Pengembangan pembiayaan campuran untuk konservasi kelautan.
- Pencarian pembiayaan inovatif lainnya (trust fund, obligasi biru).

Arah Kebijakan 2025-2030

Strategi

Penguatan Tata Kelola dan Sinergi Kelembagaan

- Dukungan pembentukan KKP di zona perbatasan.
- Dukungan jaringan KKP daerah.

Pemeliharaan Kesehatan Ekosistem dan Dukungan Pemanfaatan KKP

- Impelementasi praktik baik dari pemanfaatan KKP yang berkelanjutan.
- Peningkatan manajemen berbasis komunitas.
- Rehabilitasi habitat dan ekosistem pesisir juga mitigasi bencana pesisir.

Penyediaan Pembiayaan KKP Jangka Panjang yang Berkelanjutan

- Implementasi pembiayaan campuran dan pembiayaan inovatif lainnya.
- Implementasi pembayaran jasa ekosistem di tiap-tiap KKP.



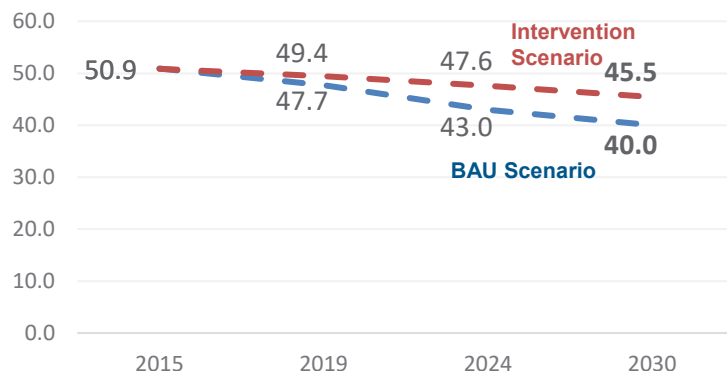
15 EKOSISTEM DARATAN





TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN

15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan



Sumber: Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, BAPPENAS

40.0%

Proporsi tutupan hutan tahun 2030 dengan skenario BAU

45.5%

Proporsi tutupan hutan tahun 2030 dengan skenario intervensi

- Asumsi baseline: Menggunakan data analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020-2024.
- Asumsi intervensi: Menggunakan analisis rasionalisasi/redesain kawasan dan tutupan hutan

Hutan memiliki peran yang penting bagi kehidupan.

Hutan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Hutan memberikan habitat bagi hewan, menjamin ketahanan pangan dan kehidupan bagi manusia. Lebih jauh lagi, hutan juga mencegah erosi tanah, memberikan perlindungan DAS, dan memitigasi perubahan iklim.

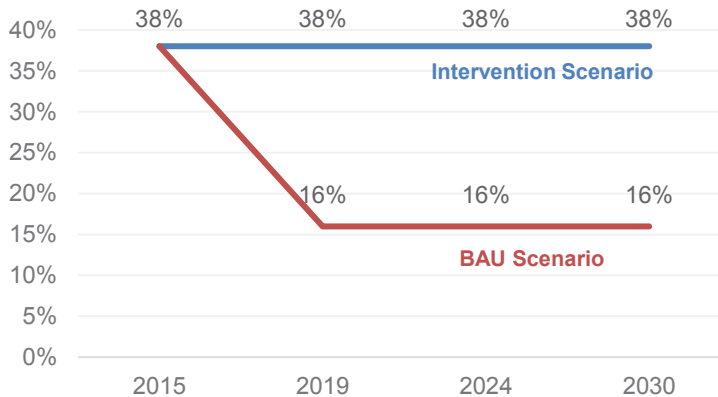
- Pada tahun 2017, proporsi tutupan hutan di Indonesia sekitar 50% dari total luas lahan, setara dengan 93 juta hektar lahan hutan.¹ Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai kawasan hutan tropis terluas ketiga di dunia. Oleh sebab itu, hutan Indonesia sejatinya berperan sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim, tidak hanya di tingkat nasional namun juga tingkat global (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).
- Pencegahan degradasi hutan sangat penting untuk menjamin kelestarian peradaban di masa depan. Peningkatan partisipasi daerah juga perlu dilakukan dalam pengelolaan hutan, serta perlu dilibatkan partisipasi pihak swasta dan negeri dalam program perlindungan hutan.

¹World Bank, 2016.



TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN

15.3.1.(a) Proporsi hutan terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan



Sumber: Direktorat Kehutanan dan Kawasan Sumber Daya Air, BAPPENAS

38%

Proporsi hutan terdegradasi tahun 2030 dengan skenario BAU

16%

Proporsi hutan terdegradasi tahun 2030 dengan skenario intervensi

- Asumsi baseline: rata-rata tahunan degradasi hutan sebelum tahun 2011.
- Asumsi skenario: rata-rata tahunan setelah adanya degradasi hutan dengan moratorium penggunaan hutan primer (2011-2017).

- Dalam 25 tahun ke belakang, Indonesia telah kehilangan hampir seperempat dari lahan hutannya. Daerah dengan degradasi hutan tertinggi yakni Kalimantan dan Sumatera, yang pada tahun 2016-2017, kehilangan 68% dan 51% kawasan hutannya. Degradasi tertinggi terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi.¹ Deforestasi yang terjadi ini utamanya disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi kawasan industri.
- Di tengah berlangsungnya deforestasi, degradasi hutan di Indonesia tercatat menurun hingga 60%-nya pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.² Hal ini disebabkan oleh moratorium lahan gambut nasional yang efektif sejak 2016 dan kementerian lain yang membatasi pembukaan lahan di kawasan hutan dan lahan gambut.
- Penurunan deforestasi yang signifikan di Indonesia memberikan ruang bagi target penurunan emisi yang ambisius dan berkontribusi bagi tujuan pembangunan berkelanjutan di kancah internasional. Untuk meraih target tersebut, pemerintah perlu mendorong partisipasi pemerintah daerah juga sektor swasta dalam program perlindungan hutan.

¹World Economic Forum, 2018.

²World Resource Institute, 2018.

Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	50.9	50.9
2019	47.7	49.4
2024	43	47.6
2030	40	45.5



Proporsi hutan terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	0.38	0.38
2019	0.38	0.16
2024	0.38	0.16
2030	0.38	0.16

Arah Kebijakan 2020-2024

Strategi

Mengurangi laju deforestasi di Indonesia

- Penataan ulang alokasi kawasan hutan Indonesia
- Penggunaan teknologi dan informasi dalam penggunaan lahan dan kawasan hutan menuju *Forestry 4.0*
- Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif pengelolaan hutan
- Peningkatan hak akses kelola masyarakat dalam mengelola hutan

Mengurangi laju degradasi hutan

- Melanjutkan kebijakan moratorium penundaan izin atau konsesi penggunaan hutan primer.
- Mengoptimalkan pemanfaatan hutan tanaman.
- Melanjutkan kebijakan perlindungan gambut.

Arah Kebijakan 2025-2030

Strategi

Mengurangi laju deforestasi di Indonesia

- Penguatan kelembagaan masyarakat dalam mengelola hutan.
- Peningkatan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan secara ilegal.
- Penguatan *Forestry 4.0*

Mengurangi laju degradasi hutan

- Melanjutkan kebijakan moratorium penundaan izin atau konsesi penggunaan hutan primer.
- Mengoptimalkan pemanfaatan hutan tanaman untuk mendukung bioekonomi.
- Melanjutkan kebijakan perlindungan gambut.

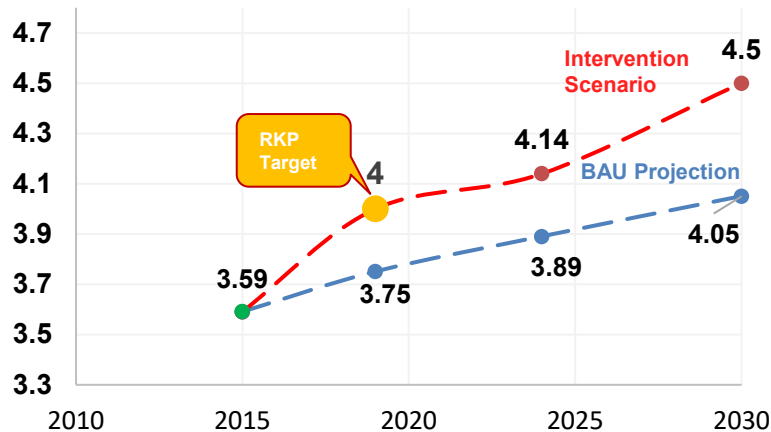
16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH





TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi



4.05

Indeks Perilaku
Anti-korupsi tahun
2030 dengan
skenario BAU

4.5

Indeks Perilaku
Anti-korupsi tahun
2030 dengan
skenario intervensi

Sumber: BPS; Proyeksi: Bappenas

- Korupsi merupakan perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Perilaku korupsi akan mengurangi efektivitas kebijakan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kualitas pelayanan masyarakat. Selain itu, korupsi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintahan.
- Pemberantasan korupsi merupakan proses panjang yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang dapat dilakukan melalui: 1) Penegakan hukum, 2) Rekrutmen pejabat publik dengan sistem merit yang menekankan integritas, kredibilitas, serta rekam jejak, dan 3) Menumbuhkan sistem nilai dan perilaku anti korupsi sejak pendidikan anak usia dini.
- Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang menjanjikan. Upaya tersebut antara lain dengan deregulasi, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Upaya tersebut berhasil memperbaiki persepsi masyarakat mengenai korupsi. Menurut data Transparency International, Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang stabil dari angka 26 di tahun 2008 ke 38 di tahun 2018. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-89 dari 180 negara yang diamati. CPI digunakan sebagai alat bantu dalam pencegahan tindak korupsi yang banyak digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Indeks Perilaku Anti Korupsi		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	3.59	3.59
2019	3.75	4.0
2024	3.89	4.14
2030	4.05	4.5



Penguatan Sistem Anti Korupsi

- Perbaikan kualitas layanan publik.
- Pengembangan sistem integritas nasional.
- Penguatan upaya pencegahan korupsi di internal K/L (unit pengendali Gratifikasi, PPID, LHKPN, LHKASN, PBJ, WBK, Pakta Integritas, Zona Integritas).
- Pengembangan mekanisme kolektif dalam pencegahan korupsi yang melibatkan aktor non-pemerintah (masyarakat sipil, swasta, akademisi, filantropi, dsb).
- Kolaborasi pencegahan korupsi sektor penegakan hukum, reformasi birokrasi, keuangan negara, perizinan dan tata niaga.
- Pengembangan Pusat Edukasi Anti Korupsi dan diseminasi pencegahan korupsi secara nasional.
- Perbaikan mekanisme Justice Collaborator dan Whistleblower.
- Pengembangan clearing house database anti korupsi yang terpadu.
- Penanganan petty corruption melalui jalur administrasi penal (tindakan administrasi non-judisial).

Mengoptimalkan Penguatan Integritas Masyarakat, Penegak Hukum, dan Penyelenggara Negara

- Pendidikan dan Pelatihan anti korupsi berskala nasional dengan pelibatan aktor non-pemerintah.
- Integrasi clearing house database anti korupsi dengan Satu Data Indonesia.
- Implementasi mekanisme kolektif dalam pencegahan korupsi yang melibatkan aktor non-pemerintah (masyarakat sipil, swasta, akademisi, filantropi, dsb) secara nasional.

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

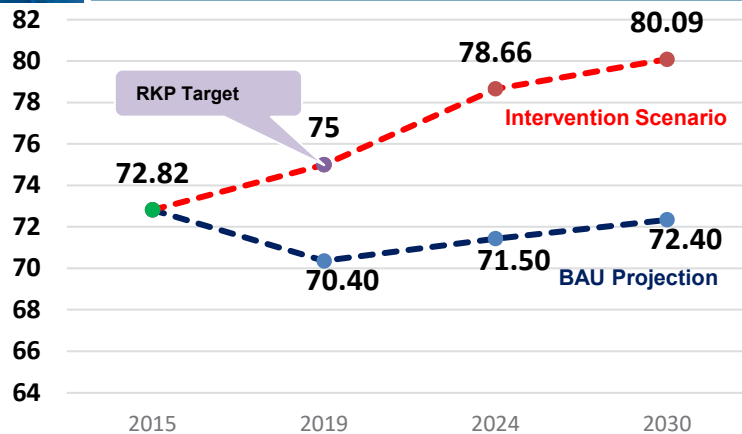
Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi



TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

16.7.2* Indeks Demokrasi Indonesia



72.40

Indeks Demokrasi
Indonesia tahun
2030 dengan
skenario BAU

80.09

Indeks Demokrasi
Indonesia tahun
2030 dengan
skenario BAU

Sumber: BPS; Proyeksi: Bappenas

- Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi di Indonesia merupakan contoh bahwa agama Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penentuan kebijakan.
- Tantangan demokrasi di Indonesia saat ini antara lain adalah euforia akan penggunaan hak sipil yang berlebihan yang bertentangan dengan peraturan, kelompok tertentu yang ingin mengganti sistem demokrasi yang ada dengan sistem lain, serta praktik demokrasi yang lebih menekankan pada hal-hal prosedural daripada hal yang substansial
- Seiring berjalannya waktu dan sistem pemilihan umum secara langsung masih dilaksanakan di Indonesia, maka demokrasi di Indonesia akan lebih matang. Melalui upaya bersama serta pengertian antara elemen masyarakat mengenai demokrasi sebagai sistem terbaik untuk masyarakat Indonesia serta memperkuat peran lembaga masyarakat, partai politik, dan organisasi masyarakat, maka tingkat demokrasi di Indonesia akan semakin meningkat.

Indeks Demokrasi Indonesia		
Tahun	Baseline	Intervensi
2015	72.82	72.82
2019	70.40	75
2024	71.50	78.66
2030	72.40	80.09



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik dan penguatan desentralisasi

- Peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Partai Politik.
- Peningkatan kaderisasi anggota Partai Politik.
- Peningkatan keterwakilan perempuan di Partai Politik dan legislatif.
- Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
- Peningkatan pemahaman budaya demokrasi di kalangan warga negara.
- Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

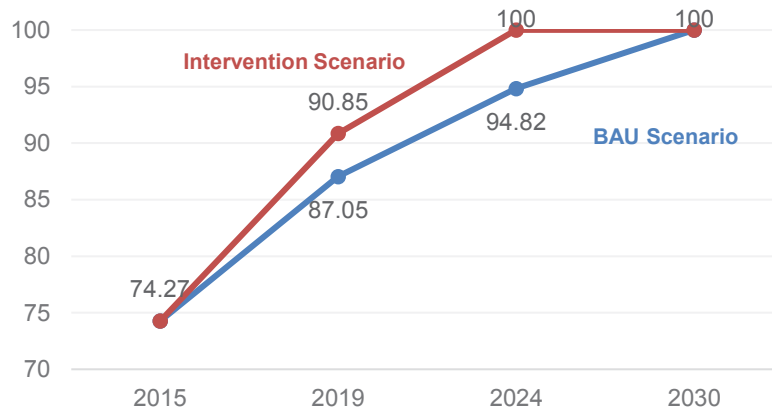
Pemantapan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik, penguatan desentralisasi, dan peningkatan partisipasi politik warga

- Pemantapan sumber keuangan Partai Politik.
- Pemantapan transparansi dan akuntabilitas Partai Politik.
- Pemantapan kaderisasi anggota Partai Politik.
- Penguatan keterwakilan perempuan di Partai Politik dan legislatif;
- Pemantapan peraturan perundangan bidang politik.
- Penguatan pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
- Pemantapan budaya demokrasi di kalangan warga negara.
- Penguatan peran kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia.



TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur



Sumber: BPS; Proyeksi: Bappenas

100%



Seluruh anak usia di bawah 5 tahun akan memiliki akta kelahiran pada tahun 2030



- Akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang penting sebagai jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak. Akta kelahiran merupakan langkah awal dalam menjamin hak seorang anak yakni pengakuan keberadaan anak di hadapan hukum; tanpa akta kelahiran, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial tidak bisa didapatkan oleh anak.
- Dalam konteks keberagaman Indonesia dengan budaya pencatatan yang masih rendah, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya dokumen hukum. Proses kelahiran yang tidak tercatat, terutama persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan, persalinan di daerah terpencil, serta kelompok rentan atau termarginalkan cenderung menghambat proses mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka.
- Upaya yang serius dan kebijakan kependudukan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu mengimplementasikan kebijakan sistem penjangkauan pendaftaran akta kelahiran.

**Proporsi anak < 5 tahun yang
kelahirannya tercatat**

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	74.27	74.27
2019	87.05	90.85
2024	94.82	100
2030	100	100



Memperluas jangkauan layanan pencatatan akta kelahiran bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

- Perluasan inovasi layanan pencatatan akta kelahiran yang mudah dan terjangkau.
- Peningkatan kapasitas petugas pelayanan pencatatan akta kelahiran.
- Pemanfaatan dana desa dan/atau alokasi dana desa untuk penempatan registrasi desa.
- Peningkatan peran rujukan informasi untuk pencatatan akta kelahiran yang mudah diakses dan inklusif.
- Pengembangan sistem registrasi daring dan portal pesan singkat untuk pencatatan akta kelahiran.
- Penguatan sistem pengaduan dan penyampaian aspirasi yang responsif untuk layanan pencatatan akta kelahiran.
- Pemutakhiran catatan akta kelahiran di desa dan kecamatan secara sistematis sebagai bagian dari SIAK.
- Penyelarasan kewenangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa dalam pemutakhiran catatan akta kelahiran.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Meningkatkan efektivitas jangkauan layanan pencatatan akta kelahiran bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri

- Standardisasi inovasi layanan pencatatan akta yang memenuhi kualitas maksimum pelayanan.
- Peningkatan kapasitas petugas pelayanan pencatatan akta kelahiran yang memenuhi kualifikasi pelayanan prima.
- Peningkatan peran rujukan informasi untuk pencatatan akta kelahiran yang mudah diakses dan inklusif.
- Perluasan dan standardisasi sistem registrasi daring dan portal pesan singkat untuk pencatatan akta kelahiran.
- Integrasi sistem pengaduan dan pelayanan purna.
- Pemutakhiran catatan akta kelahiran di desa secara sewaktu terus menerus, dan berbasis daring.
- Monitoring kewenangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa dalam pemutakhiran catatan akta kelahiran.



Meningkatkan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan kelahiran

- Pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi pencatatan akta kelahiran.
- Pengembangan sistem edukasi pencatatan akta kelahiran.
- Pelibatan organisasi masyarakat sipil, kader komunitas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi pencatatan akta kelahiran.
- Pemanfaatan data dan dokumen akta kelahiran untuk layanan publik.
- Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong masyarakat untuk melaporkan peristiwa kelahiran.

Memperkuat koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah

- Pengembangan mekanisme penganggaran untuk pencatatan akta kelahiran dan perubahan status anak di tingkat pusat dan daerah.
- Penyelarasan program dan kebijakan strategis di tingkat pusat dan daerah serta antar sektor terkait dengan pencatatan akte kelahiran.
- Penyelarasan kebijakan dan prosedur perubahan status anak di tingkat pusat dan daerah serta antar sektor.

Memperkuat kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan kelahiran

- Pelibatan organisasi masyarakat sipil, kader komunitas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk penguatan pemahaman pencatatan akta kelahiran.
- Optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen akta kelahiran untuk layanan publik.

Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah

- Evaluasi efektivitas mekanisme untuk pencatatan akta kelahiran dan perubahan status anak di tingkat pusat dan daerah.
- Integrasi pelaksanaan program dan kebijakan strategis di tingkat pusat dan daerah serta antar sektor terkait dengan pencatatan akte kelahiran.
- Integrasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur perubahan status anak di tingkat pusat dan daerah serta antar sektor.

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Mempercepat kepemilikan akta kelahiran untuk kelompok khusus

- Klasifikasi keragaman kelompok khusus
- Identifikasi kerentanan dan hambatan dalam mengakses akta kelahiran;
- Penyelarasan kebijakan dan aturan hukum pelayanan pencatatan akta kelahiran untuk kelompok rentan dan khusus.
- Penyusunan dasar hukum dan pedoman teknis pelayanan pencatatan akta kelahiran untuk kelompok rentan dan khusus.
- Peningkatan kapasitas petugas untuk layanan pencatatan akta kelahiran untuk kelompok rentan dan khusus.
- Peningkatan pengetahuan dan keaktifan kelompok khusus dalam melaporkan kelahiran dan memperoleh akta kelahiran.

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran untuk kelompok khusus

- Integrasi pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum pelayanan pencatatan akta kelahiran untuk kelompok rentan dan khusus.
- Perluasan inovasi teknis pelayanan pencatatan akta kelahiran untuk kelompok rentan dan khusus.
- Penguatan kapasitas petugas secara berkesinambungan untuk layanan pencatatan akta kelahiran untuk kelompok rentan dan khusus.



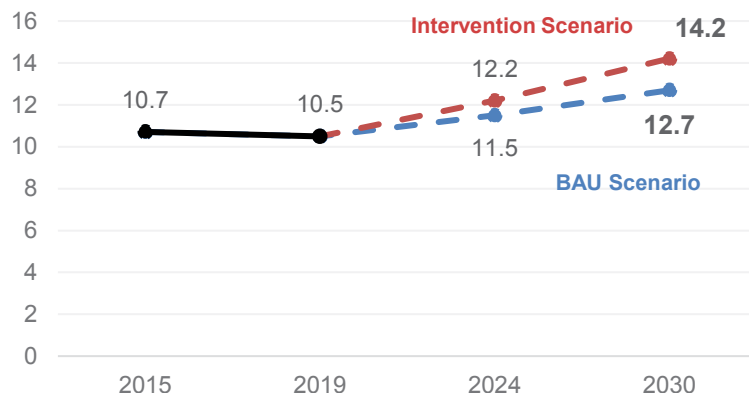
17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN





TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

17.1.1.(a) Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB



Sumber: Proyeksi Bappenas



- Dalam perekonomian, perpajakan memiliki tiga fungsi yaitu: redistribusi, pemerataan, dan stabilisasi. Pajak merupakan sumber daya yang penting untuk menjalankan pemerintahan yang tangguh dan kredibel. Pembayaran pajak oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam agenda pembangunan nasional.

12.7%

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB tahun 2030 dengan skenario BAU

14.2%

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB tahun 2030 dengan skenario intervensi

- Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia masih relatif sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangganya di Asia Tenggara. Pada tahun 2016, rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia hanya 10,3%, menempatkan Indonesia di posisi kedua terbawah dari kesepuluh negara Asia Tenggara (ASEAN) dan hanya unggul dari Myanmar.¹
- Tingginya rasio penerimaan pajak akan meningkatkan kapasitas negara dalam membiayai program pembangunan. Dibutuhkan upaya yang besar untuk mencapai rasio penerimaan pajak hingga 14,2% pada tahun 2030, bukan suatu hal yang tidak memungkinkan. Namun begitu, beberapa langkah kebijakan harus dilakukan untuk mencapai target tersebut, seperti memperluas basis pajak, menyediakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

¹ Rasio Pajak Indonesia Lebih Rendah dari Laos; Katadata (2018)

Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	10.7	10.7
2019	11.0	11.1
2024	12.2	12.7
2030	13.5	15.1



Optimalisasi penerimaan negara melalui penguatan sistem administrasi dan regulasi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi

Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

- **Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan**
- **Perluasan transparansi informasi di bidang perpajakan**
Pelaksanaan AEOI, P3B dan Multilateral Instrument (MLI)
Pengaturan Beneficial Ownership
- **Penyempurnaan kebijakan perpajakan yang dapat mendorong investasi sesuai karakteristik kewilayahan serta sektoral, termasuk pemberian insentif perpajakan yang mendukung daya saing nasional dan menciptakan nilai tambah tinggi**
- **Perbaikan administrasi perpajakan**
Core tax system
- **Perbaikan basis data perpajakan**
Penyusunan profiling WP daerah untuk penentuan potensi pajak daerah
Pendataan ulang Wajib Pajak dan Objek Pajak
Peningkatan kerjasama pertukaran data dengan penyedia data lain

Optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi administrasi yang berkelanjutan serta kebijakan perpajakan yang adaptif dengan tetap menjaga iklim investasi

Arah Kebijakan
2025-2030

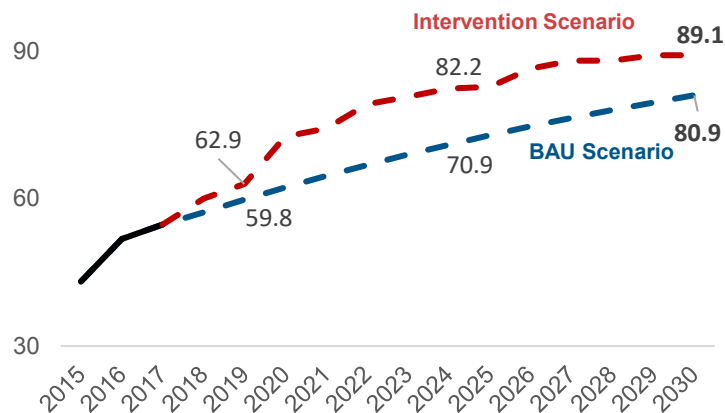
Strategi

- **Optimalisasi penerimaan perpajakan**
Meningkatkan kepatuhan a.l. dari sektor-sektor yang sulit dipajaki
Menjamin kesederhanaan pemungutan pajak
Kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan era digital
Memperkuat utilisasi data dan informasi untuk kepentingan perpajakan
- **Memperkuat komitmen serta kerjasama perjanjian perpajakan internasional**
Menyusun regulasi yang dapat mempercepat adopsi perjanjian perpajakan internasional
- **Penyempurnaan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekspor**
Perluasan insentif perpajakan (tax holiday, tax allowance, vokasi, R&D)
- **Membangun sistem perpajakan yang semakin kredibel, serta memberi pelayanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak**
Kehandalan pengelolaan basis data/administrasi perpajakan
Integritas dan produktivitas petugas perpajakan



TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

17.8.1* Proporsi Individu yang Menggunakan Internet



80.9%

Proporsi individu yang menggunakan internet tahun 2030 dengan skenario BAU

89.1%

Proporsi individu yang menggunakan internet tahun 2030 dengan skenario intervensi

Sumber: Proyeksi Bappenas

Revolusi teknologi dan informasi telah mendorong dunia menuju revolusi industri 4.0.

Dewasa ini, internet memegang peranan penting dalam hal **penyebaran informasi** serta **peningkatan layanan masyarakat** (seperti digitalisasi layanan kesehatan dan pendidikan).

- Perluasan akses internet berpengaruh pada penurunan ongkos ekonomi dan peningkatan produktivitas. Munculnya layanan platform digital (seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Gojek) membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat. Di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, perluasan akses internet memerlukan investasi yang tinggi. Namun Indonesia telah memulainya dengan program satelit Palapa.
- Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa perluasan akses internet harus diimbangi dengan konten/isi dari internet itu sendiri. Capaian target tahun 2030 sebesar 89,3% pengguna internet di Indonesia bukanlah hal yang sulit mengingat permintaan masyarakat atas kebutuhan internet juga cukup tinggi.

Proporsi Individu Mengakses Internet

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	43.15	43.15
2019	59.77	62.94
2024	70.93	82.32
2030	80.95	89.10



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Pemerataan infrastruktur dan akses terhadap layanan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) dan meningkatkan penyediaan layanan publik yang berbasis pada TIK

- Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan akses terhadap layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya ekstensifikasi dari jaringan tulang punggung nasional (Palapa Ring)
- Meningkatkan penyediaan layanan publik yang berbasis pada TIK pada sektor-sektor:
 - Pendidikan. Terutama tingkat Perguruan Tinggi dan SMA.
 - Kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan hingga level puskesmas yang mencakup layanan dasar kesehatan dan sistem manajemen kesehatan.
 - Layanan administrasi pemerintah (dukcapil, bantuan sosial non tunai, pemantauan kinerja pemerintah, dst),
 - Layanan masyarakat pada sektor-sektor ekonomi (pertanian, industri, keuangan, transportasi, dst)

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

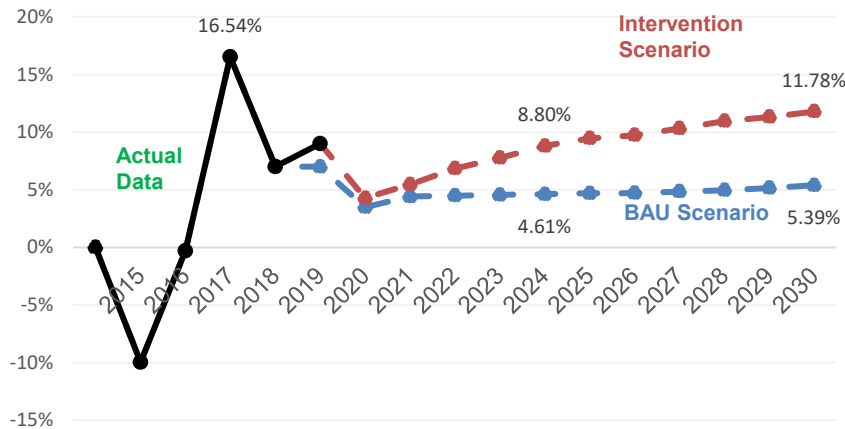
Pemantapan terhadap jaringan yang menjangkau pedesaan dan terus meningkatkan penyediaan layanan publik berbasis TIK

- Melakukan pemantapan terhadap jaringan yang menjangkau pedesaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal hingga level pedesaan
- Meningkatkan penyediaan layanan publik yang berbasis pada TIK pada sektor-sektor:
 - Pendidikan. Ditargetkan hingga melayani tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP).
 - Kesehatan. Peningkatan layanan hingga mencapai layanan tersier seperti antrean *online* dan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem keuangan *online*.
 - Layanan sosial yang menjangkau seluruh lapisan usia, termasuk usia lanjut.
 - Integrasi layanan pemerintah dengan sektor lainnya secara nasional, sehingga akuntabilitas dan efektivitas layanan pemerintah menjadi optimal.



TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

17.11.1.(a) Pertumbuhan Produk Ekspor Non-Migas



5.39%

Pertumbuhan
produk ekspor
nonmigas tahun
2030 dengan
skenario BAU

11.78%

Pertumbuhan
produk ekspor
nonmigas tahun
2030 dengan
skenario intervensi

Sumber: Proyeksi Bappenas

- **Perdagangan** merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting karena **fungsinnya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan** yang menciptakan keuntungan bagi perekonomian secara keseluruhan. Perdagangan juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme harga, kompetisi, *spillover* pengetahuan, inovasi, serta hubungan dan kolaborasi global.
- Ekspor produk nonmigas sangat esensial bagi perekonomian Indonesia di mana sektor tersebut **menyumbang 90% dari total ekspor Indonesia**. Situasi ini membuat lebih banyak orang dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat perdagangan karena sektor tersebut membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, sektor nonmigas juga berpotensi memberikan kesempatan penguasaan teknologi dan penciptaan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.
- Struktur ekspor Indonesia masih didominasi oleh **komoditas yang berbasis sumber daya alam** yang memiliki risiko volatilitas harga dan memengaruhi neraca perdagangan. Untuk mencapai target tahun 2030, Indonesia perlu memastikan **situasi yang lebih baik agar lebih banyak lagi pelaku ekonomi yang terlibat berpartisipasi dalam kegiatan produksi dan perdagangan internasional**, dan juga meningkatkan nilai tambah serta faktor-faktor produktivitas.

Pertumbuhan Produk Ekspor Non-Migas

Tahun	Baseline	Intervensi
2015	-9.96%	-9.7%
2019	7.00%	9.00%
2024	4.61%	8.80%
2030	5.39%	11.78%



Arah Kebijakan
2020-2024

Strategi

Mendorong pertumbuhan perdagangan luar negeri barang dan jasa Indonesia melalui pemanfaatan rantai produksi global dan perluasan produk serta pasar tujuan ekspor

- 1. Akses ke Pasar Global**
 - Perluasan dan pendalaman pasar
 - Fasilitasi perdagangan
 - Promosi terintegrasi
- 2. Integrasi pasar global dan jejaring produksi**
 - Peningkatan partisipasi dalam Global Production Network
 - Diversifikasi produk ekspor
- 3. Penguatan nilai produk-produk Indonesia**
 - Peningkatan ekspor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi
 - Peningkatan ekspor jasa
 - Peningkatan daya saing dan standar produk ekspor

Arah Kebijakan
2025-2030

Strategi

Mendorong pertumbuhan perdagangan LN yang berkesinambungan melalui penciptaan daya saing yang didasarkan pada produk barang dan jasa Indonesia berbasis inovasi dan bernilai tambah tinggi

- 1. Memperluas pasar bagi produk Indonesia**
 - Membuka pasar melalui perluasan/penguatan diplomasi ekonomi antara lain kerjasama bilateral yang memiliki peluang pasar prospektif
 - Membuka pasar yang memiliki peluang besar dan memperkuat kehadiran di pasar yang memiliki pertumbuhan tinggi
 - Memperkuat fungsi market intelligence dan pengamanan perdagangan di pasar ekspor utama dan pasar prospektif
 - Memperluas bauran dan meningkatkan posisi produk Indonesia dala
- 2. Meningkatkan citra produk Indonesia**
 - Meningkatkan pengakuan citra produk Indonesia (made in Indonesia atau Indonesia Brand)
 - Meningkatkan positioning produk Indonesia lebih unggul dibanding pesaing
 - Meningkatkan komposisi sektor jasa domestik dalam produk ekspor Indonesia
- 3. Memperkuat kebijakan Perdagangan Luar Negeri**
 - Harmonisasi kebijakan industri dan perdagangan
 - Meningkatkan fasilitasi perdagangan di Indonesia dengan standar internasional
 - Mengembangkan one stop shop asistensi ekspor secara *online*



BAB 3

KETERKAITAN 17 TUJUAN



PENDAHULUAN

Terdapat keterkaitan satu sama lain antara ke-17 tujuan dan target-targetnya



Sejak Indonesia mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB), muncul perhatian cukup tinggi akan hubungan atau keterkaitan antara ke-17 tujuan satu sama lain beserta target-targetnya. Perhatian ini diangkat berdasarkan fakta bahwa rencana pembangunan di Indonesia selalu didesain melalui pendekatan yang holistik dalam kerangka Tematik, Holistik, Terintegrasi, dan Spasial (THIS), ditambah Indonesia yang berbentuk negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku bangsa.

Tidak diragukan lagi bahwa implementasi SDGs menuntut desain kebijakan yang sistematis, implementasi strategi yang komprehensif, dan kolaborasi multisektoral. Semua itu memerlukan pemahaman akan keterkaitan antara tujuan-tujuan dan target-targetnya hingga hasil yang konkret dalam pelaksanaannya di lapangan.

Karena itu, bagian ketiga ini akan mendiskusikan mengenai hasil dari pemetaan yang rinci mengenai keterkaitan satu sama lain antara tujuan-tujuan dan target-target pada SDGs di Indonesia. Secara sederhana, bagian ini akan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemangku-kepentingan SDGs untuk membuat skala prioritas dan strategi kebijakan dari tujuan-tujuan pada SDGs yang memiliki daya ungkit paling besar bagi tujuan-tujuan lainnya.

KAJIAN LITERATUR

Banyak literatur menyatakan bahwa 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target-targetnya saling berinteraksi satu dengan lainnya dengan tak terpisahkan. Pencapaian satu tujuan atau target dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan dan target lainnya, dan keterkaitan tersebut membentuk jejaring yang rumit.



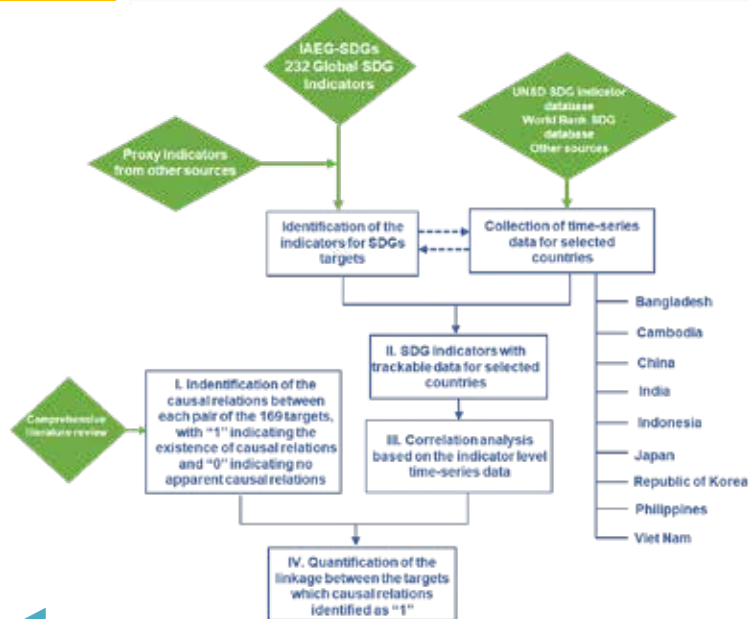
Berbagai studi keterkaitan SDGs digunakan sebagai dasar analisis Peta Jalan SDGs Indonesia. Sebagian literatur tersebut adalah publikasi dari **UN DESA** (Le Blanc, 2015), laporan penelitian **IGES** (Zhou dan Moinuddin, 2017), laporan studi **Bappenas** (Bappenas, 2018), dan publikasi ilmiah yang didukung oleh **Nippon Foundation** (Singh et al., 2018).



Studi keterkaitan tujuan dan target SDGs yang dilakukan oleh IGES mencakup studi kasus di 9 negara Asia termasuk Indonesia. Studi ini merupakan referensi paling komprehensif sebagai dasar analisis keterkaitan tujuan dan target SDGs Indonesia, khususnya target-target yang dibahas pada Peta Jalan SDGs 2017-2030.



METODOLOGI



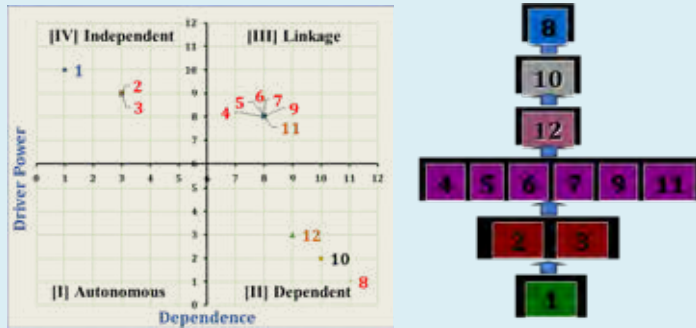
Langkah pertama adalah kajian keterkaitan SDGs dari studi-studi terkemuka. Tujuan dari kajian literatur tersebut adalah untuk “membandingkan membedakan, mengkritisi, menyintesa, dan menyimpulkan” berbagai metodologi dan temuan studi,

Langkah kedua adalah dengan memilih studi yang paling relevan dengan konteks pembangunan Indonesia. Studi dari IGES akhirnya dipilih menjadi basis analisis lebih jauh untuk kasus Indonesia. IGES melakukan studi tersebut menggunakan metodologi analisis jejaring sosial (SNA) untuk mengembangkan jejaring keterkaitan SDGs yang mampu menggambarkan tingkat sentralitas, sentralitas eigenvector, sentralitas antara, dan sentralitas kedekatan. Selain itu, hasil analisis keterkaitan dari studi IGES ini dijadikan konteks dasar bagi langkah analisis selanjutnya.

Analisis keterkaitan pada SDGs Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah.

METODOLOGI

Interpretative Structural Modeling



DIAGRAPH

Membuat grafik hubungan langsung dan tingkat hierarki dari sub-elemen

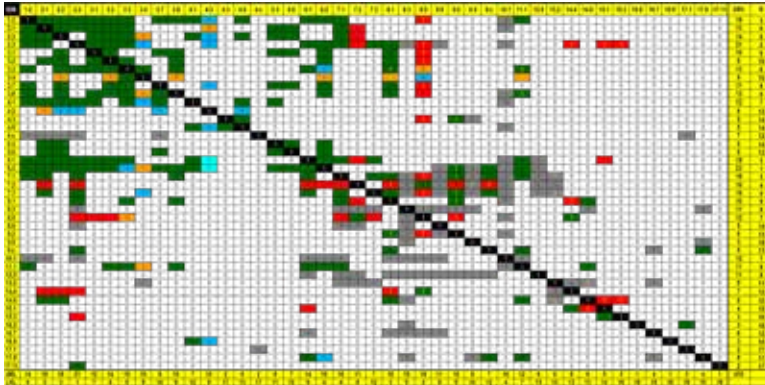
STRUKTUR MODEL

Penggambaran jelas sub-elemen dari sistem dan hubungannya

Langkah ketiga adalah melakukan teknik **interpretative structural modeling** (ISM) melalui persiapan hierarki dan klasifikasi sub-elemen. Langkah ini akan menghasilkan struktur pemodelan akan hubungan antara 17 tujuan dan target-targetnya. Hasil dari langkah ketiga ini akan bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pemangku-kepentingan lainnya yang relevan untuk mendefinisikan struktur hubungan, dan juga menentukan prioritas di antara target-targetnya.

Pada bagian ini, analisis keterkaitan untuk SDGs Indonesia dimulai untuk 43 target dan 17 tujuan.

METODOLOGI



Matriks Keterkaitan SDGs Antar-Target :

Banyak target-target saling bergantung dan memiliki kekuatan penggerak

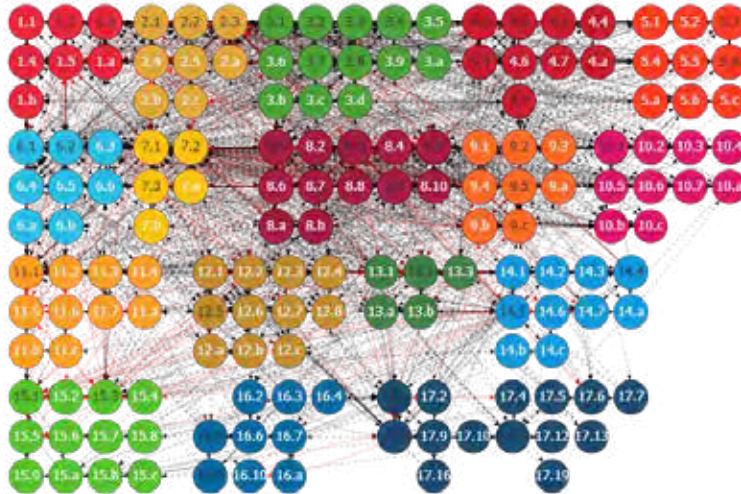
Analisis dari studi IGES yang menggunakan metodologi ISM menyatakan bahwa semua tujuan dan target SDGs memiliki kekuatan penggerak dan saling ketergantungan satu sama lain.

Hasil berbagai studi menyatakan bahwa tujuan dan target pada SDGs saling berhubungan satu sama lain (Le Blanc, 2015; Zhou and Moinuddin, 2017; Bappenas, 2018; Singh et al., 2018).



Keterkaitan ke-17 Tujuan pada SDGs

PEMETAAN KETERKAITAN

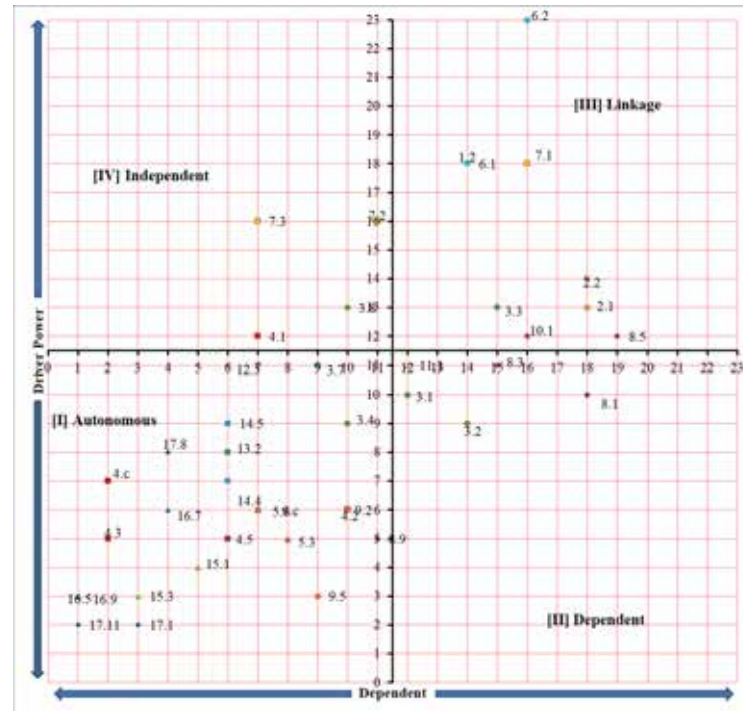


Hasil analisis dari 43 target SDGs menyatakan bahwa terdapat 17 target dari 9 tujuan yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap target-target lainnya, dengan tingkat ketergantungan yang rendah. Target-target tersebut dapat disebut sebagai target dengan kekuatan penggerak yang tinggi.

PEMETAAN KETERKAITAN

Diagraph (Grafik Pengarah) menggambarkan klasifikasi target-target SDGs berdasarkan kekuatan penggerak dan ketergantungannya

- **Sektor 1:** *weak driver-weakly dependent variables (autonomous)* menunjukkan target yang hubungannya relatif rendah dengan target SDGs lainnya.
- **Sektor 2:** *weak driver-strongly dependent variables (dependent)* menunjukkan target yang tidak bebas karena memiliki ketergantungan relatif tinggi kepada target SDGs lainnya.
- **Sektor 3:** *strong driver-strongly dependent variables (linkage)* menunjukkan target SDGs yang memiliki pengaruh dan ketergantungan relatif tinggi terhadap target SDGs lainnya.
- **Sektor 4:** *strong driver-weak dependent variables (independent)* menunjukkan target yang memiliki pengaruh tinggi namun ketergantungan yang rendah terhadap target SDGs lainnya.



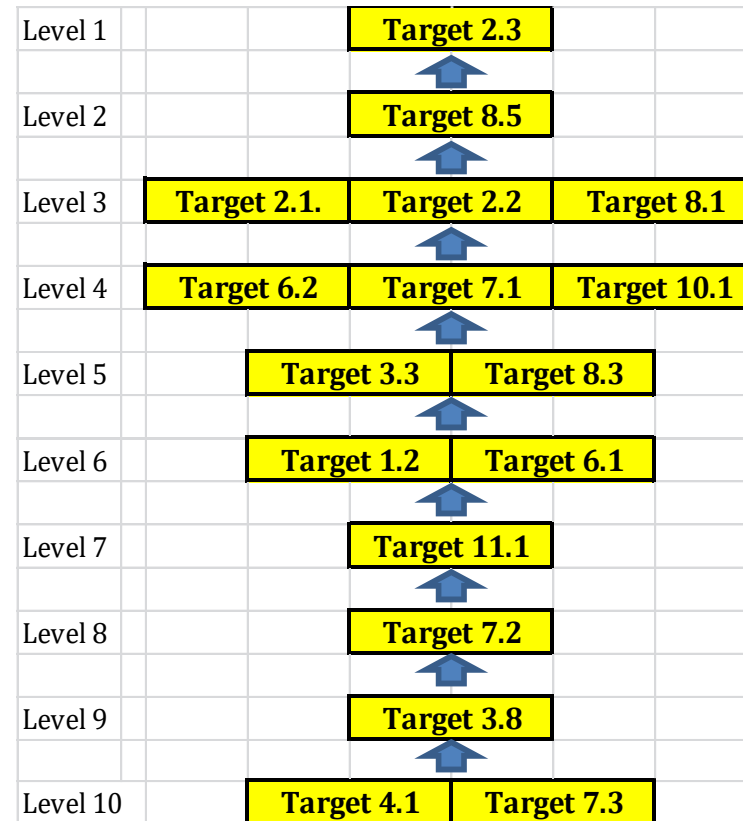
**Empat Kuadran Diagraph
Antara Target-Target SDGs**

Dependensi dan Pengaruh

Struktur dari pengaruh dan dependensi akan ke-17 target dapat ditaruh pada Struktur Hierarki Keterkaitan.

Level pada struktur hierarki menunjukkan derajat ketergantungan target SDGs. Target 2.3 berada pada Level 1 memiliki ketergantungan paling tinggi di antara 17 target lainnya, sementara Target 4.1 dan 7.3 berada pada Level 10, menunjukkan ketergantungan paling rendah.

Empat target di level terendah (Target 4.1, 7.3, 7.2, dan 11.1) berkaitan dengan sektor independent pada diagraph. Target tersebut kurang dependen terhadap target lainnya, namun memiliki pengaruh yang tinggi. Empat target tersebut dapat diartikan sebagai target prioritas karena kekuatannya sebagai pengungkit utama dalam pencapaian banyak target SDGs lainnya.



Hasil Struktur Hierarki dari Keterkaitan Antara Target-Target SDGs

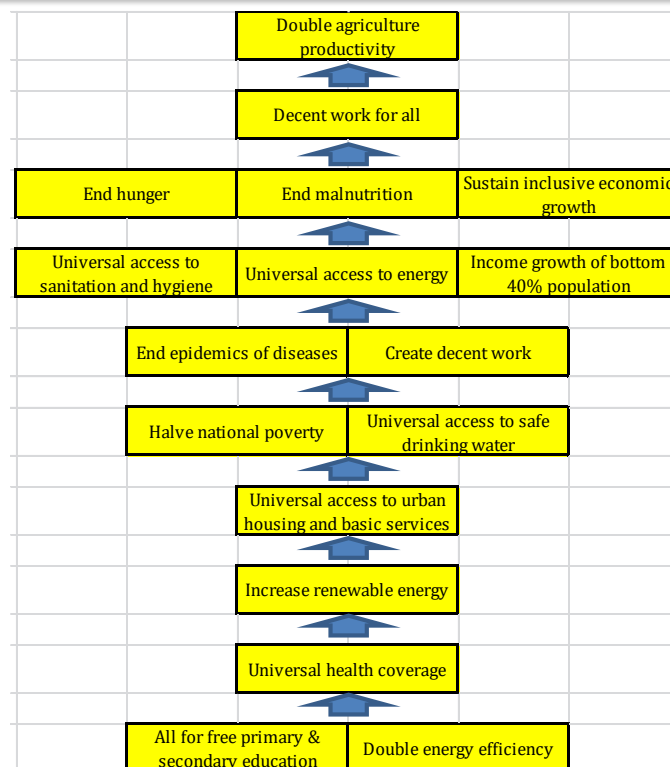
PROSPEK MENDATANG

Pencapaian SDGs dapat dilakukan dengan menentukan prioritas target yang paling penting di antara 17 tujuan.

Hasil analisis menyatakan bahwa kebijakan perlu berfokus pada target di level utama yang mampu mendorong pencapaian target lainnya secara efektif. Oleh karena itu, rekomendasi target SDGs utama adalah:

- Pendidikan dasar dan menengah gratis (Target 4.1),
- Efisiensi energi ganda (Target 7.3),
- Cakupan kesehatan universal (Target 3.8),
- Peningkatan energi terbarukan (Target 7.2).

Selain itu, kebijakan penting lainnya untuk mempercepat pencapaian SDGs adalah perluasan akses atas perumahan perkotaan dan layanan dasar, penyediaan air minum layak, pengurangan kemiskinan, pemberantasan penyakit epidemic, dan peningkatan akses terhadap energi, juga peningkatan pendapatan kelompok miskin.



Target tersebut akan memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan lainnya, yakni pemberantasan kelaparan dan gizi buruk, pertumbuhan ekonomi inklusif, yang nantinya akan meningkatkan jumlah pekerja dan produktivitas, juga mencapai kesejahteraan masyarakat.



BAB 4

STRATEGI PEMBIAYAAN TPB/SDGs



PENDAHULUAN



Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dan negara-negara lain membutuhkan mobilisasi investasi, sumber daya, dan inovasi pembiayaan.

PBB menghitung kesenjangan pembiayaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di negara-negara berkembang saja mencapai 2,5 triliun dollar AS per tahun (UNCTAD, 2014).

Mengingat seberapa besar target SDGs terkait dengan belanja publik, maka Pemerintah Indonesia masih akan memainkan peran utama dalam pembiayaan investasi SDGs. Pemerintah juga mengupayakan iklim yang lebih baik untuk mendorong peran yang lebih tinggi oleh pihak swasta dan non-pemerintah lainnya dalam investasi SDGs di berbagai bidang untuk menutup kesenjangan pembiayaan.

Bab ini menyajikan investasi yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai target SDGs dan strategi untuk mobilisasi pembiayaan investasi tersebut.



KEBUTUHAN INVESTASI SDGS INDONESIA

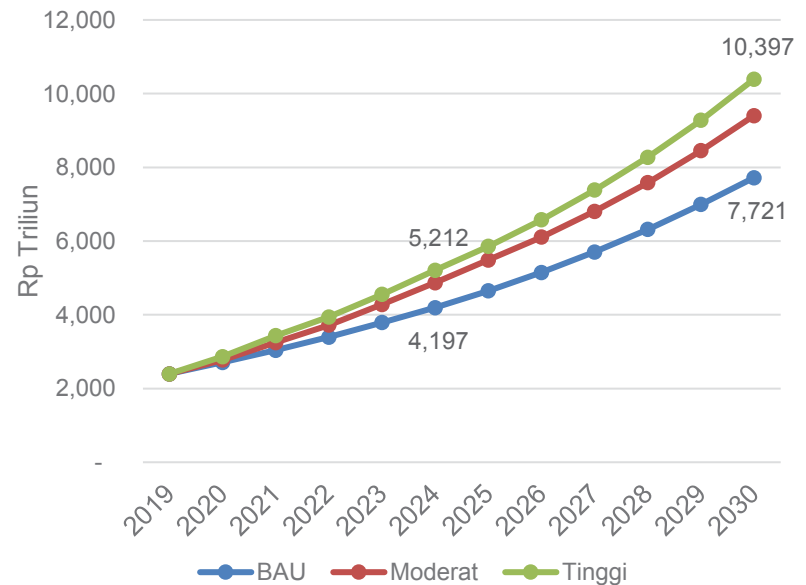
Perhitungan kebutuhan investasi SDGs yang direfleksikan dalam 17 Tujuan dilakukan dengan kategorisasi ke dalam 8 area investasi berikut:

- Infrastruktur
- Kesehatan
- Pendidikan
- Perlindungan sosial
- Perlindungan lingkungan hidup
- Pangan
- Pemerintahan yang bersih, serta ketertiban umum dan keamanan
- Penelitian dan pengembangan



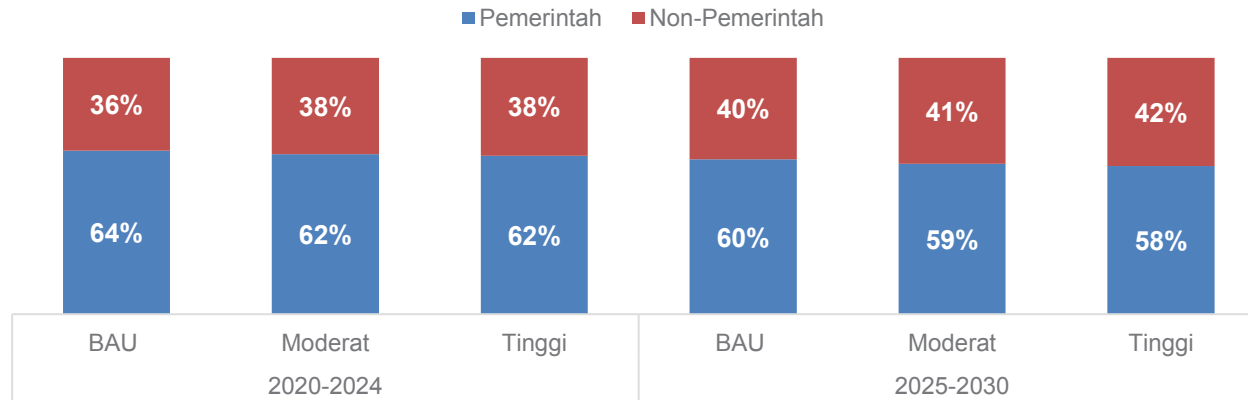
Kebutuhan investasi SDGs Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga skenario: *business as usual*, intervensi moderat, intervensi tinggi, seperti pada grafik di bawah.

Skenario Kebutuhan Investasi SDGs



DISTRIBUSI INVESTASI SDGs

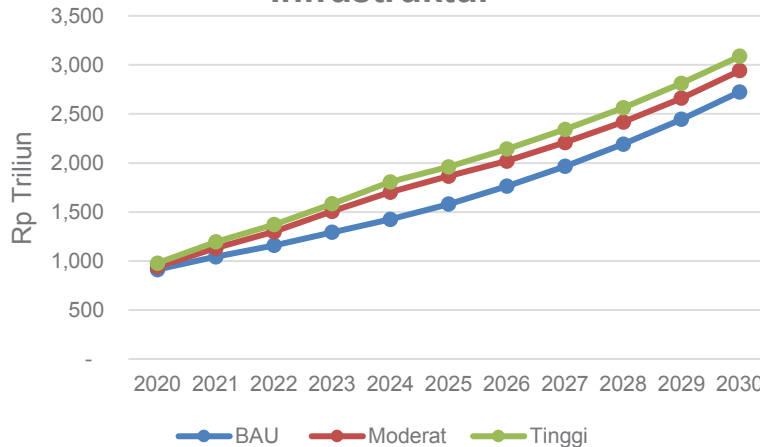
Distribusi Investasi SDGs Antara Pemerintah dan Non-Pemerintah



Saat ini, pemerintah masih mengambil peran utama dalam investasi SDGs. Secara bertahap, peran tersebut akan berkurang seiring dengan meningkatnya peran non-pemerintah. Dalam skenario **intervensi tinggi**, peran **non-pemerintah ini akan meningkat dari 38,2% (2020-2024) menjadi 42,3% (2025-2030)** dalam investasi SDGs.

KEBUTUHAN INVESTASI SDGS PER AREA INVESTASI (1)

Infrastruktur



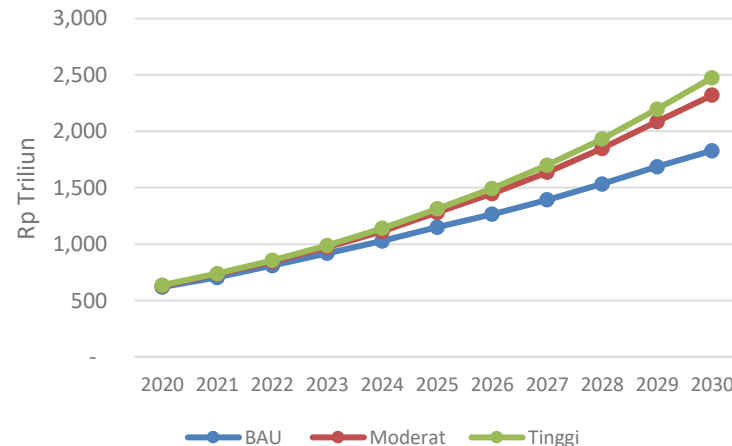
Investasi di area infrastruktur mencakup antara lain:

- Transportasi (jalan, rel kereta, bandara, pelabuhan)
- Energi (listrik, energi baru terbarukan)
- Teknologi informasi dan komunikasi
- Air bersih dan sanitasi
- Sumber daya air

Investasi di area kesehatan mencakup antara lain:

- Program bina gizi dan kesehatan ibu & anak
- Program pengendalian penyakit & penyehatan lingkungan
- Program pembinaan upaya kesehatan
- Program kefarmasian dan alkes
- Penguatan pelaksanaan JKN/KIS
- Keluarga berencana
- DAK kesehatan dan KB
- BOK dan BOKB

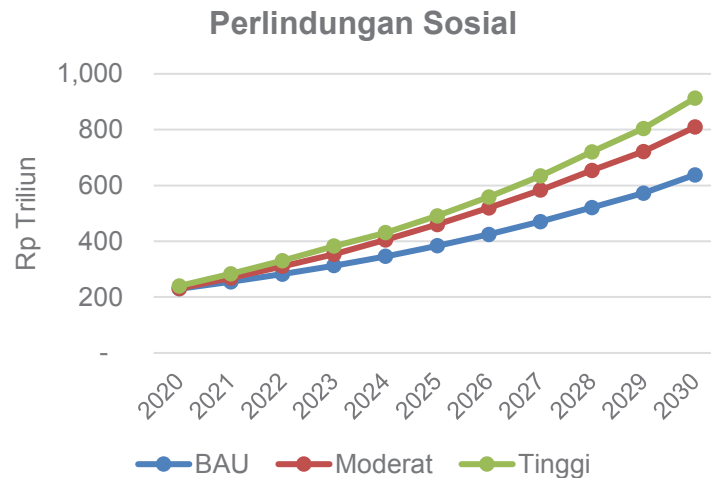
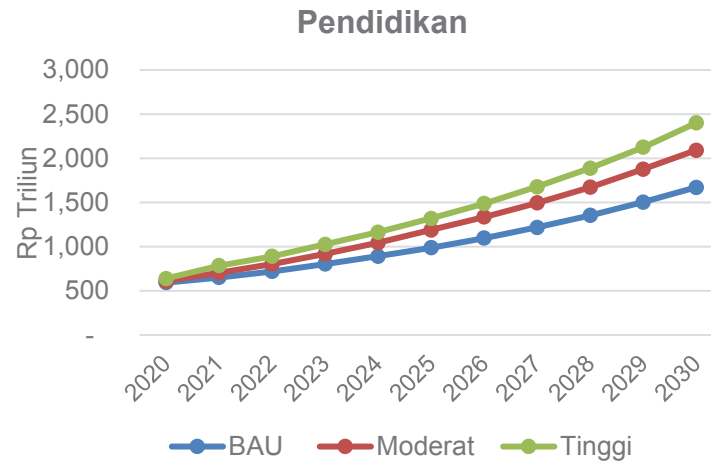
Kesehatan



KEBUTUHAN INVESTASI SDGs PER AREA INVESTASI (2)

Investasi di area pendidikan mencakup antara lain:

- Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan di tingkat usia dini, dasar, menengah, dan tinggi
- Pendidikan non-formal dan informal
- DTU pendidikan
- DAK fisik pendidikan
- Tunjangan profesi guru PNSD
- Bantuan operasional sekolah (BOS)

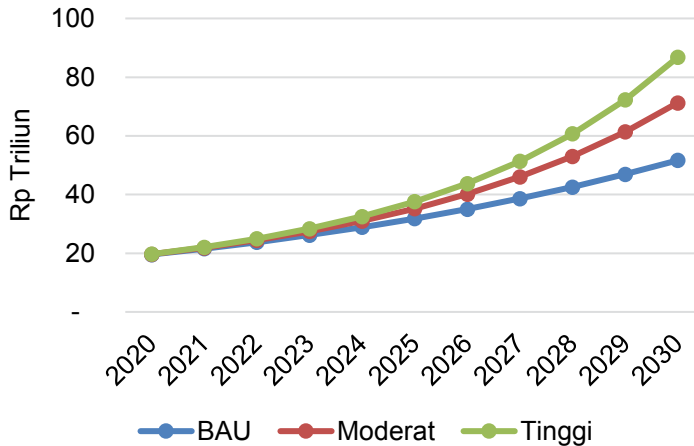


Investasi di area perlindungan sosial mencakup antara lain:

- Bantuan sosial
- Jaminan sosial
- Rehabilitasi sosial

KEBUTUHAN INVESTASI SDGS PER AREA INVESTASI (3)

Perlindungan Lingkungan Hidup



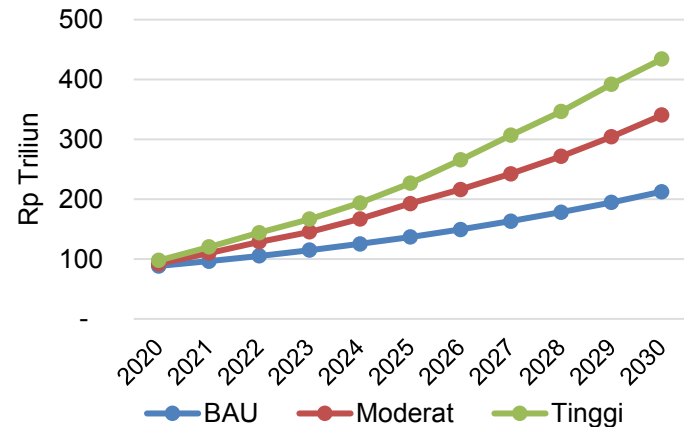
Investasi di area **perlindungan lingkungan hidup** mencakup antara lain:

- Rehabilitasi hutan dan lahan
- Pengendalian DAS dan hutan lindung
- Pengelolaan sampah, limbah, dan B3
- Pengendalian perubahan iklim

Investasi di area **pangan** mencakup antara lain:

- Peningkatan produksi dan akses pangan
- Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan lainnya
- Pembangunan jaringan irigasi pertanian
- Subsidi pupuk
- DAK irigasi dan pertanian

Pangan

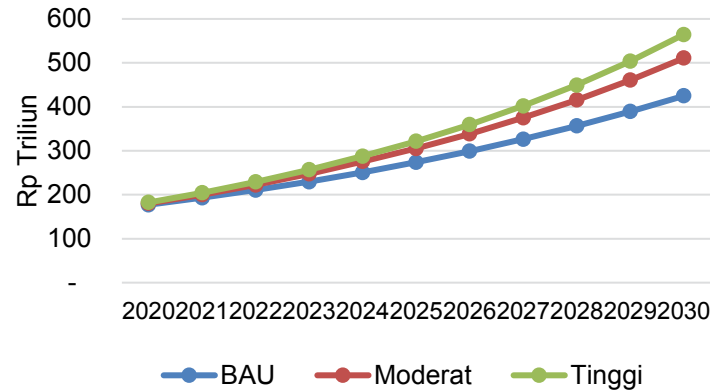


KEBUTUHAN INVESTASI SDGs PER AREA INVESTASI (4)

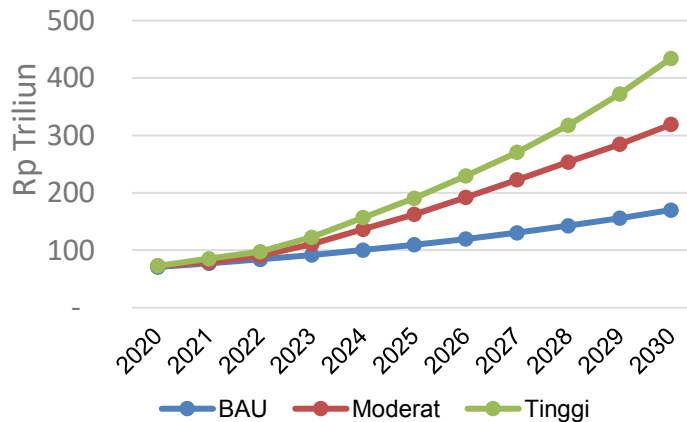
Investasi di area **pemerintahan yang bersih, serta ketertiban umum dan keamanan** mencakup antara lain:

- Tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas di sejumlah Kementerian/Lembaga seperti Kemenkumham, Kejaksaan Agung, POLRI, MA, KPK, BPK, dan BPKP

Pemerintahan yang Bersih, Ketertiban Umum dan Keamanan



Penelitian dan Pengembangan



Investasi di area **penelitian dan pengembangan** mencakup antara lain:

- Penelitian dasar, terapan, hingga pengembangan
- Peningkatan kapasitas peneliti untuk meningkatkan kualitas penelitian
- Penguatan ekosistem pendidikan, penelitian, dan pengembangan
- Sinkronisasi penelitian dengan kebutuhan industri

INVESTASI SDGS DI INDONESIA DAN PERAN NON-PEMERINTAH

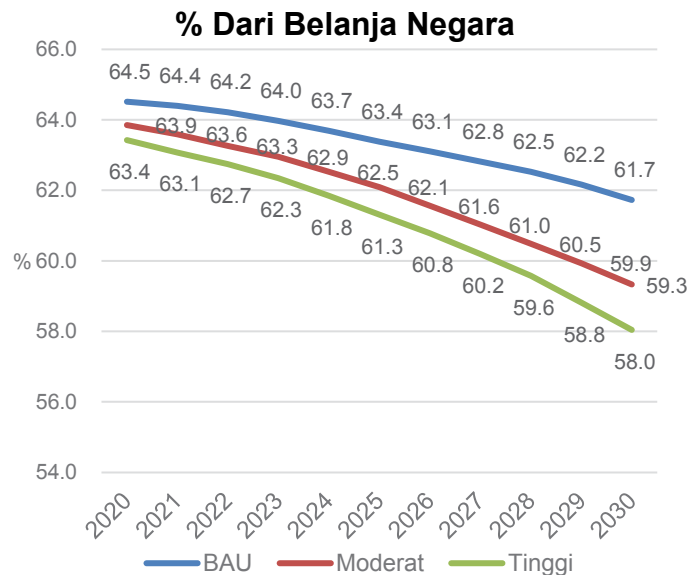
Dalam seluruh skenario, pihak non-pemerintah didorong untuk terus meningkatkan perannya dalam investasi SDGs hingga 2030. Dengan demikian beban investasi yang bersumber dari belanja negara (APBN) akan berkurang.

Secara khusus dalam skenario tinggi, alokasi investasi SDGs dalam belanja negara akan berkurang dari 63,4% menjadi 58% pada tahun 2030.

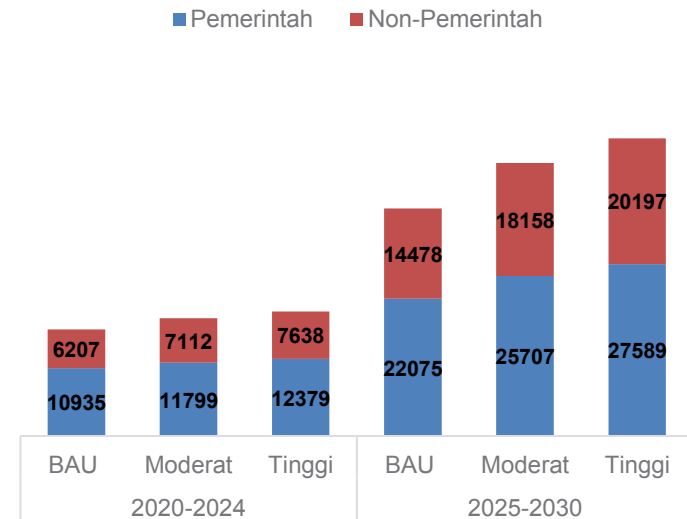
Investasi pihak non-pemerintah dalam skenario Tinggi diproyeksikan sebesar:

pada 2020-2024: **Rp 7.638 Triliun**

pada 2025-2030: **Rp 20.197 Triliun**



Distribusi Investasi SDGs (Rp Triliun)

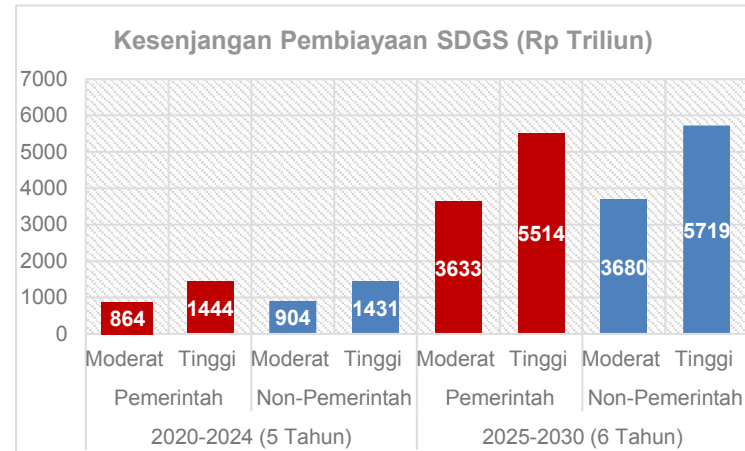




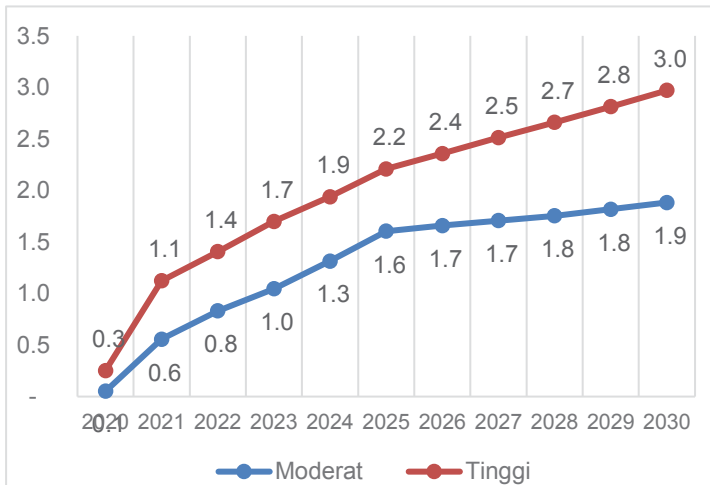
Oleh karena itu...
Terdapat kesenjangan
pembiayaan yang harus ditangani

Kesenjangan pembiayaan SDGs merupakan kebutuhan investasi tambahan untuk mencapai skenario moderat atau tinggi*

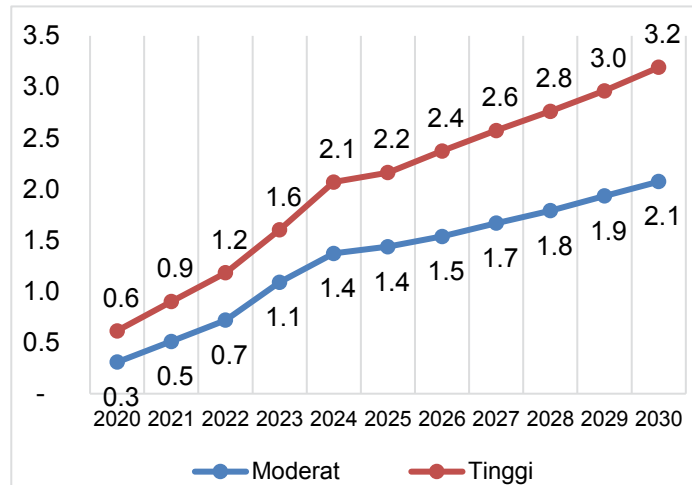
*dihitung dengan mencari selisih antara investasi dalam skenario tinggi dan moderat dengan skenario BAU



KESENJANGAN INVESTASI SDGs PEMERINTAH (%PDB)



KESENJANGAN INVESTASI SDGs NONPEMERINTAH (%PDB)



Pencapaian SDGs memerlukan pembiayaan dan investasi yang memadai.

Inovasi dalam pembiayaan SDGs merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka mempercepat pencapaian SDGs dan melengkapi upaya pembiayaan pembangunan. Peran swasta, filantropi, dan sumber-sumber lainnya dibutuhkan dalam mendukung investasi jangka panjang.

Strategi

- Mobilisasi sumber-sumber pembiayaan yang lebih luas untuk mendukung investasi SDGs memerlukan pengembangan arus finansial selain prioritas nasional, termasuk SDGs.
- Reformasi kelembagaan dan kebijakan yang koheren untuk menjamin pembiayaan yang disinkronisasikan dengan kebutuhan investasi SDGs.
- Komponen kunci dalam reformasi perlu dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan secara koheren.
- Adopsi pendekatan yang strategis oleh pemerintah untuk menjamin reformasi tersebut diprioritaskan dengan benar dan diimplementasikan di waktu yang tepat.

Strategi tersebut menuntut reformasi yang sistematis dan melibatkan area yang luas dan menyeluruh, mulai dari reformasi administrasi publik, tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan kapasitas manajemen pemerintah pusat dan kementerian terkait, serta pemerintah daerah..



TUJUAN STRATEGI PEMBIAYAAN

Strategi pembiayaan diarahkan untuk mencapai **empat tujuan prioritas**:

- **Peningkatan kualitas anggaran**, termasuk efisiensi dan efektivitas belanja negara, dan sinkronisasinya dengan prioritas nasional termasuk intervensi untuk SDGs.
- **Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, terutama pajak (peningkatan rasio pajak)** dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- **Peningkatan investasi non-pemerintah** untuk diarahkan pada prioritas nasional, termasuk intervensi SDGs.
- **Pembangunan *SDG Financing Hub***



IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBIAYAAN SDGS



Peningkatan Kualitas Anggaran

- Memperkuat alokasi sumber daya strategis dan berorientasi hasil pada anggaran
- Mengurangi subsidi dan pembiayaan pada BUMN
- Meningkatkan keseimbangan anggaran pembangunan dengan kebutuhan SDGs
- Meningkatkan efisiensi anggaran dalam sektor, antar sektor, serta realisasinya
- Membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan mitra pembangunan

Peningkatan Investasi Non-Pemerintah

- Memperkuat pengelolaan dan inklusi keuangan
- Menciptakan iklim dan kerangka regulasi yang menjamin kepastian bagi investasi non-pemerintah, seperti pengembangan instrumen keuangan yang inovatif
- Memberikan insentif pajak untuk mendorong peran non-pemerintah dalam kegiatan terkait SDG (litbang, pendidikan kejuruan, perubahan iklim, dll)
- Mempromosikan mekanisme investasi non-pemerintah melalui PPP, CSR, Remitansi, LSM, Filantropi, Zakat, dll

Penguatan Mobilisasi Sumber Daya Domestik

- Memperkuat institusi penerimaan pemerintah, terutama pajak
- Memperluas sumber-sumber pajak dan penerimaan bukan pajak
- Mengimplementasikan teknologi terkini dalam pengelolaan perpajakan
- Memperkuat olaborasi dengan lembaga keuangan

Pembangunan SDG financing hub

- Mengembangkan kerangka regulasi untuk membangun SDG Financing Hub
- Melibatkan peran berbagai lembaga pembiayaan/keuangan domestik dan internasional untuk mendukung SDG Financing Hub
- Sosialisasi SDG Financing Hub

SDGs FINANCING HUB INDONESIA

SDGs *Financing Hub*

Koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pembiayaan inovatif SDGs



1. Mobilisasi dana untuk pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan sumber daya yang dapat diinvestasikan dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Menyalurkan dana ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan berkelanjutan (memastikan dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang berorientasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia).
3. Membangun jejaring kerja yang strategis.
4. Memaksimalkan dampak dan memitigasi dampak negatif - menciptakan iklim yang menjamin adanya perlindungan untuk mendorong peningkatan keterlibatan aktor non-pemerintah.
5. Mengembangkan model, instrument, dan teknologi, serta membangun kondisi yang mendorong munculnya pembiayaan inovatif.
6. Meningkatkan kapasitas dan *knowledge sharing*

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN YANG DIKOORDINASI DAN DISINKRONKAN OLEH SDGS FINANCING HUB

Konsep ini diluncurkan dalam
SDGs Annual Conference 2018







BAB 5

LANGKAH KE DEPAN



LANGKAH KE DEPAN

Pencapaian SDGs merupakan pencapaian agenda pembangunan Indonesia. Indonesia berupaya maksimal untuk mengarusutamakan SDGs ke dalam target dan kebijakan pembangunannya, serta memastikan implementasinya di lapangan. Tujuan yang sangat ambisius harus tercapai, dan untuk itu diperlukan kolaborasi antar-pemangku-kepentingan, pembagian peran, serta pendekatan dan strategi yang inovatif.

Peta jalan SDGs Indonesia adalah kendaraan yang penting bagi pemangku-kepentingan SDGs dalam rangka meraih tujuan dan misi yang sama, dengan target dan arah kebijakan yang jelas. Peta jalan ini adalah dokumen yang penting yang menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan agenda pembangunan 2030 ke dalam perencanaan pembangunan. Indonesia yakin bisa mencapai target-target tersebut, meskipun ada beberapa tantangan yang masih perlu ditangani.

Keterkaitan antara target dan indikator SDGs yang tertulis pada peta jalan ini harus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan saat melakukan skala prioritas. Di samping itu, penting untuk diketahui bahwa beberapa target pada SDGs dapat menjadi pengungkit bagi pencapaian target-target lainnya. Maka dari itu, setiap target dan indikator tidak dapat diperlakukan secara sendiri-sendiri, namun perlu kerangka intervensi kebijakan yang komprehensif dan berkaitan.

Selain itu, Indonesia juga menyadari bahwa implementasi SDGs memerlukan pembiayaan yang besar. Strategi pembiayaan harus luar biasa, di samping dukungan terhadap pengembangan pembiayaan yang inovatif dan kreatif. Mobilisasi sumber daya pembiayaan merupakan kunci utama keberhasilan implementasi agenda pembangunan 2030.

Terlepas dari itu semua, Indonesia akan selalu berupaya sebaik mungkin agar berhasil mencapai agenda pembangunan 2030!





**Kementerian PPN/
Bappenas**

An orange silhouette map of Indonesia is centered on the page, with the text 'INDONESIA 2030' overlaid in a large, bold, orange font.

INDONESIA 2030



We supports the Sustainable Development Goals